



PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 46 TAHUN 2016

TENTANG

KAMUS NAMA-NAMA JABATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN DAERAH
PROVINSI RIAU**



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 46 TAHUN 2016

TENTANG

KAMUS NAMA-NAMA JABATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendukung penyelenggaraan manajemen Pegawai Negeri Sipil yang akuntabel, perlu untuk melakukan penyusunan Kamus Nama-Nama Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- b. bahwa Kamus Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, memuat pengelompokkan rumpun jabatan pelaksana, perumusan nama-nama jabatan pelaksana, ikhtisar jabatan, serta uraian tugas yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- c. bahwa Kamus Nama-Nama Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud dalam huruf b, dapat dijadikan sebagai rujukan penamaan jabatan pelaksana di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kamus Nama-Nama Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra TK. I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 Tentang Nama-nama Jabatan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Pedoman Analisis Jabatan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kamus Nama-Nama Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KAMUS NAMA-NAMA JABATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Provinsi Riau;
2. Pemerintah Daerah adalah gubernur dan perangkat daerah sebagaimana unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Riau;
4. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dan suatu satuan kerja organisasi;
5. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan kerja organisasi negara;
7. Ikhtisar jabatan atau ringkasan tugas adalah ringkasan dan tugas-tugas yang disusun secara ringkas dalam bentuk satu kalimat yang mencerminkan pokok-pokok tugas jabatan;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini sebagai acuan bagi SKPD untuk menentukan kaedah dan kriteria dalam pemberian nama-nama jabatan Jabatan Pelaksana yang bersifat generik serta menentukan rumpun jabatan.

Pasal 3

Tujuan dibuatnya nama jabatan pelaksana sebagai acuan untuk penamaan jabatan bagi setiap PNS yang memegang jabatan pelaksana.

Pasal 4

Ruang Lingkup kamus nama-nama jabatan pelaksana meliputi:

- a. Inventarisasi jabatan pelaksana;
- b. Pengelompokan jabatan pelaksana berdasarkan sifat dan karakteristik pekerjaan;
- c. Kamus nama-nama jabatan pelaksana.

BAB III **PENYUSUNAN RUMPUN JABATAN**

Bagian Kesatu **Inventarisasi Jabatan**

Pasal 5

Inventarisasi jabatan dilakukan dengan mengidentifikasi jabatan-jabatan pelaksana dari berbagai kriteria jabatan, sebagai berikut:

- a. Jabatan Pelaksana yang digali dari berbagai SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. Jabatan Pelaksana yang diusulkan dalam Pengangkatan Calon PNS yang digali dari data usulan formasi PNS yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah;
- c. Jabatan lain yang tugas dan fungsinya sangat dibutuhkan oleh unit organisasi yang digali dari jabatan lain.

Bagian Kedua **Istilah Dalam Jabatan**

Pasal 6

Beberapa istilah yang sering digunakan dalam jabatan, antara lain:

- a. Elemen
Misalnya menghidupkan komputer, memutar, menggosok, menarik, mengangkat, menekan dan sebagainya
- b. Tugas
Sekumpulan aktivitas untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
Contoh: Mengetik surat.
- c. Pekerjaan
Sekumpulan uraian tugas
Contoh: Menyiapkan surat keluar, menyiapkan pengiriman surat keluar, memilah surat masuk, dan mendistribusikan surat masuk.
- d. Posisi
Sejumlah PNS yang melaksanakan tugas dalam suatu organisasi.
Contoh: Petugas Administrasi.
- e. Rumpun Jabatan
Sekelompok jabatan yang terdiri dari PNS yang memiliki karakteristik sama atau tugas sejenis yang ditetapkan Analis Jabatan.
Contoh: Petugas Administrasi dan Petugas Perpustakaan.
- f. Karier
Jenjang kedudukan, pekerjaan, dan jabatan yang dapat dilalui oleh PNS selama masa kerjanya.

Bagian Ketiga Rumpun Jabatan

Pasal 7

- (1) Rumpun Jabatan merupakan sekumpulan pekerjaan yang berisi tugas-tugas yang sama atau berhubungan satu dengan lain, dalam pelaksanaannya dituntut kecakapan, pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan yang sama pula meskipun tersebar di berbagai tempat;
- (2) Untuk memudahkan dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian, kelembagaan, dan ketatalaksanaan, maka jabatan-jabatan yang memiliki sifat karakteristik yang sama atau hampir sama dilakukan pengelompokan ke dalam rumpun jabatan;
- (3) Rumpun jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas 2 kategori yang bersifat fungsional dan bersifat manajerial;
- (4) Bersifat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah jabatan-jabatan pelaksana, keahlian dan keterampilan;
- (5) Bersifat manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah jabatan yang lebih menunjuk kepada tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara;
- (6) Rumpun Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi atas 4 (empat) rumpun jabatan, yaitu :
 - a. Rumpun jabatan administrasi; adalah kelompok jabatan yang melakukan kegiatan tata usaha;
 - b. Rumpun jabatan teknis; adalah kelompok jabatan yang melakukan cara membuat sesuatu atau melakukan sesuatu dengan cara dan metode tertentu;
 - c. Rumpun jabatan operasional; adalah kelompok jabatan yang melakukan proses kerja yang ditandai dengan mengoperasikan sesuatu peralatan/mesin;
 - d. Rumpun jabatan pelayanan; adalah kelompok jabatan yang membantu atau melayani dalam bentuk jasa, guna memenuhi kebutuhan internal maupun ekternal.

Bagian Keempat Kriteria Rumpun Jabatan

Pasal 8

Kriteria dalam merumpunkan jabatan yaitu:

- a. Terintegrasi dalam kelompok-kelompok kegiatan yang mempunyai saluran-saluran teratur dalam melaksanakan fungsi tiap satuan organisasi;
- b. Memiliki sifat tugas yang sama;
- c. Memiliki kemampuan dan atau persamaan objek pekerjaan;
- d. Memiliki kemiripan dan atau persamaan metoda pelaksanaan pekerjaan.

BAB IV KAMUS JABATAN PELAKSANA

Pasal 9

- (1) Kamus Nama-nama Jabatan Pelaksana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- (2) Iktisar Jabatan tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- (3) Dalam penentuan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam 2 (dua) jenjang yaitu tingkat terampil dan tingkat ahli.
- (4) Tingkat terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicirikan tidak memerlukan aspek metodologi, teknik analisis, teknik, dan prosedur kerja yang didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan dan/atau pelatihan teknik tertentu.
- (5) Tingkat Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicirikan mempunyai metodologi, teknik analisis, teknik dan prosedur kerja yang didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan dan/atau pelatihan teknis tertentu.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

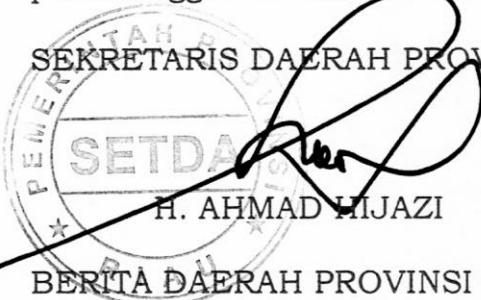
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 11 Oktober 2016



Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 11 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU



BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2016 NOMOR 46

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 46 TAHUN 2016
 TANGGAL : 11 OKTOBER 2016

KAMUS NAMA-NAMA JABATAN PELAKSANA

NO	NAMA JABATAN	RUMPUT
1	NOTULIS RAPAT	ADMINISTRASI
2	PENGADMINISTRASI AKADEMIK	ADMINISTRASI
3	PENGADMINISTRASI AKREDITASI LABORATORIUM KALIBRASI	ADMINISTRASI
4	PENGADMINISTRASI AKREDITASI LABORATORIUM PENGUJI	ADMINISTRASI
5	PENGADMINISTRASI AKREDITASI LINGKUNGAN	ADMINISTRASI
6	PENGADMINISTRASI AKREDITASI PRODUK, PELATIHAN DAN PERSONIL	ADMINISTRASI
7	PENGADMINISTRASI AKREDITASI SISTEM MANAJEMEN	ADMINISTRASI
8	PENGADMINISTRASI AKSES IPTEK	ADMINISTRASI
9	PENGADMINISTRASI AKSES PERMODALAN	ADMINISTRASI
10	PENGADMINISTRASI AKTA KELAHIRAN DAN KEMATIAN	ADMINISTRASI
11	PENGADMINISTRASI AKTA PERKAWINAN, PERCERAIAN, PENGAKUAN, PENGANGKATAN DAN PENGESAHAN ANAK (P4 DAN PA)	ADMINISTRASI
12	PENGADMINISTRASI ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI	ADMINISTRASI
13	PENGADMINISTRASI ANAK TERLANTAR	ADMINISTRASI
14	PENGADMINISTRASI ANALISIS DAN KEMITRAAN MEDIA	ADMINISTRASI
15	PENGADMINISTRASI ANALISIS KEBUTUHAN IMPOR	ADMINISTRASI
16	PENGADMINISTRASI ANGGARAN	ADMINISTRASI
17	PENGADMINISTRASI BATAS WILAYAH	ADMINISTRASI
18	PENGADMINISTRASI CONTOH UJI	ADMINISTRASI
19	PENGADMINISTRASI DATA PENYAJIAN DAN PUBLIKASI	ADMINISTRASI
20	PENGADMINISTRASI DATA PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN	ADMINISTRASI
21	PENGADMINISTRASI DATA PERAWATAN DAN PENGAWETAN	ADMINISTRASI
22	PENGADMINISTRASI EVALUASI DAN KERJASAMA PENELITIAN	ADMINISTRASI
23	PENGADMINISTRASI GUDANG FARMASI	ADMINISTRASI
24	PENGADMINISTRASI HUKUM	ADMINISTRASI
25	PENGADMINISTRASI IDENTIFIKASI DAN EVALUASI SENTRA PENGOLAHAN PRODUK	ADMINISTRASI
26	PENGADMINISTRASI IDENTIFIKASI PULAU-PULAU KECIL	ADMINISTRASI
27	PENGADMINISTRASI IMB GEDUNG/BANGUNAN	ADMINISTRASI
28	PENGADMINISTRASI IZIN KAWIN DAN IZIN CERAI	ADMINISTRASI
29	PENGADMINISTRASI IZIN USAHA	ADMINISTRASI
30	PENGADMINISTRASI IZIN USAHA PARIWISATA	ADMINISTRASI
31	PENGADMINISTRASI KARCIS	ADMINISTRASI
32	PENGADMINISTRASI KECELAKAAN LLAJ	ADMINISTRASI
33	PENGADMINISTRASI KEDATANGAN DAN PEMBERANGKATAN KAPAL	ADMINISTRASI
34	PENGADMINISTRASI KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI	ADMINISTRASI
35	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	ADMINISTRASI
36	PENGADMINISTRASI KEPENDIDIKAN	ADMINISTRASI
37	PENGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	ADMINISTRASI
38	PENGADMINISTRASI KERJASAMA BILATERAL DAN REGIONAL	ADMINISTRASI
39	PENGADMINISTRASI KERJASAMA PELATIHAN	ADMINISTRASI
40	PENGADMINISTRASI KESENIAN DAN BUDAYA DAERAH	ADMINISTRASI
41	PENGADMINISTRASI KESISWAAN	ADMINISTRASI
42	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	ADMINISTRASI
43	PENGADMINISTRASI KINERJA OPERASIONAL PELABUHAN SDP	ADMINISTRASI
44	PENGADMINISTRASI KOLEKSI TUMBUHAN	ADMINISTRASI
45	PENGADMINISTRASI KURIKULUM	ADMINISTRASI
46	PENGADMINISTRASI LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING	ADMINISTRASI
47	PENGADMINISTRASI LAYANAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN	ADMINISTRASI
48	PENGADMINISTRASI LAYANAN KESEJAHTERAAN MAHASISWA	ADMINISTRASI
49	PENGADMINISTRASI LLAJ	ADMINISTRASI
50	PENGADMINISTRASI LPSE	ADMINISTRASI
51	PENGADMINISTRASI MINAT, BAKAT, DAN PENALARAN MAHASISWA	ADMINISTRASI
52	PENGADMINISTRASI NOTA PERHITUNGAN PAJAK/RETRIBUSI DAERAH	ADMINISTRASI
53	PENGADMINISTRASI OTDA	ADMINISTRASI
54	PENGADMINISTRASI P2M	ADMINISTRASI
55	PENGADMINISTRASI PAJAK	ADMINISTRASI
56	PENGADMINISTRASI PANITIA ADHOC DAN ALAT KELENGKAPAN	ADMINISTRASI
57	PENGADMINISTRASI PDLN	ADMINISTRASI
58	PENGADMINISTRASI PELATIHAN	ADMINISTRASI
59	PENGADMINISTRASI PELAYANAN DINAS LUAR NEGERI (PDLN)	ADMINISTRASI
60	PENGADMINISTRASI PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR	ADMINISTRASI
61	PENGADMINISTRASI PEMERINTAHAN	ADMINISTRASI
62	PENGADMINISTRASI PENANGAN PERKARA	ADMINISTRASI
63	PENGADMINISTRASI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	ADMINISTRASI
64	PENGADMINISTRASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	ADMINISTRASI
65	PENGADMINISTRASI PENERIMAAN	ADMINISTRASI
66	PENGADMINISTRASI PENGAMANAN DAN PERLINDUNGAN AKSES PASAR	ADMINISTRASI
67	PENGADMINISTRASI PENGANGKATAN DAN PENGAKUAN ANAK	ADMINISTRASI
68	PENGADMINISTRASI PENGUJIAN	ADMINISTRASI
69	PENGADMINISTRASI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	ADMINISTRASI

NO	NAMA JABATAN	RUMPUT
70	PENGADMINISTRASI PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KOMPETENSI BAHASA	ADMINISTRASI
71	PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	ADMINISTRASI
72	PENGADMINISTRASI PERIJINAN	ADMINISTRASI
73	PENGADMINISTRASI PERKAWINAN/PENCATAT NIKAH	ADMINISTRASI
74	PENGADMINISTRASI PERPUSTAKAAN	ADMINISTRASI
75	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	ADMINISTRASI
76	PENGADMINISTRASI PERTANAHAN	ADMINISTRASI
77	PENGADMINISTRASI PERUMUSAN SNI	ADMINISTRASI
78	PENGADMINISTRASI PROGRAM DAN KERJASAMA	ADMINISTRASI
79	PENGADMINISTRASI PROGRAM DAN TATA OPERASIONAL PENELITIAN	ADMINISTRASI
80	PENGADMINISTRASI RAPAT	ADMINISTRASI
81	PENGADMINISTRASI REGISTRASI PERKARA	ADMINISTRASI
82	PENGADMINISTRASI REHABILITASI MASALAH SOSIAL	ADMINISTRASI
83	PENGADMINISTRASI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG CACAT	ADMINISTRASI
84	PENGADMINISTRASI REKAM MEDIS DAN INFORMASI	ADMINISTRASI
85	PENGADMINISTRASI RISALAH	ADMINISTRASI
86	PENGADMINISTRASI RTP	ADMINISTRASI
87	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	ADMINISTRASI
88	PENGADMINISTRASI SARANA PENGEMBANGAN USAHA	ADMINISTRASI
89	PENGADMINISTRASI SERTIFIKASI PVT	ADMINISTRASI
90	PENGADMINISTRASI SERTIFIKASI	ADMINISTRASI
91	PENGADMINISTRASI SISTEM INFORMASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	ADMINISTRASI
92	PENGADMINISTRASI TEKNIS PEMERIKSAAN DAN PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	ADMINISTRASI
93	PENGADMINISTRASI TPA	ADMINISTRASI
94	PENGADMINISTRASI TUGAS BELAJAR/IJIN BELAJAR	ADMINISTRASI
95	PENGADMINISTRASI UMUM	ADMINISTRASI
96	PENYUSUN ABSTRAKSI	ADMINISTRASI
97	PENYUSUN ABSTRAKSI HUKUM	ADMINISTRASI
98	PENYUSUN ADMINISTRASI AKADEMIK	ADMINISTRASI
99	PENYUSUN ADVOKASI, DAN KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI	ADMINISTRASI
100	PENYUSUN AKREDITASI LEMBAGA KEAGAMAAN	ADMINISTRASI
101	PENYUSUN ANALISIS DAMPAK KEPENDUDUKAN	ADMINISTRASI
102	PENYUSUN BAHAN AUDITOR/LABORATORIUM	ADMINISTRASI
103	PENYUSUN BAHAN BANTUAN HUKUM	ADMINISTRASI
104	PENYUSUN BAHAN BIMBINGAN TEKNIS	ADMINISTRASI
105	PENYUSUN BAHAN DATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	ADMINISTRASI
106	PENYUSUN BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI	ADMINISTRASI
107	PENYUSUN BAHAN KEBIJAKAN PENELITIAN	ADMINISTRASI
108	PENYUSUN BAHAN KEBIJAKAN PENGABDIAN MASYARAKAT	ADMINISTRASI
109	PENYUSUN BAHAN KEBIJAKAN PUBLIKASI ILMIAH	ADMINISTRASI
110	PENYUSUN BAHAN KERJASAMA PELATIHAN	ADMINISTRASI
111	PENYUSUN BAHAN KERJASAMA PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN	ADMINISTRASI
112	PENYUSUN BAHAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	ADMINISTRASI
113	PENYUSUN BAHAN KETAHANAN KELUARGA	ADMINISTRASI
114	PENYUSUN BAHAN MATERI BIMBINGAN	ADMINISTRASI
115	PENYUSUN BAHAN MATERI PENYULUHAN	ADMINISTRASI
116	PENYUSUN BAHAN MEKASINSME OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	ADMINISTRASI
117	PENYUSUN BAHAN PEMBERIAN BANTUAN TEKNIS	ADMINISTRASI
118	PENYUSUN BAHAN PEMBINAAN	ADMINISTRASI
119	PENYUSUN BAHAN PEMBINAAN FAHAM KEAGAMAAN	ADMINISTRASI
120	PENYUSUN BAHAN PEMBINAAN INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN	ADMINISTRASI
121	PENYUSUN BAHAN PEMBINAAN KESERTAAN KELUARGA BERENCANA	ADMINISTRASI
122	PENYUSUN BAHAN PEMBINAAN MINAT DAN BAKAT	ADMINISTRASI
123	PENYUSUN BAHAN PEMBINAAN PENGHULU/PENYULUH	ADMINISTRASI
124	PENYUSUN BAHAN PEMBINAAN PENTASHIHAN	ADMINISTRASI
125	PENYUSUN BAHAN PEMBINAAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA	ADMINISTRASI
126	PENYUSUN BAHAN PEMBINAAN PPAIW	ADMINISTRASI
127	PENYUSUN BAHAN PENCATATAN DAN PELAPORAN DATA KEPENDUDUKAN DAN KB	ADMINISTRASI
128	PENYUSUN BAHAN PENERAPAN STANDAR SUKARELA DAN PENANGANAN PENGADUAN	ADMINISTRASI
129	PENYUSUN BAHAN PENERAPAN STANDAR WAJIB DAN PENANGANAN PENGADUAN	ADMINISTRASI
130	PENYUSUN BAHAN PENGAWASAN PIHK/PIU	ADMINISTRASI
131	PENYUSUN BAHAN PENGAWASAN PRODUK HALAL	ADMINISTRASI
132	PENYUSUN BAHAN PENGEMBANGAN PROGRAM KEAGAMAAN	ADMINISTRASI
133	PENYUSUN BAHAN PENGEMBANGAN REGULASI	ADMINISTRASI
134	PENYUSUN BAHAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	ADMINISTRASI
135	PENYUSUN BAHAN PENYELENGGARAAN LITBANG	ADMINISTRASI
136	PENYUSUN BAHAN PENYULUHAN BAHASA DAN SASTRA	ADMINISTRASI
137	PENYUSUN BAHAN PENYULUHAN HUKUM	ADMINISTRASI
138	PENYUSUN BAHAN PNBP DAN BLU	ADMINISTRASI
139	PENYUSUN BAHAN PRASARANA PENERAPAN STANDAR	ADMINISTRASI
140	PENYUSUN BAHAN PROSES PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN KETENAGAAAN	ADMINISTRASI
141	PENYUSUN BAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SISTEM DAN METODA	ADMINISTRASI
142	PENYUSUN BAHAN SISTEM JAMINAN MUTU	ADMINISTRASI
143	PENYUSUN BERITA DAN PENDAPAT UMUM	ADMINISTRASI
144	PENYUSUN BIMBINGAN LANJUTAN, DAN EVALUASI PASCA DIKLAT PERTANIAN	ADMINISTRASI
145	PENYUSUN DAN PENGOLAH INSTRUMEN	ADMINISTRASI
146	PENYUSUN DATA PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN	ADMINISTRASI
147	PENYUSUN DATA PESERTA DIDIK	ADMINISTRASI

NO	NAMA JABATAN	RUMPUT
148	PENYUSUN DOKUMENTASI SEJARAH DAN NILAI BUDAYA	ADMINISTRASI
149	PENYUSUN EVALUASI DIKLAT PERTANIAN BAGI APARATUR DAN NON APARATUR	ADMINISTRASI
150	PENYUSUN INFORMASI ARKEOLOGI	ADMINISTRASI
151	PENYUSUN INFORMASI BAHASA DAN SASTRA	ADMINISTRASI
152	PENYUSUN INFORMASI DAN PUBLIKASI PENDIDIKAN TINGGI	ADMINISTRASI
153	PENYUSUN INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN	ADMINISTRASI
154	PENYUSUN KEBUTUHAN BARANG INVENTARIS	ADMINISTRASI
155	PENYUSUN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN JALAN	ADMINISTRASI
156	PENYUSUN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	ADMINISTRASI
157	PENYUSUN KERJASAMA PELATIHAN	ADMINISTRASI
158	PENYUSUN KERJASAMA PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN	ADMINISTRASI
159	PENYUSUN KERJASAMA TEKNIK LUAR NEGERI	ADMINISTRASI
160	PENYUSUN KINERJA JARINGAN TRANSPORTASI ASDP	ADMINISTRASI
161	PENYUSUN KURIKULUM, MODUL DAN BAHAN AJAR	ADMINISTRASI
162	PENYUSUN LAPORAN HASIL DIKLAT	ADMINISTRASI
163	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	ADMINISTRASI
164	PENYUSUN LAPORAN PENGENDALIAN BPS BPIH	ADMINISTRASI
165	PENYUSUN MEKASINSME OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	ADMINISTRASI
166	PENYUSUN MODUL PEMBELAJARAN BAHASA DAN SASTRA	ADMINISTRASI
167	PENYUSUN NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	ADMINISTRASI
168	PENYUSUN NSPK PENDIDIKAN	ADMINISTRASI
169	PENYUSUN NSPK SARANA PERKERETAAPIAN	ADMINISTRASI
170	PENYUSUN PEMBERIAN BANTUAN TEKNIS	ADMINISTRASI
171	PENYUSUN PEMBINAAN INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN	ADMINISTRASI
172	PENYUSUN PEMBINAAN KESERTAAN KELUARGA BERENCANA	ADMINISTRASI
173	PENYUSUN PENCATATAN DAN PELAPORAN DATA KEPENDUDUKAN DAN KB	ADMINISTRASI
174	PENYUSUN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	ADMINISTRASI
175	PENYUSUN PENERAPAN STANDAR SUKARELA DAN PENANGANAN PENGADUAN	ADMINISTRASI
176	PENYUSUN PENERAPAN STANDAR WAJIB DAN PENANGANAN PENGADUAN	ADMINISTRASI
177	PENYUSUN PENYULUH KELUARGA BERENCANA	ADMINISTRASI
178	PENYUSUN PENYULUHAN BAHASA DAN SASTRA	ADMINISTRASI
179	PENYUSUN PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	ADMINISTRASI
180	PENYUSUN PERENCANAAN PROGRAM DAN LAPORAN	ADMINISTRASI
181	PENYUSUN PERKEMBANGAN HARGA DAN PENGKAJIAN PASAR	ADMINISTRASI
182	PENYUSUN PESERTA DIDIK	ADMINISTRASI
183	PENYUSUN PETUNJUK PELAKSANAAN APBD SEKRETARIAT DAERAH	ADMINISTRASI
184	PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN	ADMINISTRASI
185	PENYUSUN PROGRAM DIPLOMASI BUDAYA	ADMINISTRASI
186	PENYUSUN PROGRAM FASILITASI PENDIDIKAN	ADMINISTRASI
187	PENYUSUN PROGRAM FASILITASI SUPERVISI DAN FASILITASI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN	ADMINISTRASI
188	PENYUSUN PROGRAM KELEMBAGAAN DAN KERJASAMA	ADMINISTRASI
189	PENYUSUN PROGRAM KESELAMATAN ANGKUTAN JALAN	ADMINISTRASI
190	PENYUSUN PROGRAM LAPORAN DAN BAHAN PERENCANAAN PENDIDIKAN	ADMINISTRASI
191	PENYUSUN PROGRAM MINAT, BAKAT, DAN PENALARAN MAHASISWA	ADMINISTRASI
192	PENYUSUN PROGRAM PEMBINAAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL	ADMINISTRASI
193	PENYUSUN PROGRAM PEMBINAAN KOMUNITAS ADAT	ADMINISTRASI
194	PENYUSUN PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN BUDAYA	ADMINISTRASI
195	PENYUSUN PROGRAM PENELITIAN DASAR DAN PENGEMBANGAN ILMU	ADMINISTRASI
196	PENYUSUN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	ADMINISTRASI
197	PENYUSUN PROGRAM PENGAWASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	ADMINISTRASI
198	PENYUSUN PROGRAM PENGAWASAN PEREKONOMIAN	ADMINISTRASI
199	PENYUSUN PROGRAM PENGAWASAN PRASARANA WILAYAH DAN LINGKUNGAN HIDUP	ADMINISTRASI
200	PENYUSUN PROGRAM PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN	ADMINISTRASI
201	PENYUSUN PROGRAM PENGEMBANGAN PAUDNI	ADMINISTRASI
202	PENYUSUN PROGRAM PENGEMBANGAN TENAGA TEKNIS DAN FUNGSIONAL NON PENDIDIK	ADMINISTRASI
203	PENYUSUN PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI KEPALA SEKOLAH	ADMINISTRASI
204	PENYUSUN PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	ADMINISTRASI
205	PENYUSUN PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI SDM KEBUDAYAAN	ADMINISTRASI
206	PENYUSUN PROGRAM PENINGKATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ADMINISTRASI
207	PENYUSUN PROGRAM PENULISAN SEJARAH DAN NILAI BUDAYA	ADMINISTRASI
208	PENYUSUN PROGRAM PENYELENGGARAAN DIKLAT	ADMINISTRASI
209	PENYUSUN PROGRAM PERENCANAAN DIKLAT	ADMINISTRASI
210	PENYUSUN PROGRAM PEROLEHAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	ADMINISTRASI
211	PENYUSUN PROGRAM PUBLIKASI ILMIAH	ADMINISTRASI
212	PENYUSUN PROGRAM SERTIFIKASI PENDIDIK	ADMINISTRASI
213	PENYUSUN PROGRAM, ANGGARAN, DAN LAPORAN	ADMINISTRASI
214	PENYUSUN PROMOSI DAN KERJASAMA	ADMINISTRASI
215	PENYUSUN RANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN	ADMINISTRASI
216	PENYUSUN REKAYASA LALU LINTAS	ADMINISTRASI
217	PENYUSUN RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM	ADMINISTRASI
218	PENYUSUN RENCANA BAHAN TEKNIS KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN	ADMINISTRASI
219	PENYUSUN RENCANA BAHAN TEKNIS PERBENIHAN	ADMINISTRASI
220	PENYUSUN RENCANA BAHAN TEKNIS PRASARANA DAN SARANA BUDIDAYA	ADMINISTRASI
221	PENYUSUN RENCANA BAHAN TEKNIS PRODUKSI	ADMINISTRASI
222	PENYUSUN RENCANA BIMBINGAN TEKNIS INDUSTRI	ADMINISTRASI

NO	NAMA JABATAN	RUMPUT
223	PENYUSUN RENCANA BIMBINGAN TEKNIS USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH	ADMINISTRASI
224	PENYUSUN RENCANA EVALUASI DAN PELAPORAN	ADMINISTRASI
225	PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN PRASARANA PULAU-PULAU KECIL	ADMINISTRASI
226	PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN	ADMINISTRASI
227	PENYUSUN RENCANA KERJASAMA	ADMINISTRASI
228	PENYUSUN RENCANA MANAJEMEN MUTU PASCA PANEN	ADMINISTRASI
229	PENYUSUN RENCANA MONEV DAN AKREDITASI	ADMINISTRASI
230	PENYUSUN RENCANA PEMANFAATAN JENIS IKAN	ADMINISTRASI
231	PENYUSUN RENCANA PENDIDIKAN DAN KERJASAMA	ADMINISTRASI
232	PENYUSUN RENCANA PENGADAAN SARANA DAN PRASARAN	ADMINISTRASI
233	PENYUSUN RENCANA PENGAMANAN DAN PERLINDUNGAN AKSES PASAR	ADMINISTRASI
234	PENYUSUN RENCANA PENGAWASAN	ADMINISTRASI
235	PENYUSUN RENCANA PENGEMBANGAN PRODUK SKALA BESAR	ADMINISTRASI
236	PENYUSUN RENCANA PENGEMBANGAN PRODUK SKALA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH	ADMINISTRASI
237	PENYUSUN RENCANA PENGENDALIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	ADMINISTRASI
238	PENYUSUN RENCANA PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT	ADMINISTRASI
239	PENYUSUN RENCANA PROMOSI	ADMINISTRASI
240	PENYUSUN RENCANA REHABILITASI	ADMINISTRASI
241	PENYUSUN RENCANA TATA RUANG	ADMINISTRASI
242	PENYUSUN TEKNIS IJIN OPERASI PELABUHAN SDP	ADMINISTRASI
243	PENYUSUN TEKNIS PELATIHAN FUNGSIONAL BAGI APARATUR DAN NON APARATUR	ADMINISTRASI
244	PENYUSUN TEKNIS USAHA BUDIDAYA	ADMINISTRASI
245	JURNALIS	OPERASIONAL
246	KEPALA KAMAR MESIN	OPERASIONAL
247	KEPALA STASIUN RADAR	OPERASIONAL
248	MUALIM KAPAL	OPERASIONAL
249	OPERATOR ALAT BERAT	OPERASIONAL
250	OPERATOR CONSOLE	OPERASIONAL
251	OPERATOR GLOBAL POSITIONING SYSTEM (GPS)	OPERASIONAL
252	OPERATOR JEMBATAN TIMBANG	OPERASIONAL
253	OPERATOR KILANG DAN UTILITAS	OPERASIONAL
254	OPERATOR KOMPUTER GRAFIS	OPERASIONAL
255	OPERATOR KOMUNIKASI	OPERASIONAL
256	OPERATOR MESIN	OPERASIONAL
257	OPERATOR PENGEMBANGAN SARANA IPTEK	OPERASIONAL
258	OPERATOR PERALATAN PENYENSORAN	OPERASIONAL
259	OPERATOR RADAR	OPERASIONAL
260	OPERATOR RADIO	OPERASIONAL
261	OPERATOR ROODSWEEPER	OPERASIONAL
262	OPERATOR SANDI DAN TELEKOMUNIKASI	OPERASIONAL
263	OPERATOR SPEEDBOAT	OPERASIONAL
264	OPERATOR TAYANGAN MULTIMEDIA DAN SMS	OPERASIONAL
265	OPERATOR TELEKOMUNIKASI	OPERASIONAL
266	OPERATOR TERMINAL	OPERASIONAL
267	OPERATOR TRANSMISI SANDI	OPERASIONAL
268	PETUGAS KEAMANAN	OPERASIONAL
269	PETUGAS PROTOKOL	OPERASIONAL
270	PETUGAS STANDARISASI DAN SERTIFIKASI	OPERASIONAL
271	AWAK KAPAL PENGAWAS	OPERASIONAL/ ABK
272	PENULIS STENO	OPERASIONAL/ JURNALIS
273	TENAGA PELIPUTAN	OPERASIONAL/ JURNALIS
274	ACCOUNT REPRESENTATIVE PELAYANAN TK I	OPERASIONAL/ PETUGAS
275	ACCOUNT REPRESENTATIVE PELAYANAN TK II	OPERASIONAL/ PETUGAS
276	ACCOUNT REPRESENTATIVE PENGAWASAN TK I	OPERASIONAL/ PETUGAS
277	ACCOUNT REPRESENTATIVE PENGAWASAN TK II	OPERASIONAL/ PETUGAS
278	AKUPUNTUR	OPERASIONAL/ PETUGAS
279	PENJAGA TAMAN MAKAM PAHLAWAN	OPERASIONAL/ PETUGAS
280	PEMULASARAAN JENAZAH	OPERASIONAL/ PETUGAS
281	FASILITATOR KELEMBAGAAN PEMASARAN	PELAYANAN
282	FASILITATOR KEMITRAAN	PELAYANAN
283	FASILITATOR KEWIRASAHAAN	PELAYANAN
284	FASILITATOR PERDAGANGAN	PELAYANAN
285	FASILITATOR PROMOSI	PELAYANAN
286	FASILITATOR SARANA PEMASARAN	PELAYANAN
287	JURU GAMBAR	PELAYANAN
288	JURU INFORMASI DAN KOMUNIKASI	PELAYANAN
289	JURU MESIN	PELAYANAN
290	JURU MINYAK	PELAYANAN
291	JURU MOTOR	PELAYANAN
292	JURU MUDI	PELAYANAN
293	JURU PELESTARI CAGAR BUDAYA	PELAYANAN
294	JURU PUNGUT KEBERSIHAN	PELAYANAN
295	JURU PUNGUT RETRIBUSI	PELAYANAN
296	JURU RAWAT JENAZAH	PELAYANAN
297	JURU SITA (KEKAYAAN NEGARA)	PELAYANAN
298	JURU SURVEY PERMUKIMAN PERUMAHAN	PELAYANAN
299	JURU UKUR	PELAYANAN

NO	NAMA JABATAN	RUMPUN
300	PEMANDU KERUKUNAN UMAT BERAGAMA	PELAYANAN
301	PEMANDU MUSEUM	PELAYANAN
302	PEMANDU WISATA	PELAYANAN
303	PENGEMUDI MOBIL DAMKAR	PELAYANAN
304	PENGEMUDI PENGAWAL TAHANAN	PELAYANAN
305	PENYIAP BAHAN INSTRUMENT EVALUASI DIRI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI	PELAYANAN
306	PENYIAP BAHAN PEMBINAAN LSP, LDP DAN TUK	PELAYANAN
307	PRAMU BAKTI	PELAYANAN
308	PRAMU BENIH IKAN	PELAYANAN
309	PRAMU KEBERSIHAN	PELAYANAN
310	PRAMU KELAS	PELAYANAN
311	PRAMU LABORATORIUM	PELAYANAN
312	PRAMU PEMAKAMAN	PELAYANAN
313	PRAMU TAMAN	PELAYANAN
314	SEKRETARIS	PELAYANAN
315	SOPIR/PENGEMUDI MOBIL	PELAYANAN
316	INSTRUKTUR BISNIS GARMEN	PELAYANAN / FASILITATOR
317	INSTRUKTUR KEPALA ANJING PELACAK	PELAYANAN / FASILITATOR
318	INSTRUKTUR MINYAK SAWIT LESTARI	PELAYANAN / FASILITATOR
319	INSTRUKTUR PESAWAT UAP (BOILER)	PELAYANAN / FASILITATOR
320	INSTRUKTUR SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA (SMK3)	PELAYANAN / FASILITATOR
321	INSTRUKTUR SISTEM PRODUKSI	PELAYANAN / FASILITATOR
322	INSTRUKTUR TEKSTIL	PELAYANAN / FASILITATOR
323	INSTRUKTUR VOKASIONAL	PELAYANAN / FASILITATOR
324	MEDIATOR PERTANAHAN	PELAYANAN / FASILITATOR
325	PELATIH ATLET DISABLE (NPC)	PELAYANAN / FASILITATOR
326	PELATIH SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS)	PELAYANAN / FASILITATOR
327	KONSELOR	PELAYANAN / KONSELOR
328	ASSESOR INDUSTRI	PELAYANAN / KONSELOR
329	ASSESOR K3	PELAYANAN / KONSELOR
330	PEMBINA KARAKTER	PELAYANAN / KONSELOR
331	BINATU RUMAH SAKIT	PELAYANAN / PELAYAN
332	AJUDAN	PELAYANAN / SEKRETARIS
333	ANALIS ADAPTASI DAMPAK PERUBAHAN IKLIM	TEKNIS
334	ANALIS ADMINISTRASI PERIZINAN PENELITIAN	TEKNIS
335	ANALIS ADVOKASI	TEKNIS
336	ANALIS ADVOKASI DAN KIE	TEKNIS
337	ANALIS AKREDITASI FASILITAS NUKLIR	TEKNIS
338	ANALIS AKREDITASI LEMBAGA DIKLAT	TEKNIS
339	ANALIS AKSES INDUSTRI	TEKNIS
340	ANALIS AKUNTABILITAS KINERJA APARATUR	TEKNIS
341	ANALIS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	TEKNIS
342	ANALIS ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI	TEKNIS
343	ANALIS ALAT PENANGKAP IKAN DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN	TEKNIS
344	ANALIS ALAT REPRODUKSI	TEKNIS
345	ANALIS ALIH TEKNOLOGI DAN INKUBASI	TEKNIS
346	ANALIS ALOKASI USAHA PENANGKAPAN IKAN	TEKNIS
347	ANALIS ANGKUTAN DARAT	TEKNIS
348	ANALIS ANGKUTAN LAUT	TEKNIS
349	ANALIS ANGKUTAN UDARA	TEKNIS
350	ANALIS APLIKASI DAN PENGELOLAAN DATA SISTEM KEUANGAN	TEKNIS
351	ANALIS APLIKASI MODEL PENGEMBANGAN INDUSTRI	TEKNIS
352	ANALIS APRESIASI FILM	TEKNIS
353	ANALIS APRESIASI KARYA SENI	TEKNIS
354	ANALIS ASET NEGARA	TEKNIS
355	ANALIS BADAN LAYANAN UMUM	TEKNIS
356	ANALIS BAGAN AKUN STANDAR	TEKNIS
357	ANALIS BAHAN DAN BARANG TEKNIK LOGAM	TEKNIS
358	ANALIS BAHAN KETERANGAN	TEKNIS
359	ANALIS BAHASA DAN SASTRA	TEKNIS
360	ANALIS BANGUNAN DAN PERUMAHAN	TEKNIS
361	ANALIS BARANG HASIL PENINDAKAN	TEKNIS
362	ANALIS BATAS WILAYAH	TEKNIS
363	ANALIS BEA DAN CUKAI	TEKNIS
364	ANALIS BENCANA	TEKNIS
365	ANALIS BENIH	TEKNIS
366	ANALIS BERITA	TEKNIS
367	ANALIS BERKAS SENGKETA	TEKNIS
368	ANALIS BIDANG PENGAWASAN	TEKNIS
369	ANALIS BIMBINGAN AKUNTANSI	TEKNIS
370	ANALIS BIMBINGAN PELAYANAN DAN KONSULTASI	TEKNIS
371	ANALIS BIMBINGAN PENDATAAN, PENILAIAN, DAN PENGENAAN	TEKNIS
372	ANALIS BIMBINGAN TEKNIS ANGGARAN	TEKNIS
373	ANALIS BIMBINGAN USAHA	TEKNIS
374	ANALIS BIMTEK DAN BANTEK	TEKNIS
375	ANALIS BINA KEHIDUPAN AGAMA	TEKNIS
376	ANALIS BIOFISIK	TEKNIS
377	ANALIS BUDAYA	TEKNIS

NO	NAMA JABATAN	RUMPUT
378	ANALIS BUDAYA KEAGAMAAN	TEKNIS
379	ANALIS BUDIDAYA PERIKANAN	TEKNIS
380	ANALIS CAGAR BUDAYA DAN KOLEKSI MUSEUM	TEKNIS
381	ANALIS CONTAINER SCANNER	TEKNIS
382	ANALIS CUACA	TEKNIS
383	ANALIS DAMPAK SOSIAL	TEKNIS
384	ANALIS DANA HAJI	TEKNIS
385	ANALIS DANA REHABILITASI FASILITAS PENDIDIKAN	TEKNIS
386	ANALIS DATA AKADEMIK	TEKNIS
387	ANALIS DATA BIDANG EVALUASI DAN KERJASAMA PENELITIAN	TEKNIS
388	ANALIS DATA BIDANG PROGRAM DAN TATA OPERASIONAL PENELITIAN	TEKNIS
389	ANALIS DATA BLU (PTAN)	TEKNIS
390	ANALIS DATA BUMN	TEKNIS
391	ANALIS DATA CAGAR BUDAYA DAN KOLEKSI MUSEUM	TEKNIS
392	ANALIS DATA DAN INFORMASI	TEKNIS
393	ANALIS DATA DAN INFORMASI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	TEKNIS
394	ANALIS DATA DAN KERJASAMA DIKLAT	TEKNIS
395	ANALIS DATA DAN KERJASAMA PEMASYARAKATAN	TEKNIS
396	ANALIS DATA EKONOMI MAKRO	TEKNIS
397	ANALIS DATA INTELIJEN	TEKNIS
398	ANALIS DATA KEBAHASAAN	TEKNIS
399	ANALIS DATA PENGADAAN TANAH	TEKNIS
400	ANALIS DATA SERTIFIKASI INDUSTRI ELEKTRONIKA	TEKNIS
401	ANALIS DATA SERTIFIKASI INDUSTRI KACA & KERAMIK	TEKNIS
402	ANALIS DATA SERTIFIKASI INDUSTRI KARET & PLASTIK	TEKNIS
403	ANALIS DATA SERTIFIKASI INDUSTRI KIMIA	TEKNIS
404	ANALIS DATA SERTIFIKASI INDUSTRI METALURGI	TEKNIS
405	ANALIS DATA SERTIFIKASI INDUSTRI PANGAN	TEKNIS
406	ANALIS DATA STANDARISASI/PENYELIA	TEKNIS
407	ANALIS DESA/KELURAHAN	TEKNIS
408	ANALIS DESAIN PAMERAN	TEKNIS
409	ANALIS DIALOG DAN WAWASAN MULTIKULTURAL	TEKNIS
410	ANALIS DIKLAT	TEKNIS
411	ANALIS DISTRIBUSI PITA CUKAI	TEKNIS
412	ANALIS DOKUMEN PERIZINAN PIHK	TEKNIS
413	ANALIS DOKUMENTASI CAGAR BUDAYA DAN MUSEUM	TEKNIS
414	ANALIS DOKUMENTASI KESENIAN DAN PERFILMAN	TEKNIS
415	ANALIS DUKUNGAN OPERASI NARKOTIKA	TEKNIS
416	ANALIS DUKUNGAN PENGAWASAN	TEKNIS
417	ANALIS DUKUNGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN	TEKNIS
418	ANALIS DUNIA USAHA	TEKNIS
419	ANALIS EKONOMI	TEKNIS
420	ANALIS EKONOMI KREATIF	TEKNIS
421	ANALIS EKSPLORASI CAGAR BUDAYA	TEKNIS
422	ANALIS EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL	TEKNIS
423	ANALIS EKSTENSIFIKASI	TEKNIS
424	ANALIS EVALUASI AUDIT	TEKNIS
425	ANALIS EVALUASI DAN PELAPORAN	TEKNIS
426	ANALIS FASILITASI HKI	TEKNIS
427	ANALIS FASILITASI KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN	TEKNIS
428	ANALIS FASILITASI LITBANG TEKNOLOGI INDUSTRI	TEKNIS
429	ANALIS FASILITASI PENINGKATAN KOMPETENSI	TEKNIS
430	ANALIS FISKAL	TEKNIS
431	ANALIS FORUM KERUKUNAN UMAT	TEKNIS
432	ANALIS FORUM KEWASPASPADEAN DINI MASYARAKAT (FKDM)	TEKNIS
433	ANALIS FUNGSI DAN PERAN BAHASA/SASTRA	TEKNIS
434	ANALIS GENETIK	TEKNIS
435	ANALIS GEREJA	TEKNIS
436	ANALIS GIZI	TEKNIS
437	ANALIS HAJI	TEKNIS
438	ANALIS HAKIM	TEKNIS
439	ANALIS HASIL HUTAN	TEKNIS
440	ANALIS HASIL MONITORING DAN EVALUASI	TEKNIS
441	ANALIS HASIL PENANGANAN PELANGGARAN	TEKNIS
442	ANALIS HASIL PENELITIAN	TEKNIS
443	ANALIS HASIL PENGAWASAN DAN DUMAS	TEKNIS
444	ANALIS HIGIENE INDUSTRI	TEKNIS
445	ANALIS HSE (KESEHATAN, KESELAMATAN DAN LINGKUNGAN) SERTA SECURITY KAPAL	TEKNIS
446	ANALIS HSE/ KESELAMATAN DAN LINGKUNGAN	TEKNIS
447	ANALIS HUBUNGAN ANTAR LEMLABA	TEKNIS
448	ANALIS HUBUNGAN ANTARLEMBABA KEPERCAYAAN	TEKNIS
449	ANALIS HUBUNGAN KEMASYARAKATAN	TEKNIS
450	ANALIS HUBUNGAN PERWAKILAN LUAR NEGERI	TEKNIS
451	ANALIS HUKUM	TEKNIS
452	ANALIS HUKUM PERTANAHAN	TEKNIS
453	ANALIS HUMAS DAN PROTOKOL	TEKNIS
454	ANALIS HUTAN DAN LAHAN (RHL)	TEKNIS

NO	NAMA JABATAN	RUMPUT
455	ANALIS IKLIM	TEKNIS
456	ANALIS IKLIM USAHA DAN KERJASAMA	TEKNIS
457	ANALIS INDUSTRI	TEKNIS
458	ANALIS INDUSTRI DAN PENCEGAHAN PENCEMARAN	TEKNIS
459	ANALIS INFORMASI	TEKNIS
460	ANALIS INFORMASI BLU	TEKNIS
461	ANALIS INFORMASI HASIL PERTANIAN	TEKNIS
462	ANALIS INFORMASI IPTEK NUKLIR	TEKNIS
463	ANALIS INFORMASI KEBUDAYAAN	TEKNIS
464	ANALIS INFORMASI PASAR HASIL PERTANIAN	TEKNIS
465	ANALIS INFORMASI PENDIDIKAN	TEKNIS
466	ANALIS INFORMASI PENGEMBANGAN PENDIDIK/TENAGA KEPENDIDIKAN	TEKNIS
467	ANALIS INFORMASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEBUDAYAAN	TEKNIS
468	ANALIS INFORMASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN	TEKNIS
469	ANALIS INFORMASI PERENCANAAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI	TEKNIS
470	ANALIS INFORMASI PUBLIK PELAYANAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN	TEKNIS
471	ANALIS INFORMASI SUMBER DAYA HUTAN	TEKNIS
472	ANALIS INFRASTRUKTUR STANDAR	TEKNIS
473	ANALIS INSPEKSI BAHAN DAN BARANG TEKNIK NON LOGAM	TEKNIS
474	ANALIS INSPEKSI BHN & BARTEK LOGAM	TEKNIS
475	ANALIS INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN	TEKNIS
476	ANALIS INSTRUMENTASI DAN KONTROL KAPAL	TEKNIS
477	ANALIS INTELIJEN	TEKNIS
478	ANALIS INVESTASI DAN PERMODALAN USAHA	TEKNIS
479	ANALIS INVESTASI PEMERINTAH	TEKNIS
480	ANALIS INVESTIGASI INTERNAL	TEKNIS
481	ANALIS IPTEK	TEKNIS
482	ANALIS JABATAN	TEKNIS
483	ANALIS JALAN	TEKNIS
484	ANALIS JASA KONSULTASI	TEKNIS
485	ANALIS KAPASITAS KEPALA MADRASAH	TEKNIS
486	ANALIS KAPASITAS PENDIDIK DAN/ATAU SANTRI	TEKNIS
487	ANALIS KAPASITAS PENGAWAS	TEKNIS
488	ANALIS KAPASITAS PENYULUH	TEKNIS
489	ANALIS KATA DAN ISTILAH	TEKNIS
490	ANALIS KAWASAN INDUSTRI	TEKNIS
491	ANALIS KAWASAN TRANSMIGRASI	TEKNIS
492	ANALIS KEAMANAN	TEKNIS
493	ANALIS KEBAKARAN	TEKNIS
494	ANALIS KEBERATAN DAN BANDING	TEKNIS
495	ANALIS KEBIJAKAN APBN	TEKNIS
496	ANALIS KEBIJAKAN AUDIT	TEKNIS
497	ANALIS KEBIJAKAN BMN	TEKNIS
498	ANALIS KEBIJAKAN CUKAI	TEKNIS
499	ANALIS KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBIAYAAN	TEKNIS
500	ANALIS KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS	TEKNIS
501	ANALIS KEBIJAKAN DANA ALOKASI UMUM	TEKNIS
502	ANALIS KEBIJAKAN DANA BAGI HASIL	TEKNIS
503	ANALIS KEBIJAKAN DANA PENDIDIKAN	TEKNIS
504	ANALIS KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO	TEKNIS
505	ANALIS KEBIJAKAN HIBAH DAERAH	TEKNIS
506	ANALIS KEBIJAKAN INDUSTRI	TEKNIS
507	ANALIS KEBIJAKAN INTELIJEN	TEKNIS
508	ANALIS KEBIJAKAN INVESTASI DAERAH	TEKNIS
509	ANALIS KEBIJAKAN KEBERATAN DAN BANDING	TEKNIS
510	ANALIS KEBIJAKAN KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN	TEKNIS
511	ANALIS KEBIJAKAN KEUANGAN INKLUSIF	TEKNIS
512	ANALIS KEBIJAKAN KEWAJIBAN KONTINJensi	TEKNIS
513	ANALIS KEBIJAKAN KLASIFIKASI BARANG	TEKNIS
514	ANALIS KEBIJAKAN KND	TEKNIS
515	ANALIS KEBIJAKAN KREDIT PROGRAM DAN INVESTASI LAINNYA	TEKNIS
516	ANALIS KEBIJAKAN LELANG	TEKNIS
517	ANALIS KEBIJAKAN PAJAK	TEKNIS
518	ANALIS KEBIJAKAN PDRD	TEKNIS
519	ANALIS KEBIJAKAN PELAKSANAAN ANGGARAN	TEKNIS
520	ANALIS KEBIJAKAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN	TEKNIS
521	ANALIS KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	TEKNIS
522	ANALIS KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PERUBAHAN IKLIM	TEKNIS
523	ANALIS KEBIJAKAN PENELITIAN	TEKNIS
524	ANALIS KEBIJAKAN PENERIMAAN	TEKNIS
525	ANALIS KEBIJAKAN PENERUSAN PINJAMAN	TEKNIS
526	ANALIS KEBIJAKAN PENGABDIAN MASYARAKAT	TEKNIS
527	ANALIS KEBIJAKAN PENGANGGARAN	TEKNIS
528	ANALIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLU	TEKNIS
529	ANALIS KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN	TEKNIS
530	ANALIS KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PASAR SBSN	TEKNIS
531	ANALIS KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PASAR SUN	TEKNIS
532	ANALIS KEBIJAKAN PENILAIAN	TEKNIS

NO	NAMA JABATAN	RUMPUT
533	ANALIS KEBIJAKAN PENINDAKAN	TEKNIS
534	ANALIS KEBIJAKAN PINJAMAN DAN HIBAH	TEKNIS
535	ANALIS KEBIJAKAN PIUTANG NEGARA	TEKNIS
536	ANALIS KEBIJAKAN PNBP LABA BUMN	TEKNIS
537	ANALIS KEBIJAKAN PNBP MINYAK DAN GAS BUMI	TEKNIS
538	ANALIS KEBIJAKAN PORTOFOLIO DAN RISIKO LIKUIDITAS	TEKNIS
539	ANALIS KEBIJAKAN PORTOFOLIO DAN RISIKO PEMBIAYAAN	TEKNIS
540	ANALIS KEBIJAKAN PROFESI LELANG	TEKNIS
541	ANALIS KEBIJAKAN PUBLIKASI ILMIAH	TEKNIS
542	ANALIS KEBIJAKAN REMUNERASI	TEKNIS
543	ANALIS KEBIJAKAN SARANA OPERASI	TEKNIS
544	ANALIS KEBUTUHAN DIKLAT KEPALA SEKOLAH	TEKNIS
545	ANALIS KEBUTUHAN LOGISTIK INTELIJEN	TEKNIS
546	ANALIS KEBUTUHAN PENDIDIK/TENAGA KEPENDIDIKAN	TEKNIS
547	ANALIS KEBUTUHAN PENINGKATAN KOMPETENSI BAHASA	TEKNIS
548	ANALIS KEBUTUHAN TENAGA KERJA INDUSTRI	TEKNIS
549	ANALIS KEGIATAN EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI MIGAS	TEKNIS
550	ANALIS KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK DAN GAS BUMI	TEKNIS
551	ANALIS KEHIDUPAN AGAMA	TEKNIS
552	ANALIS KELAIKAN TEKNIK DAN KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN	TEKNIS
553	ANALIS KELAIKAN TEKNIK MINYAK DAN GAS BUMI	TEKNIS
554	ANALIS KELAUTAN DAN PERIKANAN	TEKNIS
555	ANALIS KELEMBAGAAN	TEKNIS
556	ANALIS KELEMBAGAAN IPTEK	TEKNIS
557	ANALIS KELEMBAGAAN KURSUS DAN PELATIHAN	TEKNIS
558	ANALIS KELEMBAGAAN MASYARAKAT	TEKNIS
559	ANALIS KELEMBAGAAN PEMBINAAN PENDIDIKAN	TEKNIS
560	ANALIS KELEMBAGAAN USAHA	TEKNIS
561	ANALIS KELUARGA BERENCANA	TEKNIS
562	ANALIS KEMAHASISWAAN	TEKNIS
563	ANALIS KEMASYARAKATAN	TEKNIS
564	ANALIS KEMITRAAN	TEKNIS
565	ANALIS KENELAYANAN	TEKNIS
566	ANALIS KEOLAHRAGAAN	TEKNIS
567	ANALIS KEPALA MADRASAH	TEKNIS
568	ANALIS KEPEMUDAAN	TEKNIS
569	ANALIS KEPENDIDIKAN	TEKNIS
570	ANALIS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	TEKNIS
571	ANALIS KEPULAUAN	TEKNIS
572	ANALIS KERJASAMA	TEKNIS
573	ANALIS KERJASAMA APARAT PENEGAK HUKUM	TEKNIS
574	ANALIS KERJASAMA ATDIKBUD DAN SILN	TEKNIS
575	ANALIS KERJASAMA BILATERAL DAN REGIONAL	TEKNIS
576	ANALIS KERJASAMA DALAM NEGERI PENDIDIKAN TINGGI	TEKNIS
577	ANALIS KERJASAMA DAN PERMODALAN	TEKNIS
578	ANALIS KERJASAMA DIKLAT	TEKNIS
579	ANALIS KERJASAMA INDUSTRI	TEKNIS
580	ANALIS KERJASAMA INDUSTRI HIJAU	TEKNIS
581	ANALIS KERJASAMA KEBAHASAAN	TEKNIS
582	ANALIS KERJASAMA KEBUDAYAAN	TEKNIS
583	ANALIS KERJASAMA LEMBAGA KEAGAMAAN	TEKNIS
584	ANALIS KERJASAMA LINTAS SEKTOR	TEKNIS
585	ANALIS KERJASAMA LUAR NEGERI	TEKNIS
586	ANALIS KERJASAMA LUAR NEGERI PENDIDIKAN TINGGI	TEKNIS
587	ANALIS KERJASAMA PENDIDIKAN	TEKNIS
588	ANALIS KERJASAMA PENDIDIKAN TINGGI	TEKNIS
589	ANALIS KERJASAMA PRASARANA STANDARDISASI	TEKNIS
590	ANALIS KERJASAMA TEKNIK	TEKNIS
591	ANALIS KERJASAMA TEKNIS STANDARDISASI	TEKNIS
592	ANALIS KERUGIAN NEGARA	TEKNIS
593	ANALIS KESEHATAN	TEKNIS
594	ANALIS KESEHATAN IBU DAN ANAK	TEKNIS
595	ANALIS KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN	TEKNIS
596	ANALIS KESEHATAN KERJA	TEKNIS
597	ANALIS KESEJAHTERAAN KELUARGA	TEKNIS
598	ANALIS KESEJAHTERAAN RAKYAT	TEKNIS
599	ANALIS KESEJAHTERAAN SDM APARATUR	TEKNIS
600	ANALIS KESELAMATAN KERJA	TEKNIS
601	ANALIS KESELAMATAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI	TEKNIS
602	ANALIS KESENIAN DAN BUDAYA DAERAH	TEKNIS
603	ANALIS KESYAHBANDARAN	TEKNIS
604	ANALIS KETAHANAN BUDAYA	TEKNIS
605	ANALIS KETAHANAN EKONOMI	TEKNIS
606	ANALIS KETAHANAN ENERGI	TEKNIS
607	ANALIS KETAHANAN INDUSTRI	TEKNIS
608	ANALIS KETAHANAN KELUARGA	TEKNIS
609	ANALIS KETENAGALISTRIKAN	TEKNIS
610	ANALIS KEUANGAN	TEKNIS

NO	NAMA JABATAN	RUMPUT
611	ANALIS KEUANGAN DAN PASAR SBSN	TEKNIS
612	ANALIS KEUANGAN DAN PASAR SUN	TEKNIS
613	ANALIS KIMIA	TEKNIS
614	ANALIS KINERJA	TEKNIS
615	ANALIS KINERJA BUMN	TEKNIS
616	ANALIS KINERJA INDUSTRI	TEKNIS
617	ANALIS KINERJA INVESTASI, PENERUSAN PINJAMAN DAN KREDIT PROGRAM	TEKNIS
618	ANALIS KOLEKSI MUSEUM	TEKNIS
619	ANALIS KOMERSIALISASI HKI	TEKNIS
620	ANALIS KOMPETENSI	TEKNIS
621	ANALIS KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI KETENAGAAN	TEKNIS
622	ANALIS KOMPETENSI INTI INDUSTRI DAERAH	TEKNIS
623	ANALIS KOMPETENSI KELULUSAN	TEKNIS
624	ANALIS KOMPETENSI TENAGA PENGAJAR	TEKNIS
625	ANALIS KOMUNITAS ADAT	TEKNIS
626	ANALIS KONDISI KRISIS ENERGI	TEKNIS
627	ANALIS KONFLIK PERTANAHAN	TEKNIS
628	ANALIS KONSERVASI AIR DAN LH	TEKNIS
629	ANALIS KONSERVASI DAN REHABILITASI WILAYAH PESISIR	TEKNIS
630	ANALIS KONSERVASI ENERGI	TEKNIS
631	ANALIS KONSERVASI INDUSTRI	TEKNIS
632	ANALIS KONSERVASI KAWASAN	TEKNIS
633	ANALIS KONSERVASI PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	TEKNIS
634	ANALIS KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN REKENING PEMERINTAH	TEKNIS
635	ANALIS KONSOLIDASI REKENING PEMERINTAH	TEKNIS
636	ANALIS KONSOLIDASI TANAH	TEKNIS
637	ANALIS KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM	TEKNIS
638	ANALIS KONTEN MEDIA SOSIAL	TEKNIS
639	ANALIS KONVENSI INTERNASIONAL	TEKNIS
640	ANALIS KOPERASI	TEKNIS
641	ANALIS KREASI DAN PRODUKSI MUSIK	TEKNIS
642	ANALIS KUALIFIKASI DAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	TEKNIS
643	ANALIS KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN	TEKNIS
644	ANALIS KURSUS DAN KESETARAAN	TEKNIS
645	ANALIS KURSUS DAN PELATIHAN	TEKNIS
646	ANALIS LABORATORIUM	TEKNIS
647	ANALIS LABORATORIUM TUMBUHAN DAN SARANA	TEKNIS
648	ANALIS LAHAN PERTANIAN	TEKNIS
649	ANALIS LALU LINTAS	TEKNIS
650	ANALIS LANDREFORM	TEKNIS
651	ANALIS LAPORAN	TEKNIS
652	ANALIS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA	TEKNIS
653	ANALIS LAPORAN HASIL AUDIT	TEKNIS
654	ANALIS LAPORAN HASIL PENGAWASAN	TEKNIS
655	ANALIS LAPORAN INVESTASI, PENERUSAN PINJAMAN DAN KREDIT PROGRAM	TEKNIS
656	ANALIS LAPORAN KEUANGAN	TEKNIS
657	ANALIS LAPORAN KEUANGAN REKENING PEMERINTAH	TEKNIS
658	ANALIS LAPORAN KEUANGAN TRANSFER DAERAH	TEKNIS
659	ANALIS LAPORAN NERACA	TEKNIS
660	ANALIS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA	TEKNIS
661	ANALIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	TEKNIS
662	ANALIS LAYANAN INFORMASI PENERIMAAN NEGARA	TEKNIS
663	ANALIS LAYANAN UMUM	TEKNIS
664	ANALIS LEKSIKOGRAF/PEKAMUS	TEKNIS
665	ANALIS LEMBAGA DAKWAH/ KEAGAMAAN	TEKNIS
666	ANALIS LEMBAGA KEAGAMAAN	TEKNIS
667	ANALIS LINDUNGAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN	TEKNIS
668	ANALIS LINGKUNGAN HIDUP	TEKNIS
669	ANALIS LOGAM	TEKNIS
670	ANALIS MANAJEMEN BEASISWA	TEKNIS
671	ANALIS MANAJEMEN DANA RISET	TEKNIS
672	ANALIS MANAJEMEN LANTAS	TEKNIS
673	ANALIS MANAJEMEN LEMBAGA KEAGAMAAN	TEKNIS
674	ANALIS MANAJEMEN MONITORING & PENGENDALIAN KEKAMBUHAN DAN WAJIB LAPOR	TEKNIS
675	ANALIS MANAJEMEN PERKANTORAN	TEKNIS
676	ANALIS MANAJEMEN RISIKO	TEKNIS
677	ANALIS MANIFES	TEKNIS
678	ANALIS MASALAH SOSIAL	TEKNIS
679	ANALIS MATERI PENYULUHAN	TEKNIS
680	ANALIS MATERI SIDANG	TEKNIS
681	ANALIS MEDIA PEMBELAJARAN	TEKNIS
682	ANALIS MEKASINSME OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	TEKNIS
683	ANALIS METALOGRAFI	TEKNIS
684	ANALIS METODE PENYULUHAN	TEKNIS
685	ANALIS MITIGASI BENCANA	TEKNIS
686	ANALIS MODEL PENGEMBANGAN INDUSTRI	TEKNIS
687	ANALIS MONEV DANA REHABILITASI FASILITAS PENDIDIKAN	TEKNIS

NO	NAMA JABATAN	RUMPUT
688	ANALIS MONEV DANA RISET	TEKNIS
689	ANALIS MONEV FISKAL DAERAH	TEKNIS
690	ANALIS MONEV HASIL TES	TEKNIS
691	ANALIS MONEV KEBIJAKAN PDRD	TEKNIS
692	ANALIS MONEV PELAKSANAAN ANGGARAN	TEKNIS
693	ANALIS MONEV PENDANAAN DAERAH	TEKNIS
694	ANALIS MONEV PENYALURAN BEASISWA	TEKNIS
695	ANALIS MUTU AKADEMIK	TEKNIS
696	ANALIS MUTU HASIL PERIKANAN	TEKNIS
697	ANALIS MUTU PENDIDIKAN	TEKNIS
698	ANALIS MUTU PRODUK	TEKNIS
699	ANALIS MUTU SERTIFIKASI INDUSTRI	TEKNIS
700	ANALIS NARKOBA	TEKNIS
701	ANALIS NILAI BUDAYA	TEKNIS
702	ANALIS NOTIFIKASI	TEKNIS
703	ANALIS OBAT DAN MAKANAN	TEKNIS
704	ANALIS OBJEK WISATA	TEKNIS
705	ANALIS OPERASI INTELIJEN KEIMIGRASIAN	TEKNIS
706	ANALIS OPTIMALISASI KAS BLU	TEKNIS
707	ANALIS OPTIMALISASI KAS NEGARA	TEKNIS
708	ANALIS OPTIMASI, REHABILITASI DAN KONSERVASI LAHAN	TEKNIS
709	ANALIS ORGANISASI MASYARAKAT	TEKNIS
710	ANALIS ORGANISASI PERGURUAN TINGGI	TEKNIS
711	ANALIS PAJAK	TEKNIS
712	ANALIS PAJAK/RETRIBUSI	TEKNIS
713	ANALIS PAJAK/RETRIBUSI DAERAH	TEKNIS
714	ANALIS PAKAN TERNAK	TEKNIS
715	ANALIS PANGAN	TEKNIS
716	ANALIS PARIWISATA	TEKNIS
717	ANALIS PASAR	TEKNIS
718	ANALIS PASAR HASIL HUTAN	TEKNIS
719	ANALIS PELABUHAN	TEKNIS
720	ANALIS PELAKSANAAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN	TEKNIS
721	ANALIS PELAKSANAAN KEMITRAAN PENDIDIKAN	TEKNIS
722	ANALIS PELAKSANAAN KURIKULUM PENDIDIKAN	TEKNIS
723	ANALIS PELAKSANAAN PROGRAM INTERNALISASI NILAI DAN DIPLOMASI BUDAYA	TEKNIS
724	ANALIS PELAKSANAAN PROGRAM KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DAN TRADISI	TEKNIS
725	ANALIS PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	TEKNIS
726	ANALIS PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN TENAGA TEKNIS DAN FUNGSIONAL NON PENDIDIK	TEKNIS
727	ANALIS PELAKSANAAN PROGRAM SERTIFIKASI SDM KEBUDAYAAN	TEKNIS
728	ANALIS PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH	TEKNIS
729	ANALIS PELANGARAN HAM	TEKNIS
730	ANALIS PELANGGARAN DISIPLIN	TEKNIS
731	ANALIS PELANGGARAN KEPHP	TEKNIS
732	ANALIS PELAPORAN DAN TRANSAKSI KEUANGAN	TEKNIS
733	ANALIS PELAYANAN	TEKNIS
734	ANALIS PELAYANAN DAN BIMBINGAN USAHA PANAS BUMI	TEKNIS
735	ANALIS PELAYANAN DAN PENGAWASAN USAHA BIO ENERGI DAN ANEKA EBT	TEKNIS
736	ANALIS PELAYANAN SOSIAL	TEKNIS
737	ANALIS PELAYANAN USAHA MINERAL DAN BATUBARA	TEKNIS
738	ANALIS PELAYARAN	TEKNIS
739	ANALIS PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN	TEKNIS
740	ANALIS PELINDUNGAN HAK-HAK SIPIL DAN HAM	TEKNIS
741	ANALIS PEMANFAATAN CAGAR BUDAYA DAN KOLEKSI MUSEUM	TEKNIS
742	ANALIS PEMANFAATAN ENERGI	TEKNIS
743	ANALIS PEMANFAATAN RUANG	TEKNIS
744	ANALIS PEMANFAATAN TANAH	TEKNIS
745	ANALIS PEMANFAATAN TEKNOLOGI	TEKNIS
746	ANALIS PEMANTAUAN PERTANAHAN	TEKNIS
747	ANALIS PEMANTAUAN SISTEM KEUANGAN	TEKNIS
748	ANALIS PEMASARAN DAN KERJASAMA	TEKNIS
749	ANALIS PEMASARAN HASIL PERTANIAN	TEKNIS
750	ANALIS PEMBANGUNAN	TEKNIS
751	ANALIS PEMBANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN	TEKNIS
752	ANALIS PEMBAYARAN JAMINAN KESEHATAN	TEKNIS
753	ANALIS PEMBAYARAN PERHITUNGAN FIHAK KETIGA DAN PENYELESAIAN TGR	TEKNIS
754	ANALIS PEMBAYARAN PROGRAM PENSIUN	TEKNIS
755	ANALIS PEMBELAJARAN KURSUS DAN PELATIHAN	TEKNIS
756	ANALIS PEMBELAJARAN PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT	TEKNIS
757	ANALIS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN	TEKNIS
758	ANALIS PEMBERDAYAAN KEMAHASISWAAN	TEKNIS
759	ANALIS PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEPERCAYAAN TUHAN YANG MAHA ESA DAN TRADISI	TEKNIS
760	ANALIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	TEKNIS
761	ANALIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN	TEKNIS
762	ANALIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	TEKNIS

NO	NAMA JABATAN	RUMPUT
763	ANALIS PEMBIAYAAN DAN RISIKO FISKAL	TEKNIS
764	ANALIS PEMBIAYAAN PERTANIAN	TEKNIS
765	ANALIS PEMBINAAN BLU	TEKNIS
766	ANALIS PEMBINAAN KB	TEKNIS
767	ANALIS PEMBINAAN KELEMBAGAAN INVESTASI	TEKNIS
768	ANALIS PEMBINAAN PELAKSANAAN ANGGARAN	TEKNIS
769	ANALIS PEMBINAAN PENILAI	TEKNIS
770	ANALIS PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN	TEKNIS
771	ANALIS PEMBINAAN PROSES BISNIS DAN HUKUM	TEKNIS
772	ANALIS PEMBINAAN UMAT	TEKNIS
773	ANALIS PEMBUKAAN LAHAN	TEKNIS
774	ANALIS PEMELIHARAAN DAN PEMUGARAN Cagar Budaya dan Koleksi Museum	TEKNIS
775	ANALIS PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN	TEKNIS
776	ANALIS PEMERIKSAAN PAJAK	TEKNIS
777	ANALIS PEMERINTAH DAERAH	TEKNIS
778	ANALIS PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH	TEKNIS
779	ANALIS PEMETA DAN PENILAI TANAH	TEKNIS
780	ANALIS PEMILIHAN UMUM	TEKNIS
781	ANALIS PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN	TEKNIS
782	ANALIS PENAGIHAN	TEKNIS
783	ANALIS PENAGIHAN DAN PENGEMBALIAN	TEKNIS
784	ANALIS PENAGIHAN PAJAK	TEKNIS
785	ANALIS PENANAMAN MODAL	TEKNIS
786	ANALIS PENANGANAN OBJEK VITAL, TRANSPORTASI DAN VVIP	TEKNIS
787	ANALIS PENANGGULANGAN KRISIS	TEKNIS
788	ANALIS PENANGGULANGAN PENCEMARAN SUMBER DAYA LAUT	TEKNIS
789	ANALIS PENANGGULANGAN PENCEMARAN SUMBER DAYA PESISIR	TEKNIS
790	ANALIS PENANGKALAN	TEKNIS
791	ANALIS PENATAAN KAWASAN	TEKNIS
792	ANALIS PENATAGUNAAN TANAH DAN KAWASAN TERTENTU	TEKNIS
793	ANALIS PENCEMARAN LAUT	TEKNIS
794	ANALIS PENDAFTARAN HAK TANAH DAN GUNA RUANG	TEKNIS
795	ANALIS PENDAFTARAN KAPAL PERIKANAN	TEKNIS
796	ANALIS PENDAPATAN DAERAH	TEKNIS
797	ANALIS PENDAPATAN DAN EKONOMI MAKRO	TEKNIS
798	ANALIS PENDAPATAN NEGARA	TEKNIS
799	ANALIS PENDAYAGUNAAN LEMBAGA KEAGAMAAN	TEKNIS
800	ANALIS PENDIDIK DAN/ATAU SANTRI	TEKNIS
801	ANALIS PENDIDIKAN	TEKNIS
802	ANALIS PENDIDIKAN KHONGHUCU	TEKNIS
803	ANALIS PENEGAKAN INTEGRITAS SDM APARATUR	TEKNIS
804	ANALIS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	TEKNIS
805	ANALIS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BLU	TEKNIS
806	ANALIS PENERAPAN JASA INDUSTRI	TEKNIS
807	ANALIS PENERAPAN KEBIJAKAN TEKNOLOGI INDUSTRI	TEKNIS
808	ANALIS PENERBANGAN	TEKNIS
809	ANALIS PENERIMAAN DAN JAMINAN	TEKNIS
810	ANALIS PENERIMAAN DAN PENGEMBALIAN	TEKNIS
811	ANALIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)	TEKNIS
812	ANALIS PENERIMAAN NEGARA MINYAK DAN GAS BUMI	TEKNIS
813	ANALIS PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR	TEKNIS
814	ANALIS PENERTIBAN PEMANFAATAN RUANG	TEKNIS
815	ANALIS PENETAPAN CAGAR BUDAYA DAN KOLEKSI MUSEUM	TEKNIS
816	ANALIS PENETAPAN HAK ATAS TANAH	TEKNIS
817	ANALIS PENGADUAN MASYARAKAT	TEKNIS
818	ANALIS PENGADUAN PEMERINTAHAN	TEKNIS
819	ANALIS PENGAMANAN LINGKUNGAN	TEKNIS
820	ANALIS PENGANGGARAN INVESTASI, PENERUSAN PINJAMAN DAN KREDIT PROGRAM	TEKNIS
821	ANALIS PENGATURAN DAN PENGADAAN TANAH	TEKNIS
822	ANALIS PENGAWAKAN KAPAL PERIKANAN	TEKNIS
823	ANALIS PENGAWAS	TEKNIS
824	ANALIS PENGAWASAN EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI	TEKNIS
825	ANALIS PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH	TEKNIS
826	ANALIS PENGAWASAN MASYARAKAT	TEKNIS
827	ANALIS PENGAWASAN MUTU PRODUK	TEKNIS
828	ANALIS PENGELOLA DATA KOMODITAS PERKEBUNAN	TEKNIS
829	ANALIS PENGELOLAAN ASET SBSN	TEKNIS
830	ANALIS PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS	TEKNIS
831	ANALIS PENGELOLAAN DANA ALOKASI UMUM	TEKNIS
832	ANALIS PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL PAJAK & SDA	TEKNIS
833	ANALIS PENGELOLAAN DANA OTSUS DAN DANA TRANSFER LAINNYA	TEKNIS
834	ANALIS PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH	TEKNIS
835	ANALIS PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA	TEKNIS
836	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN	TEKNIS
837	ANALIS PENGELOLAAN PEMBIAYAAN	TEKNIS
838	ANALIS PENGELOLAAN PORTOFOLIO SUN	TEKNIS
839	ANALIS PENGELOLAAN REKENING PEMERINTAH	TEKNIS
840	ANALIS PENGELOLAAN SARANA PROGRAM	TEKNIS

NO	NAMA JABATAN	RUMPUT
841	ANALIS PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERBENDAHARAAN	TEKNIS
842	ANALIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN	TEKNIS
843	ANALIS PENGELOLAAN TRANSAKSI SBSN	TEKNIS
844	ANALIS PENGEMBANGAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN	TEKNIS
845	ANALIS PENGEMBANGAN CAGAR BUDAYA DAN KOLEKSI MUSEUM	TEKNIS
846	ANALIS PENGEMBANGAN DAN PENATAAN BATAS ANTAR NEGARA	TEKNIS
847	ANALIS PENGEMBANGAN EKONOMI PEDESAAN	TEKNIS
848	ANALIS PENGEMBANGAN ENERGI	TEKNIS
849	ANALIS PENGEMBANGAN HUTAN	TEKNIS
850	ANALIS PENGEMBANGAN IKM	TEKNIS
851	ANALIS PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR STANDAR	TEKNIS
852	ANALIS PENGEMBANGAN INVESTASI MINYAK DAN GAS BUMI	TEKNIS
853	ANALIS PENGEMBANGAN JASA SERTIFIKASI	TEKNIS
854	ANALIS PENGEMBANGAN JASA TEKNIK	TEKNIS
855	ANALIS PENGEMBANGAN KAPASITAS KEUANGAN DAERAH	TEKNIS
856	ANALIS PENGEMBANGAN KAPASITAS PERBENDAHARAAN	TEKNIS
857	ANALIS PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK/TENAGA KEPENDIDIKAN	TEKNIS
858	ANALIS PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN AIR	TEKNIS
859	ANALIS PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN	TEKNIS
860	ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI	TEKNIS
861	ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI INDUSTRI	TEKNIS
862	ANALIS PENGEMBANGAN MODEL EKONOMI MAKRO	TEKNIS
863	ANALIS PENGEMBANGAN MODEL TERAPI & REHABILITASI	TEKNIS
864	ANALIS PENGEMBANGAN PASAR	TEKNIS
865	ANALIS PENGEMBANGAN PAUDNI	TEKNIS
866	ANALIS PENGEMBANGAN PESERTA DIDIK	TEKNIS
867	ANALIS PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH	TEKNIS
868	ANALIS PENGEMBANGAN PROGRAM AKADEMIS	TEKNIS
869	ANALIS PENGEMBANGAN PROTOKOL MANAJEMEN KRISIS DAN SIMULASI PENANGANAN KRISIS	TEKNIS
870	ANALIS PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA	TEKNIS
871	ANALIS PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	TEKNIS
872	ANALIS PENGEMBANGAN SDM	TEKNIS
873	ANALIS PENGEMBANGAN SISTEM OPERASI MEDIS	TEKNIS
874	ANALIS PENGEMBANGAN SISTEM PEMBELAJARAN	TEKNIS
875	ANALIS PENGEMBANGAN SISTEM PERBENDAHARAAN	TEKNIS
876	ANALIS PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PAUDNI	TEKNIS
877	ANALIS PENGEMBANGAN TEKNOLOGI	TEKNIS
878	ANALIS PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MEDIS	TEKNIS
879	ANALIS PENGEMBANGAN USAHA AGRO INDUSTRI	TEKNIS
880	ANALIS PENGEMBANGAN USAHA HULU	TEKNIS
881	ANALIS PENGEMBANGAN WILAYAH	TEKNIS
882	ANALIS PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN PERTANAHAN	TEKNIS
883	ANALIS PENGENDALIAN LAHAN	TEKNIS
884	ANALIS PENGGUNAAN BARANG OPERASI MINYAK DAN GAS BUMI	TEKNIS
885	ANALIS PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	TEKNIS
886	ANALIS PENGGUNAAN TENAGA KERJA MINYAK DAN GAS BUMI	TEKNIS
887	ANALIS PENGKAJIAN JASA INDUSTRI	TEKNIS
888	ANALIS PENGKAJIAN KEBIJAKAN TEKNOLOGI INDUSTRI	TEKNIS
889	ANALIS PENGOLAH HASIL PERTANIAN	TEKNIS
890	ANALIS PENGUJIAN	TEKNIS
891	ANALIS PENGUJIAN KELAIKAN ALAT PENANGKAP IKAN	TEKNIS
892	ANALIS PENGUJIAN KELAIKAN KAPAL PERIKANAN	TEKNIS
893	ANALIS PENGUKURAN	TEKNIS
894	ANALIS PENGUKURAN DAN PEMETAAN	TEKNIS
895	ANALIS PENGUSAHAAN DAN PELAYANAN	TEKNIS
896	ANALIS PENILAIAN DAN AKREDITASI	TEKNIS
897	ANALIS PENILAIAN TANAH DAN KAWASAN	TEKNIS
898	ANALIS PENINDAKAN	TEKNIS
899	ANALIS PENINGKATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN	TEKNIS
900	ANALIS PENINGKATAN USAHA PERTANIAN DAN AGROBISNIS	TEKNIS
901	ANALIS PENJAMIN MUTU	TEKNIS
902	ANALIS PENTASHIH MUSHAF AL-QURAN	TEKNIS
903	ANALIS PENUNTUTAN	TEKNIS
904	ANALIS PENYAJIAN DATA SUMBER DAYA IKAN	TEKNIS
905	ANALIS PENYAKIT MENULAR	TEKNIS
906	ANALIS PENYEDIAAN ENERGI	TEKNIS
907	ANALIS PENYELESAIAN LHP/TP/TGR	TEKNIS
908	ANALIS PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH	TEKNIS
909	ANALIS PENYIAPAN PENERAPAN STANDAR	TEKNIS
910	ANALIS PENYIDIKAN	TEKNIS
911	ANALIS PENYULUH KELUARGA BERENCANA	TEKNIS
912	ANALIS PENYULUHAN DAN LAYANAN INFORMASI	TEKNIS
913	ANALIS PENYULUHAN SYARIAH	TEKNIS
914	ANALIS PENYUSUN PENYIAPAN LAHAN	TEKNIS
915	ANALIS PERATURAN ADMINISTRASI	TEKNIS
916	ANALIS PERATURAN BLU	TEKNIS
917	ANALIS PERATURAN HKI	TEKNIS

NO	NAMA JABATAN	RUMPUT
918	ANALIS PERATURAN IKLIM INDUSTRI	TEKNIS
919	ANALIS PERATURAN IKLIM USAHA	TEKNIS
920	ANALIS PERATURAN INVESTASI	TEKNIS
921	ANALIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	TEKNIS
922	ANALIS PERATURAN STANDARDISASI TEKNOLOGI DAN HKI	TEKNIS
923	ANALIS PERBANKAN	TEKNIS
924	ANALIS PERBENDAHARAAN	TEKNIS
925	ANALIS PERDAGANGAN	TEKNIS
926	ANALIS PEREKONOMIAN	TEKNIS
927	ANALIS PERENCANAAN	TEKNIS
928	ANALIS PERENCANAAN ANGGARAN	TEKNIS
929	ANALIS PERENCANAAN BISNIS	TEKNIS
930	ANALIS PERENCANAAN DAN KERJASAMA	TEKNIS
931	ANALIS PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN	TEKNIS
932	ANALIS PERENCANAAN DUKUNGAN PEMERINTAH	TEKNIS
933	ANALIS PERENCANAAN PENGANGGARAN	TEKNIS
934	ANALIS PERENCANAAN STRATEGIS	TEKNIS
935	ANALIS PERENCANAAN WILAYAH PERUMAHAN	TEKNIS
936	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	TEKNIS
937	ANALIS PERFILMAN	TEKNIS
938	ANALIS PERGURUAN TINGGI	TEKNIS
939	ANALIS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI	TEKNIS
940	ANALIS PERIJINAN	TEKNIS
941	ANALIS PERIJINAN DAN PENGAMANAN CAGAR BUDAYA DAN KOLEKSI MUSEUM	TEKNIS
942	ANALIS PERIKANAN BUDIDAYA	TEKNIS
943	ANALIS PERJANJIAN PENERUSAN PINJAMAN	TEKNIS
944	ANALIS PERKARA TANAH DAN RUANG	TEKNIS
945	ANALIS PERKEBUNRAYAAN	TEKNIS
946	ANALIS PERLENGKAPAN INTELIJEN	TEKNIS
947	ANALIS PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN IKAN	TEKNIS
948	ANALIS PERLINDUNGAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	TEKNIS
949	ANALIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN	TEKNIS
950	ANALIS PERLINDUNGAN SUMBER DAYA	TEKNIS
951	ANALIS PERMASALAHAN (KASUS-KASUS PILKADES)	TEKNIS
952	ANALIS PERMASALAHAN HUKUM	TEKNIS
953	ANALIS PERMOHONAN HAK TANAH DAN PENDAFTARAN TANAH	TEKNIS
954	ANALIS PERSANDIAN	TEKNIS
955	ANALIS PERTAHANAN DAN KEAMANAN	TEKNIS
956	ANALIS PERTAMBANGAN	TEKNIS
957	ANALIS PERUMAHAN	TEKNIS
958	ANALIS PERUMUSAN SNI	TEKNIS
959	ANALIS PERUNDANG-UNDANGAN	TEKNIS
960	ANALIS PESERTA DIDIK	TEKNIS
961	ANALIS PESPARAWI/LPPN	TEKNIS
962	ANALIS PESTISIDA	TEKNIS
963	ANALIS PETA WILAYAH	TEKNIS
964	ANALIS PIHK/PIU	TEKNIS
965	ANALIS PINJAMAN DAN OBLIGASI	TEKNIS
966	ANALIS PNBP KEMENTERIAN/LEMBAGA	TEKNIS
967	ANALIS POLA KONSUMSI PANGAN MASYARAKAT	TEKNIS
968	ANALIS POLITIK DALAM NEGERI	TEKNIS
969	ANALIS POLITIK HUKUM DAN KEAMANAN	TEKNIS
970	ANALIS POLITIK LUAR NEGERI	TEKNIS
971	ANALIS POTENSI BUDIDAYA ANEKA KACANG DAN UMBI	TEKNIS
972	ANALIS POTENSI BUDIDAYA SEREALIA	TEKNIS
973	ANALIS POTENSI KELAUTAN	TEKNIS
974	ANALIS POTENSI MASJID	TEKNIS
975	ANALIS POTENSI PERBENIHAN	TEKNIS
976	ANALIS POTENSI SISWA/SANTRI/MAHASISWA	TEKNIS
977	ANALIS POTENSI SUMBER AIR PERMUKAAN	TEKNIS
978	ANALIS POTENSI SUMBER AIR TANAH	TEKNIS
979	ANALIS POTENSI UMAT	TEKNIS
980	ANALIS POTENSI, KEPATUHAN, DAN PENERIMAAN	TEKNIS
981	ANALIS PPAT	TEKNIS
982	ANALIS PRASARANA DAN ENERGI	TEKNIS
983	ANALIS PRASARANA KOTA DAN PEDESAAN	TEKNIS
984	ANALIS PRASARANA PENDIDIKAN	TEKNIS
985	ANALIS PREKURSOR	TEKNIS
986	ANALIS PRODUK HUKUM	TEKNIS
987	ANALIS PROFESI DOSEN	TEKNIS
988	ANALIS PROGRAM	TEKNIS
989	ANALIS PROGRAM BEASISWA	TEKNIS
990	ANALIS PROGRAM DAN PORTOFOLIO	TEKNIS
991	ANALIS PROGRAM DIKLAT	TEKNIS
992	ANALIS PROGRAM ENERGI BARU TERBARUKAN	TEKNIS
993	ANALIS PROGRAM KERJASAMA LEMBAGA MASYARAKAT	TEKNIS
994	ANALIS PROGRAM KETENAGALISTRIKAN	TEKNIS

NO	NAMA JABATAN	RUMPUT
995	ANALIS PROGRAM MINERAL DAN BATUBARA	TEKNIS
996	ANALIS PROGRAM PEMBANGUNAN	TEKNIS
997	ANALIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN MASALAH SOSIAL	TEKNIS
998	ANALIS PROGRAM PEMBERDAYAAN UMAT	TEKNIS
999	ANALIS PROGRAM PENYULUHAN	TEKNIS
1000	ANALIS PROGRAM STUDI PERGURUAN TINGGI	TEKNIS
1001	ANALIS PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN PERTANIAN	TEKNIS
1002	ANALIS PROSES AKREDITASI LABORATORIUM KALIBRASI	TEKNIS
1003	ANALIS PROSES AKREDITASI LABORATORIUM PENGUJI	TEKNIS
1004	ANALIS PROSES AKREDITASI LS PRODUK, LS PERSONEL, LS HALAL, LS PANGAN ORGANIK	TEKNIS
1005	ANALIS PROSES AKREDITASI LSSM LS SHACCP/LS 22000 LS QS9000	TEKNIS
1006	ANALIS PROSES UJI BANDING	TEKNIS
1007	ANALIS PROSES UJI KOMPARASI	TEKNIS
1008	ANALIS PUBLIKASI	TEKNIS
1009	ANALIS PUPUK ANORGANIK	TEKNIS
1010	ANALIS PUPUK ORGANIK DAN PEMBENAH TANAH	TEKNIS
1011	ANALIS PUSTAKA DAN MUSEUM KEAGAMAAN	TEKNIS
1012	ANALIS RADIASI	TEKNIS
1013	ANALIS RAHASIA NEGARA	TEKNIS
1014	ANALIS RANCANG BANGUN ALAT PENANGKAP IKAN	TEKNIS
1015	ANALIS RANCANG BANGUN KAPAL PERIKANAN	TEKNIS
1016	ANALIS RANCANGAN NASKAH PERJANJIAN	TEKNIS
1017	ANALIS REHABILITASI DAN KONSERVASI	TEKNIS
1018	ANALIS REHABILITASI MASALAH SOSIAL	TEKNIS
1019	ANALIS REKLAMASI	TEKNIS
1020	ANALIS REKRUTMEN HAKIM	TEKNIS
1021	ANALIS RENCANA INDUK JARINGAN TRANSPORTASI DARAT	TEKNIS
1022	ANALIS RENCANA PRODUksi DAN PEMANFAATAN MINERAL DAN BATUBARA	TEKNIS
1023	ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	TEKNIS
1024	ANALIS RENCANA UMUM ENERGI	TEKNIS
1025	ANALIS RENCANA UMUM PEMADUAN MODA TRANSPORTASI DARAT	TEKNIS
1026	ANALIS RESOLUSI BADAN NON PBB	TEKNIS
1027	ANALIS RESOSIALISASI DAN REHABILITASI	TEKNIS
1028	ANALIS REVANSI DAN PRODUKTIVITAS IPTEK	TEKNIS
1029	ANALIS RISET KEMASAN	TEKNIS
1030	ANALIS RISIKO INVESTASI, PENERUSAN PINJAMAN DAN KREDIT PROGRAM	TEKNIS
1031	ANALIS RISIKO KEUANGAN NEGARA	TEKNIS
1032	ANALIS SAR	TEKNIS
1033	ANALIS SARANA PAUD	TEKNIS
1034	ANALIS SARANA PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT	TEKNIS
1035	ANALIS SARANA PRASARANA IBADAH	TEKNIS
1036	ANALIS SARANA PROGRAM KELUARGA BERENCANA	TEKNIS
1037	ANALIS SARANA RISET	TEKNIS
1038	ANALIS SATUAN PENGAWAS INTERNAL	TEKNIS
1039	ANALIS SATUAN PENGAWAS MUTU	TEKNIS
1040	ANALIS SDM APARATUR	TEKNIS
1041	ANALIS SELEKSI DAN PENEMPATAN BEASISWA	TEKNIS
1042	ANALIS SENGKETA DAN KONFLIK TANAH DAN RUANG	TEKNIS
1043	ANALIS SENGKETA PERADILAN	TEKNIS
1044	ANALIS SENGKETA PERTANAHAN	TEKNIS
1045	ANALIS SERTIFIKASI FASILITAS NUKLIR	TEKNIS
1046	ANALIS SERTIFIKASI MUTU INDUSTRI	TEKNIS
1047	ANALIS SETELMEN TRANSAKSI	TEKNIS
1048	ANALIS SISTEM AKUNTANSI BENDAHARA UMUM NEGARA DAN UNIT KHUSUS	TEKNIS
1049	ANALIS SISTEM AKUNTANSI INSTANSI	TEKNIS
1050	ANALIS SISTEM DAN JARINGAN PERTANAHAN	TEKNIS
1051	ANALIS SISTEM DATA ARKEOLOGI	TEKNIS
1052	ANALIS SISTEM INFORMASI	TEKNIS
1053	ANALIS SISTEM INFORMASI DAN DISEMINASI HUKUM	TEKNIS
1054	ANALIS SISTEM INFORMASI DAN JARINGAN PENDIDIKAN	TEKNIS
1055	ANALIS SISTEM INFORMASI PELAKSANAAN ANGGARAN	TEKNIS
1056	ANALIS SISTEM INFORMASI PERBENDAHARAAN	TEKNIS
1057	ANALIS SISTEM INFORMASI PERTANAHAN	TEKNIS
1058	ANALIS SISTEM INFORMASI PUSDATIN DAN LPPB	TEKNIS
1059	ANALIS SISTEM MUTU DAN LINGKUNGAN	TEKNIS
1060	ANALIS SISTEM PEMADUAN MODA TRANSPORTASI PERKOTAAN	TEKNIS
1061	ANALIS SOSIAL BUDAYA	TEKNIS
1062	ANALIS STANDAR BIAYA	TEKNIS
1063	ANALIS STANDAR MUTU BAHAN DAN PERALATAN	TEKNIS
1064	ANALIS STANDARD HARGA	TEKNIS
1065	ANALIS STANDARDISASI BUDIDAYA	TEKNIS
1066	ANALIS STANDARDISASI DAN TEKNOLOGI	TEKNIS
1067	ANALIS STANDARDISASI INDUSTRI	TEKNIS
1068	ANALIS STANDARDISASI KETENAGALISTRIKAN	TEKNIS
1069	ANALIS STANDARDISASI MINERAL DAN BATUBARA	TEKNIS
1070	ANALIS STANDARDISASI MINYAK DAN GAS BUMI	TEKNIS

NO	NAMA JABATAN	RUMPUT
1071	ANALIS STATISTIK	TEKNIS
1072	ANALIS SUMBER DAYA IPTEK	TEKNIS
1073	ANALIS SUMBER SEJARAH	TEKNIS
1074	ANALIS SURVEI DAN PEMETAAN TEMATIK	TEKNIS
1075	ANALIS TAMAN	TEKNIS
1076	ANALIS TANAH PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN	TEKNIS
1077	ANALIS TANAMAN HIAS/ TANAMAN KOLEKSI	TEKNIS
1078	ANALIS TATA KELOLA SUMBER DAYA IKAN	TEKNIS
1079	ANALIS TATA LAKSANA	TEKNIS
1080	ANALIS TATA PAMERAN	TEKNIS
1081	ANALIS TATA PRAJA	TEKNIS
1082	ANALIS TATA RUANG	TEKNIS
1083	ANALIS TATA USAHA DRN	TEKNIS
1084	ANALIS TEKNIK PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	TEKNIS
1085	ANALIS TEKNIK SURVEY MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS	TEKNIS
1086	ANALIS TEKNIK SURVEY PEMADUAN MODA TRANSPORTASI DARAT	TEKNIS
1087	ANALIS TEKNIS SURVEY PENANGGANAN DAMPAK TRANSPORTASI DARAT	TEKNIS
1088	ANALIS TEKNOLOGI INDUSTRI	TEKNIS
1089	ANALIS TEKNOLOGI PEMBELAJARAN	TEKNIS
1090	ANALIS TENAGA KEPENDIDIKAN	TEKNIS
1091	ANALIS TENAGA KERJA	TEKNIS
1092	ANALIS TINDAK LANJUT LHP	TEKNIS
1093	ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN	TEKNIS
1094	ANALIS TULISAN FIKSI	TEKNIS
1095	ANALIS TUNTUTAN GANTI RUGI	TEKNIS
1096	ANALIS UJI KONSEKUENSI	TEKNIS
1097	ANALIS UPACARA ADAT	TEKNIS
1098	ANALIS USAHA JASA MINERAL DAN BATUBARA	TEKNIS
1099	ANALIS USAHA PENUNJANG MINYAK DAN GAS BUMI	TEKNIS
1100	ANALIS WAKAF	TEKNIS
1101	ANALIS WARISAN BUDAYA	TEKNIS
1102	ANALIS WAWASAN KEBANGSAAN	TEKNIS
1103	ANALIS WILAYAH KEPROSPEKAN	TEKNIS
1104	ANALIS WILAYAH KERJA	TEKNIS
1105	ANALIS WILAYAH PERTAMBANGAN	TEKNIS
1106	ASISTEN CLIENT COORDINATOR	TEKNIS
1107	ASISTEN PELELANG	TEKNIS
1108	ASISTEN PENGELOLA TEMPAT TAHANAN	TEKNIS
1109	BENDAHARA	TEKNIS
1110	KOORDINATOR	TEKNIS
1111	KOORDINATOR KEBUN PERCOBAAN	TEKNIS
1112	KOORDINATOR LABORATORIUM DISEMINASI	TEKNIS
1113	KOORDINATOR PENGEMBANGAN SISTEM UJIAN, TES DAN PENGUKURAN	TEKNIS
1114	KOORDINATOR PENGOLAHAN HASIL UJIAN	TEKNIS
1115	KOORDINATOR PENYIAPAN DAN PENGGANDAAN BAHAN UJIAN	TEKNIS
1116	KOORDINATOR PENYIAPAN NASKAH	TEKNIS
1117	KOORDINATOR PERGUDANGAN	TEKNIS
1118	KOORDINATOR PRODUksi DAN PENERBITAN	TEKNIS
1119	KOORDINATOR SISTEM INFORMASI DISTRIBUSI	TEKNIS
1120	KURATOR KOLEKSI MUSEUM	TEKNIS
1121	KURATOR SENI	TEKNIS
1122	PEMELIHARA BANGUNAN	TEKNIS
1123	PEMELIHARA JALAN	TEKNIS
1124	PEMELIHARA KEBUN	TEKNIS
1125	PEMELIHARA KENDARAAN	TEKNIS
1126	PEMELIHARA KOLEKSI DAN MUSEUM	TEKNIS
1127	PEMELIHARA PENERANGAN JALAN	TEKNIS
1128	PEMELIHARA PERALATAN	TEKNIS
1129	PEMELIHARA SARANA DAN PRASARANA	TEKNIS
1130	PEMELIHARA SATWA	TEKNIS
1131	PEMERIKSA ALAT MESIN PERTANIAN	TEKNIS
1132	PEMERIKSA ANGGARAN	TEKNIS
1133	PEMERIKSA BAHASA/SASTRA	TEKNIS
1134	PEMERIKSA CUACA	TEKNIS
1135	PEMERIKSA DATA PROFESI KEUANGAN	TEKNIS
1136	PEMERIKSA GUDANG SENJATA	TEKNIS
1137	PEMERIKSA INDUSTRI	TEKNIS
1138	PEMERIKSA INTELIJEN	TEKNIS
1139	PEMERIKSA IRIGASI	TEKNIS
1140	PEMERIKSA JALAN DAN JEMBATAN	TEKNIS
1141	PEMERIKSA KEKAYAAN NEGARA	TEKNIS
1142	PEMERIKSA KELISTRIKAN	TEKNIS
1143	PEMERIKSA KEPARIWISATAAN	TEKNIS
1144	PEMERIKSA KEPENDUDUKAN	TEKNIS
1145	PEMERIKSA KESELAMATAN DARAT (JALAN)	TEKNIS
1146	PEMERIKSA KESELAMATAN PELAYARAN	TEKNIS
1147	PEMERIKSA KESELAMATAN UDARA	TEKNIS
1148	PEMERIKSA KETRANSMIGRASIAN	TEKNIS

NO	NAMA JABATAN	RUMPUT
1149	PEMERIKSA LALU LINTAS DARAT	TEKNIS
1150	PEMERIKSA LALU LINTAS LAUT	TEKNIS
1151	PEMERIKSA LALU LINTAS UDARA	TEKNIS
1152	PEMERIKSA PELABUHAN	TEKNIS
1153	PEMERIKSA PELAPORAN DAN TRANSAKSI KEUANGAN	TEKNIS
1154	PEMERIKSA PELAYANAN KB	TEKNIS
1155	PEMERIKSA PEMBANGUNAN DAERAH TERPENCIL	TEKNIS
1156	PEMERIKSA PENANAMAN MODAL	TEKNIS
1157	PEMERIKSA PENELITIAN DAN HKI	TEKNIS
1158	PEMERIKSA PENGADILAN	TEKNIS
1159	PEMERIKSA PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN DAN AIR IRIGASI	TEKNIS
1160	PEMERIKSA PEREMPUAN DAN ANAK	TEKNIS
1161	PEMERIKSA PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN	TEKNIS
1162	PEMERIKSA PERTANAHAN	TEKNIS
1163	PEMERIKSA PERUSAHAAN NEGARA	TEKNIS
1164	PEMERIKSA PUPUK DAN PESTISIDA	TEKNIS
1165	PEMERIKSA SANITASI	TEKNIS
1166	PEMERIKSA SEKTOR SUMBER DAYA AIR	TEKNIS
1167	PEMERIKSA TEKNOLOGI INFORMASI	TEKNIS
1168	PEMERIKSA TERMINAL	TEKNIS
1169	PEMERIKSA TRANSAKSI KEUANGAN	TEKNIS
1170	PEMROSES DOKUMEN ATDIKBUD DAN SEKOLAH INDONESIA	TEKNIS
1171	PENAGIH RETRIBUSI	TEKNIS
1172	PENATA DOKUMEN BAHASA DAN SASTRA	TEKNIS
1173	PENATA DOKUMEN HASIL PRODUKSI	TEKNIS
1174	PENATA KENDARAAN DINAS	TEKNIS
1175	PENATA KEUANGAN	TEKNIS
1176	PENATA LAPORAN KEUANGAN	TEKNIS
1177	PENATA RONTGEN	TEKNIS
1178	PENELAAH AUDIT KESELAMATAN JALAN	TEKNIS
1179	PENELAAH BAHAN JALAN	TEKNIS
1180	PENELAAH BAHAN KAJIAN BENCANA ALAM	TEKNIS
1181	PENELAAH DAMPAK LINGKUNGAN	TEKNIS
1182	PENELAAH DATA PENGENDALIAN BAHAN BAKU	TEKNIS
1183	PENELAAH DATA PENGOLAHAN INDUSTRI PRIMER	TEKNIS
1184	PENELAAH DATA PENGUJIAN MUTU PERSUTERAAN ALAM	TEKNIS
1185	PENELAAH DATA PENGUKURAN DAN PENGUJIAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU	TEKNIS
1186	PENELAAH DATA PENGUKURAN DAN PENGUJIAN HASIL HUTAN KAYU	TEKNIS
1187	PENELAAH DATA SDA	TEKNIS
1188	PENELAAH DATA SERTIFIKASI DAN AKREDITASI TELUR ULAT SUTERA	TEKNIS
1189	PENELAAH DATA SERTIFIKASI MUTU BENIH/BIBIT	TEKNIS
1190	PENELAAH DATA SISTEM INFORMASI PERBENIHAN DAN PEMBIBITAN TANAMAN HUTAN	TEKNIS
1191	PENELAAH DATA STATISTIK PENGELOLAAN DAS	TEKNIS
1192	PENELAAH DATA SUMBER BENIH	TEKNIS
1193	PENELAAH DATA SUMBERDAYA GENETIK	TEKNIS
1194	PENELAAH DATA TANDA LEGALITAS HASIL HUTAN	TEKNIS
1195	PENELAAH DIFUSI & ALIH TEKNOLOGI	TEKNIS
1196	PENELAAH EROSI DAN SEDIMENTASI	TEKNIS
1197	PENELAAH KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA	TEKNIS
1198	PENELAAH LHP DAN KERUGIAN NEGARA	TEKNIS
1199	PENELAAH PENERAPAN & PELAYANAN TEKNIS	TEKNIS
1200	PENELAAH PENGADAAN TANAH	TEKNIS
1201	PENELAAH PENGELOLAAN LEGER JALAN	TEKNIS
1202	PENELAAH PENGEMBANGAN USAHA	TEKNIS
1203	PENELAAH PERJANJIAN & INFORMASI HUKUM	TEKNIS
1204	PENGAMAT PERBEKALAN	TEKNIS
1205	PENGAMAT TEKNIKA	TEKNIS
1206	PENGAMBIL SAMPEL	TEKNIS
1207	PENGAWAS ALSINTAN	TEKNIS
1208	PENGAWAS ANGKUTAN DAN TERMINAL	TEKNIS
1209	PENGAWAS BAHASA/SASTRA	TEKNIS
1210	PENGAWAS BANGUNAN DAN GEDUNG	TEKNIS
1211	PENGAWAS BANGUNAN DAN TAMAN	TEKNIS
1212	PENGAWAS BARANG BEREDAR DAN JASA	TEKNIS
1213	PENGAWAS CUACA	TEKNIS
1214	PENGAWAS DAN PEMBINA ANGKUTAN	TEKNIS
1215	PENGAWAS DAN PEMBINA TERMINAL	TEKNIS
1216	PENGAWAS DAN PENYIDIK STANDARDISASI INDUSTRI	TEKNIS
1217	PENGAWAS FISIK PEMUKIMAN	TEKNIS
1218	PENGAWAS HARGA PANGAN	TEKNIS
1219	PENGAWAS HYGIENE, SANITASI USAHA PETERNAKAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	TEKNIS
1220	PENGAWAS INDUSTRI	TEKNIS
1221	PENGAWAS IRIGASI	TEKNIS
1222	PENGAWAS JALAN DAN JEMBATAN	TEKNIS
1223	PENGAWAS JARINGAN UTILITAS	TEKNIS
1224	PENGAWAS K3 DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN	TEKNIS
1225	PENGAWAS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK	TEKNIS

NO	NAMA JABATAN	RUMPUT
1226	PENGAWAS KELISTRIKAN	TEKNIS
1227	PENGAWAS KEMAHASISWAAN	TEKNIS
1228	PENGAWAS KEPARIWISATAAN	TEKNIS
1229	PENGAWAS KEPATUHAN TRANSAKSI KEUANGAN	TEKNIS
1230	PENGAWAS KEPENDUDUKAN	TEKNIS
1231	PENGAWAS KESELAMATAN ANGKUTAN	TEKNIS
1232	PENGAWAS KESELAMATAN DARAT/JALAN	TEKNIS
1233	PENGAWAS KESELAMATAN UDARA	TEKNIS
1234	PENGAWAS KETRANSMIGRASIAN	TEKNIS
1235	PENGAWAS KONSERVASI ENERGI	TEKNIS
1236	PENGAWAS LALU LINTAS DARAT	TEKNIS
1237	PENGAWAS LALU LINTAS HEWAN DAN WILAYAH KARANTINA HEWAN	TEKNIS
1238	PENGAWAS LALU LINTAS LAUT	TEKNIS
1239	PENGAWAS LALU LINTAS UDARA	TEKNIS
1240	PENGAWAS LAPANGAN ANGKUTAN SAMPAH	TEKNIS
1241	PENGAWAS LAPANGAN PETUGAS KEBERSIHAN JALAN, SALURAN DAN SELOKAN	TEKNIS
1242	PENGAWAS LAPANGAN PETUGAS KEBERSIHAN TPA	TEKNIS
1243	PENGAWAS LAPANGAN PETUGAS PERTAMANAN	TEKNIS
1244	PENGAWAS MONITORING DAN EVALUASI IMUNISASI PUSKESMAS	TEKNIS
1245	PENGAWAS MUTU BIBIT TERNAK	TEKNIS
1246	PENGAWAS MUTU HASIL KEHUTANAN	TEKNIS
1247	PENGAWAS MUTU HASIL PERKEBUNAN	TEKNIS
1248	PENGAWAS MUTU PAKAN DAN PRODUKSI BIBIT TERNAK BESAR	TEKNIS
1249	PENGAWAS MUTU PAKAN DAN PRODUKSI BIBIT TERNAK KECIL DAN UNGGAS	TEKNIS
1250	PENGAWAS OLAH RAGA	TEKNIS
1251	PENGAWAS OPERASI KILANG	TEKNIS
1252	PENGAWAS OPERASI UTILITAS	TEKNIS
1253	PENGAWAS PELABUHAN	TEKNIS
1254	PENGAWAS PELAPORAN DAN TRANSAKSI KEUANGAN	TEKNIS
1255	PENGAWAS PELAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN	TEKNIS
1256	PENGAWAS PELAYANAN KB	TEKNIS
1257	PENGAWAS PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	TEKNIS
1258	PENGAWAS PEMANFAATAN TANAH	TEKNIS
1259	PENGAWAS PEMBANGUNAN DAERAH TERPENCIL	TEKNIS
1260	PENGAWAS PENANAMAN MODAL	TEKNIS
1261	PENGAWAS PENELITIAN DAN HKI	TEKNIS
1262	PENGAWAS PENGAIRAN	TEKNIS
1263	PENGAWAS PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN DAN AIR IRIGASI	TEKNIS
1264	PENGAWAS PENGEMBANGAN SARANA IPTEK	TEKNIS
1265	PENGAWAS PENGOPERASIAN ALAT BERAT	TEKNIS
1266	PENGAWAS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	TEKNIS
1267	PENGAWAS PENTASHIHAN	TEKNIS
1268	PENGAWAS PENYAKIT DAN PENGENDALI PENYAKIT HEWAN	TEKNIS
1269	PENGAWAS PENYAKIT DAN PENGENDALI PENYAKIT IKAN	TEKNIS
1270	PENGAWAS PENYELENGGARA DAN PELAKU PASAR LELANG	TEKNIS
1271	PENGAWAS PERBATASAN	TEKNIS
1272	PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI	TEKNIS
1273	PENGAWAS PEREMPUAN DAN ANAK	TEKNIS
1274	PENGAWAS PERHOTELAN	TEKNIS
1275	PENGAWAS PERPUSTAKAAN	TEKNIS
1276	PENGAWAS PERUSAHAAN NEGARA	TEKNIS
1277	PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA	TEKNIS
1278	PENGAWAS REHABILITASI NARKOBA	TEKNIS
1279	PENGAWAS RESI GUDANG	TEKNIS
1280	PENGAWAS SARANA BENGKEL	TEKNIS
1281	PENGAWAS TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN	TEKNIS
1282	PENGAWAS TATA PERTAMANAN	TEKNIS
1283	PENGAWAS TATA RUANG	TEKNIS
1284	PENGAWAS TEKNOLOGI INFORMASI	TEKNIS
1285	PENGAWAS TELEKOMUNIKASI	TEKNIS
1286	PENGAWAS TERMINAL	TEKNIS
1287	PENGAWAS TRANSAKSI PASAR LELANG	TEKNIS
1288	PENGAWAS TRANSPORTASI	TEKNIS
1289	PENGAWAS USAHA OPERASI PRODUKSI DAN PEMASARAN	TEKNIS
1290	PENGELOLA ADAT DAN KESENIAN	TEKNIS
1291	PENGELOLA ADMINISTRASI & DOKUMEN HKI	TEKNIS
1292	PENGELOLA ADMINISTRASI KERJASAMA LUAR NEGERI	TEKNIS
1293	PENGELOLA ADMINISTRASI KPHI	TEKNIS
1294	PENGELOLA ADMINISTRASI LSP	TEKNIS
1295	PENGELOLA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	TEKNIS
1296	PENGELOLA ADMINISTRASI PERTANAHAN DESA/KELURAHAN DAN PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM	TEKNIS
1297	PENGELOLA ADMINISTRASI SIMLUHTAN	TEKNIS
1298	PENGELOLA ADMINISTRASI TEMPAT UJI KOMPETENSI	TEKNIS
1299	PENGELOLA ADVOKASI KONSELING DAN PEMBINAAN KB DAN KESEHATAN REPRODUKSI	TEKNIS
1300	PENGELOLA AKTA DAN LEGALISASI	TEKNIS
1301	PENGELOLA AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH	TEKNIS

NO	NAMA JABATAN	RUMPUT
1302	PENGELOLA AKUISISI	TEKNIS
1303	PENGELOLA AKUNTABILITAS	TEKNIS
1304	PENGELOLA AKUNTANSI	TEKNIS
1305	PENGELOLA ALAT PENGUKURAN DAN PEMETAAN	TEKNIS
1306	PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI	TEKNIS
1307	PENGELOLA ALSINTAN	TEKNIS
1308	PENGELOLA ANGGARAN	TEKNIS
1309	PENGELOLA ANGGARAN SEKRETARIAT DAERAH	TEKNIS
1310	PENGELOLA ANGKUTAN KENDARAAN	TEKNIS
1311	PENGELOLA APRESIASI FILM	TEKNIS
1312	PENGELOLA ARKEOLOGI	TEKNIS
1313	PENGELOLA ASRAMA	TEKNIS
1314	PENGELOLA BAHAN AKADEMIK DAN PENGAJARAN	TEKNIS
1315	PENGELOLA BAHAN DATABASE KELEMBAGAAN PETANI	TEKNIS
1316	PENGELOLA BAHAN PEMBERI KETATALAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN	TEKNIS
1317	PENGELOLA BAHAN PENGUATAN/PEMBERDAYAAN LEMBAGA	TEKNIS
1318	PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN	TEKNIS
1319	PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN USAHATANI	TEKNIS
1320	PENGELOLA BAHAN PUSTAKA	TEKNIS
1321	PENGELOLA BANDING DAN GUGATAN	TEKNIS
1322	PENGELOLA BANGUNAN GEDUNG	TEKNIS
1323	PENGELOLA BANK SOAL	TEKNIS
1324	PENGELOLA BANTUAN HUKUM	TEKNIS
1325	PENGELOLA BANTUAN KEAGAMAAN I (MASJID, GEREJA, PURA DAN WIHARA)	TEKNIS
1326	PENGELOLA BANTUAN KEBUDAYAAN	TEKNIS
1327	PENGELOLA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA (ADD, PAJAK, PBB, TERMINAL DAN PASAR)	TEKNIS
1328	PENGELOLA BANTUAN OPERASIONAL	TEKNIS
1329	PENGELOLA BANTUAN ORMAS SOSIAL	TEKNIS
1330	PENGELOLA BANTUAN PENDIDIKAN	TEKNIS
1331	PENGELOLA BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH	TEKNIS
1332	PENGELOLA BARANG PERSEDIAAN DAN BARANG MILIK NEGARA	TEKNIS
1333	PENGELOLA BATAS WILAYAH, RUPABUMI DAN PATEN	TEKNIS
1334	PENGELOLA BENGKEL	TEKNIS
1335	PENGELOLA BERKAS PENINJAUAN KEMBALI	TEKNIS
1336	PENGELOLA BIMBINGAN DAN KONSELING	TEKNIS
1337	PENGELOLA BIMBINGAN MASYARAKAT	TEKNIS
1338	PENGELOLA BIMBINGAN SOSIAL	TEKNIS
1339	PENGELOLA BIMBINGAN TEKNIS DAN BANTUAN TEKNIS	TEKNIS
1340	PENGELOLA BIMBINGAN TEKNIS SERTIFIKASI PROFESI	TEKNIS
1341	PENGELOLA BIMBINGAN TEKNIS STANDARDISASI KOMPETENSI	TEKNIS
1342	PENGELOLA BINA KESEJAHTERAAN KELUARGA	TEKNIS
1343	PENGELOLA BUDIDAYA DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN	TEKNIS
1344	PENGELOLA BUDIDAYA DAN PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN	TEKNIS
1345	PENGELOLA BUDIDAYA PENGEMBANGAN TERNAK DAN HEWAN LAINNYA	TEKNIS
1346	PENGELOLA CAGAR BUDAYA DAN KOLEKSI MUSEUM	TEKNIS
1347	PENGELOLA DAMPAK PENOMENA ALAM (KEKERINGAN DAN PEREDARAN PESTISIDA)	TEKNIS
1348	PENGELOLA DAN INFORMASI NILAI TANAH	TEKNIS
1349	PENGELOLA DAN KEBUTUHAN BIBIT TANAMAN PADI, BUAH-BUAHAN SERTA SAYURAN	TEKNIS
1350	PENGELOLA DATA ADMINISTRASI BUKTI PERMULAAN DAN PENYIDIKAN	TEKNIS
1351	PENGELOLA DATA ADMINISTRASI DAN BIMBINGAN PEMERIKSAAN	TEKNIS
1352	PENGELOLA DATA ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI	TEKNIS
1353	PENGELOLA DATA ALUMNI	TEKNIS
1354	PENGELOLA DATA ALUR DAN PERAMBUAN SDP	TEKNIS
1355	PENGELOLA DATA ANGKUTAN SDP	TEKNIS
1356	PENGELOLA DATA APRESIASI FILM	TEKNIS
1357	PENGELOLA DATA ARKEOLOGI	TEKNIS
1358	PENGELOLA DATA BANTUAN SOSIAL	TEKNIS
1359	PENGELOLA DATA BELANJA DAN LAPORAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH	TEKNIS
1360	PENGELOLA DATA BIMBINGAN DAN KONSELING	TEKNIS
1361	PENGELOLA DATA BIMBINGAN EKSTENSIFIKASI	TEKNIS
1362	PENGELOLA DATA BIMBINGAN PENDAFTARAN	TEKNIS
1363	PENGELOLA DATA CAGAR BUDAYA DAN KOLEKSI MUSEUM	TEKNIS
1364	PENGELOLA DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN	TEKNIS
1365	PENGELOLA DATA DAN INFORMASI PERPAJAKAN	TEKNIS
1366	PENGELOLA DATA DAN POTENSI PAJAK	TEKNIS
1367	PENGELOLA DATA DAN SISTEM PEMBELAJARAN	TEKNIS
1368	PENGELOLA DATA DIPLOMASI BUDAYA DALAM NEGERI	TEKNIS
1369	PENGELOLA DATA DIPLOMASI BUDAYA LUAR NEGERI	TEKNIS
1370	PENGELOLA DATA EDUKASI	TEKNIS
1371	PENGELOLA DATA EKSPLORASI CAGAR BUDAYA	TEKNIS
1372	PENGELOLA DATA EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL	TEKNIS
1373	PENGELOLA DATA FASILITASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERTANAHAN	TEKNIS
1374	PENGELOLA DATA HAK ATAS TANAH	TEKNIS
1375	PENGELOLA DATA HUBUNGAN MASYARAKAT DAN RUMAH TANGGA	TEKNIS
1376	PENGELOLA DATA INFORMASI, DATA, LAPORAN, DAN PENGADUAN	TEKNIS
1377	PENGELOLA DATA JARINGAN LINTAS TRANSPORTASI SDP	TEKNIS
1378	PENGELOLA DATA JARINGAN TRANSPORTASI JALAN	TEKNIS

NO	NAMA JABATAN	RUMPUT
1379	PENGELOLA DATA KARIR PENDIDIK	TEKNIS
1380	PENGELOLA DATA KEBAHASAAN	TEKNIS
1381	PENGELOLA DATA KEKAYAAN BUDAYA	TEKNIS
1382	PENGELOLA DATA KELEMBAGAAN BENIH	TEKNIS
1383	PENGELOLA DATA KELEMBAGAAN KURSUS DAN PELATIHAN	TEKNIS
1384	PENGELOLA DATA KESENIAN DAN PERFILMAN	TEKNIS
1385	PENGELOLA DATA KEUANGAN DAERAH	TEKNIS
1386	PENGELOLA DATA KINERJA ATDIKBUD DAN SEKOLAH INDONESIA	TEKNIS
1387	PENGELOLA DATA KOMUNITAS ADAT	TEKNIS
1388	PENGELOLA DATA KONSOLIDASI TANAH	TEKNIS
1389	PENGELOLA DATA KREATIVITAS DAN INOVASI	TEKNIS
1390	PENGELOLA DATA KURIKULUM DAN PERBUKUAN PENDIDIKAN MENENGAH	TEKNIS
1391	PENGELOLA DATA LANDREFORM	TEKNIS
1392	PENGELOLA DATA LAYANAN INFORMASI DAN EDUKASI PUBLIK	TEKNIS
1393	PENGELOLA DATA LAYANAN PUBLIK DAN HUBUNGAN INVESTOR	TEKNIS
1394	PENGELOLA DATA LINGKUNGAN BUDAYA	TEKNIS
1395	PENGELOLA DATA LITERASI FILM	TEKNIS
1396	PENGELOLA DATA MONEV BERKAS SENGKETA	TEKNIS
1397	PENGELOLA DATA MONEV PROGRAM BEASISWA	TEKNIS
1398	PENGELOLA DATA MONEV SBSN	TEKNIS
1399	PENGELOLA DATA MUTU DAN SUPERVISI	TEKNIS
1400	PENGELOLA DATA MUTU PENDIDIKAN	TEKNIS
1401	PENGELOLA DATA NILAI BUDAYA	TEKNIS
1402	PENGELOLA DATA OBSERVASI	TEKNIS
1403	PENGELOLA DATA PAMERAN DAN KEMITRAAN	TEKNIS
1404	PENGELOLA DATA PARTISIPASI	TEKNIS
1405	PENGELOLA DATA PASCA PANEN	TEKNIS
1406	PENGELOLA DATA PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN	TEKNIS
1407	PENGELOLA DATA PELAKSANAAN PROGRAM INTERNALISASI NILAI DAN DIPLOMASI BUDAYA	TEKNIS
1408	PENGELOLA DATA PELAKSANAAN PROGRAM SERTIFIKASI SDM KEBUDAYAAN	TEKNIS
1409	PENGELOLA DATA PELAYANAN PERPAJAKAN	TEKNIS
1410	PENGELOLA DATA PEMANFAATAN CAGAR BUDAYA DAN KOLEKSI MUSEUM	TEKNIS
1411	PENGELOLA DATA PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH	TEKNIS
1412	PENGELOLA DATA PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA	TEKNIS
1413	PENGELOLA DATA PEMBERDAYAAN KEMAHASISWAAN	TEKNIS
1414	PENGELOLA DATA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN	TEKNIS
1415	PENGELOLA DATA PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN	TEKNIS
1416	PENGELOLA DATA PEMETAAN SEJARAH	TEKNIS
1417	PENGELOLA DATA PENATAGUNAAN TANAH	TEKNIS
1418	PENGELOLA DATA PENCAIRAN DANA	TEKNIS
1419	PENGELOLA DATA PENCEGAHAN DAN MONITORING	TEKNIS
1420	PENGELOLA DATA PENDIDIKAN DAN EVALUASI	TEKNIS
1421	PENGELOLA DATA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	TEKNIS
1422	PENGELOLA DATA PENELITIAN DASAR DAN PENGEMBANGAN ILMU	TEKNIS
1423	PENGELOLA DATA PENGEMASAN NILAI BUDAYA	TEKNIS
1424	PENGELOLA DATA PENGEMBANGAN INVESTASI	TEKNIS
1425	PENGELOLA DATA PENGEMBANGAN KOMPETENSI KELULUSAN	TEKNIS
1426	PENGELOLA DATA PENGEMBANGAN SITUS	TEKNIS
1427	PENGELOLA DATA PENGENDALIAN MASYARAKAT	TEKNIS
1428	PENGELOLA DATA PENGENDALIAN PERTANAHAN	TEKNIS
1429	PENGELOLA DATA PENGETAHUAN TRADISIONAL	TEKNIS
1430	PENGELOLA DATA PENGGUNAAN BAHASA	TEKNIS
1431	PENGELOLA DATA PENGKAJIAN DAN PERAWATAN	TEKNIS
1432	PENGELOLA DATA PENILAIAN VARIETAS	TEKNIS
1433	PENGELOLA DATA PENULISAN NILAI BUDAYA	TEKNIS
1434	PENGELOLA DATA PENULISAN SEJARAH	TEKNIS
1435	PENGELOLA DATA PENYELENGGARAAN TES	TEKNIS
1436	PENGELOLA DATA PENYUSUNAN BAHAN PEMBINAAN TEKNIS PENGUKURAN DAN PEMETAAN	TEKNIS
1437	PENGELOLA DATA PERAWATAN KAPAL PENGAWAS	TEKNIS
1438	PENGELOLA DATA PERIJINAN CAGAR BUDAYA DAN KOLEKSI MUSEUM	TEKNIS
1439	PENGELOLA DATA PERUMUSAN NILAI BUDAYA	TEKNIS
1440	PENGELOLA DATA PNBP	TEKNIS
1441	PENGELOLA DATA PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN	TEKNIS
1442	PENGELOLA DATA PROGRAM INTERNALISASI NILAI DAN DIPLOMASI BUDAYA	TEKNIS
1443	PENGELOLA DATA PROGRAM PENGEMBANGAN TENAGA TEKNIS DAN FUNGSIONAL NON PENDIDIK	TEKNIS
1444	PENGELOLA DATA PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI SDM KEBUDAYAAN	TEKNIS
1445	PENGELOLA DATA PROGRAM SERTIFIKASI SDM KEBUDAYAAN	TEKNIS
1446	PENGELOLA DATA PUBLIKASI ILMIAH	TEKNIS
1447	PENGELOLA DATA PUBLIKASI SEJARAH	TEKNIS
1448	PENGELOLA DATA RANCANG BANGUN SARANA ANGKUTAN SDP	TEKNIS
1449	PENGELOLA DATA REKONSILIASI	TEKNIS
1450	PENGELOLA DATA SARANA ANGKUTAN SDP	TEKNIS
1451	PENGELOLA DATA SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	TEKNIS
1452	PENGELOLA DATA SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN	TEKNIS
1453	PENGELOLA DATA SEJARAH	TEKNIS

NO	NAMA JABATAN	RUMPUT
1454	PENGELOLA DATA SENGKETA PERTANAHAN	TEKNIS
1455	PENGELOLA DATA SENI PERTUNJUKAN NONTRADISIONAL	TEKNIS
1456	PENGELOLA DATA SENI PERTUNJUKAN TRADISIONAL	TEKNIS
1457	PENGELOLA DATA SENI RUPA MURNI	TEKNIS
1458	PENGELOLA DATA SENI RUPA TERAPAN	TEKNIS
1459	PENGELOLA DATA SISTEM PEMBELAJARAN	TEKNIS
1460	PENGELOLA DATA STATISTIK	TEKNIS
1461	PENGELOLA DATA SUMBER SEJARAH	TEKNIS
1462	PENGELOLA DATA SUPERVISI DAN FASILITASI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN	TEKNIS
1463	PENGELOLA DATA SUPERVISI KPPN	TEKNIS
1464	PENGELOLA DATA TANAH NEGARA, TANAH TERLANTAR DAN TANAH KRITIS	TEKNIS
1465	PENGELOLA DATA TENAGA KEPENDIDIKAN	TEKNIS
1466	PENGELOLA DATA TP/TGR	TEKNIS
1467	PENGELOLA DATA TRANSAKSI	TEKNIS
1468	PENGELOLA DATA UPACARA ADAT	TEKNIS
1469	PENGELOLA DATA WARISAN BUDAYA BENDA	TEKNIS
1470	PENGELOLA DATA WARISAN BUDAYA TAKBENDA	TEKNIS
1471	PENGELOLA DATABASE	TEKNIS
1472	PENGELOLA DATABASE KELEMBAGAAN PETANI	TEKNIS
1473	PENGELOLA DATABASE PENDIDIKAN	TEKNIS
1474	PENGELOLA DATABASE PROFESI SDM PERTANIAN	TEKNIS
1475	PENGELOLA DATABASE SPM	TEKNIS
1476	PENGELOLA DISIPLIN PEGAWAI	TEKNIS
1477	PENGELOLA DISTRIBUSI DAN PEMASARAN	TEKNIS
1478	PENGELOLA DISTRIBUSI TERNAK GADUHAN DAN SEMI GADUHAN	TEKNIS
1479	PENGELOLA DOKUMEN CAGAR BUDAYA DAN KOLEKSI MUSEUM	TEKNIS
1480	PENGELOLA DOKUMEN DAN ALAT PENGUKURAN DAN PEMETAAN	TEKNIS
1481	PENGELOLA DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM	TEKNIS
1482	PENGELOLA DOKUMEN MENGENAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN	TEKNIS
1483	PENGELOLA DOKUMEN PERIZINAN	TEKNIS
1484	PENGELOLA DOKUMEN PERJALANAN LUAR NEGERI	TEKNIS
1485	PENGELOLA DOKUMEN PUTUSAN	TEKNIS
1486	PENGELOLA DOKUMENTASI	TEKNIS
1487	PENGELOLA DUKUNGAN KOORDINASI STABILITAS SISTEM KEUANGAN	TEKNIS
1488	PENGELOLA EDUKASI	TEKNIS
1489	PENGELOLA EKSPLORASI CAGAR BUDAYA	TEKNIS
1490	PENGELOLA EKSPOR HASIL USAHA INDUSTRI DAN USAHA PERDAGANGAN	TEKNIS
1491	PENGELOLA EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL	TEKNIS
1492	PENGELOLA ENERGI, MINYAK DAN GAS BUMI	TEKNIS
1493	PENGELOLA EVALUASI DAN PENGAWASAN PENYERAPAN ANGGARAN	TEKNIS
1494	PENGELOLA EVALUASI TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN	TEKNIS
1495	PENGELOLA FASILITAS PENGUJIAN, PEMERIKSA DAN PERAWATAN	TEKNIS
1496	PENGELOLA FASILITAS SOSIAL DAN UMUM	TEKNIS
1497	PENGELOLA FASILITASI BANTUAN HUKUM	TEKNIS
1498	PENGELOLA FASILITASI DAN MEDIASI PEMBANGUNAN USAHA PERDAGANGAN EKSPORT-IMPOR	TEKNIS
1499	PENGELOLA FASILITASI DAN MEDIASI PERLINDUNGAN KONSUMEN	TEKNIS
1500	PENGELOLA FORMASI DAN PENGADAAN PEGAWAI	TEKNIS
1501	PENGELOLA GAJI	TEKNIS
1502	PENGELOLA GEOLOGI, TATA LINGKUNGAN DAN AIR BAWAH TANAH	TEKNIS
1503	PENGELOLA GEOSPASIAL	TEKNIS
1504	PENGELOLA HAK CIPTA DAN MEREK	TEKNIS
1505	PENGELOLA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	TEKNIS
1506	PENGELOLA HUBUNGAN KERJASAMA USAHA INDUSTRI	TEKNIS
1507	PENGELOLA IJIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH	TEKNIS
1508	PENGELOLA IMB GEDUNG/BANGUNAN	TEKNIS
1509	PENGELOLA INFORMASI AKADEMIK (PTAN)	TEKNIS
1510	PENGELOLA INFORMASI KEPARIWISATAAN	TEKNIS
1511	PENGELOLA INFORMASI KERJASAMA	TEKNIS
1512	PENGELOLA INFORMASI LINGKUNGAN	TEKNIS
1513	PENGELOLA INFORMASI PERTANAHAN	TEKNIS
1514	PENGELOLA INFORMASI PRODUK HUKUM	TEKNIS
1515	PENGELOLA INKUBASI	TEKNIS
1516	PENGELOLA INSPEKSI SUNGAI DANAU DAN PENYEGERANGAN	TEKNIS
1517	PENGELOLA INSTALASI	TEKNIS
1518	PENGELOLA INSTALASI AIR DAN LISTRIK	TEKNIS
1519	PENGELOLA INSTALASI KEBUN/LAHAN PRAKTEK DAN SCREEN HOUSE	TEKNIS
1520	PENGELOLA INSTALASI TEKNOLOGI INFORMASI	TEKNIS
1521	PENGELOLA INSTALASI TERNAK	TEKNIS
1522	PENGELOLA INVENTARISASI, TABULASI DAN STATISTIK PROGRAM KERJA	TEKNIS
1523	PENGELOLA IRIGASI	TEKNIS
1524	PENGELOLA JASA KONSTRUKSI	TEKNIS
1525	PENGELOLA JASA PANGKALAN PENDARATAN IKAN	TEKNIS
1526	PENGELOLA KALENDER PENDIDIKAN DASAR	TEKNIS
1527	PENGELOLA KALIBRASI PERALATAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	TEKNIS
1528	PENGELOLA KANDANG HEWAN PERCOBAAN	TEKNIS
1529	PENGELOLA KARIR PENDIDIK	TEKNIS
1530	PENGELOLA KARTU PENGENAL NPWP	TEKNIS

NO	NAMA JABATAN	RUMPUN
1531	PENGELOLA KEAMANAN DAN KETERTIBAN	TEKNIS
1532	PENGELOLA KEAMANAN PANGAN SEGAR DAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH	TEKNIS
1533	PENGELOLA KEAMANAN SISTEM INFORMASI	TEKNIS
1534	PENGELOLA KEBIDANAN	TEKNIS
1535	PENGELOLA KEBIJAKAN KELEMBAGAAN KOPERASI	TEKNIS
1536	PENGELOLA KEBUTUHAN BIBIT TANAMAN PADI, BUAH-BUAHAN SERTA SAYURAN	TEKNIS
1537	PENGELOLA KEFARMASIAN	TEKNIS
1538	PENGELOLA KEGIATAN DAN ANGGARAN	TEKNIS
1539	PENGELOLA KEGIATAN HARI BESAR KEAGAMAAN	TEKNIS
1540	PENGELOLA KEGIATAN SURVEY DAN PERENCANAAN	TEKNIS
1541	PENGELOLA KEKAYAAN DESA DAN ADMINISTRASI DESA	TEKNIS
1542	PENGELOLA KEKAYAAN NEGARA	TEKNIS
1543	PENGELOLA KELAYAKAN SDA	TEKNIS
1544	PENGELOLA KELEMBAGAAN BENIH	TEKNIS
1545	PENGELOLA KELEMBAGAAN KURSUS DAN PELATIHAN	TEKNIS
1546	PENGELOLA KELEMBAGAAN PAUD	TEKNIS
1547	PENGELOLA KELEMBAGAAN PENDIDIKAN	TEKNIS
1548	PENGELOLA KELENGKAPAN JALAN	TEKNIS
1549	PENGELOLA KEMAHASISWAAN/ALUMNI	TEKNIS
1550	PENGELOLA KEMASJIDAN	TEKNIS
1551	PENGELOLA KEMASYARAKATAN SPIRITAL	TEKNIS
1552	PENGELOLA KENDARAAN	TEKNIS
1553	PENGELOLA KENDARAAN DAN PERJALANAN DINAS	TEKNIS
1554	PENGELOLA KEPERAWATAN	TEKNIS
1555	PENGELOLA KERJASAMA DAN INVESTASI	TEKNIS
1556	PENGELOLA KERJASAMA PENANAMAN MODAL	TEKNIS
1557	PENGELOLA KERUGIAN NEGARA	TEKNIS
1558	PENGELOLA KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET	TEKNIS
1559	PENGELOLA KESEHATAN TERNAK BESAR, KECIL DAN UNGGAS	TEKNIS
1560	PENGELOLA KESEHATAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	TEKNIS
1561	PENGELOLA KESEJAHTERAAN SOSIAL	TEKNIS
1562	PENGELOLA KESELAMATAN DAN KEAMANAN KAPAL SDP	TEKNIS
1563	PENGELOLA KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN SDP	TEKNIS
1564	PENGELOLA KETAHANAN PANGAN	TEKNIS
1565	PENGELOLA KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN	TEKNIS
1566	PENGELOLA KETRANSMIGRASIAN	TEKNIS
1567	PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DESA	TEKNIS
1568	PENGELOLA KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH	TEKNIS
1569	PENGELOLA KOLEKSI	TEKNIS
1570	PENGELOLA KONSULTAN PAJAK	TEKNIS
1571	PENGELOLA KURIKULUM	TEKNIS
1572	PENGELOLA KURIKULUM PENINGKATAN MUTU SEKOLAH	TEKNIS
1573	PENGELOLA LABORATORIUM	TEKNIS
1574	PENGELOLA LABORATORIUM KOMPUTER	TEKNIS
1575	PENGELOLA LABORATORIUM PENGOLAHAN HASIL DAN KULTUR JARINGAN	TEKNIS
1576	PENGELOLA LAHAN PERTANIAN	TEKNIS
1577	PENGELOLA LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN	TEKNIS
1578	PENGELOLA LALU LINTAS TERNAK/PENGURUS IZIN BUDI DAYA TERNAK	TEKNIS
1579	PENGELOLA LAPORAN KEUANGAN	TEKNIS
1580	PENGELOLA LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN (LPPD), LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (EPPD)	TEKNIS
1581	PENGELOLA LAYANAN AKADEMIK	TEKNIS
1582	PENGELOLA LAYANAN BKB, BKR DAN BKL	TEKNIS
1583	PENGELOLA LAYANAN INFORMASI PENERIMAAN NEGARA	TEKNIS
1584	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	TEKNIS
1585	PENGELOLA LAYANAN PELABUHAN DAN STEIGHER	TEKNIS
1586	PENGELOLA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI	TEKNIS
1587	PENGELOLA LHKPN	TEKNIS
1588	PENGELOLA LIMBAH	TEKNIS
1589	PENGELOLA LIMBAH PENGUJIAN	TEKNIS
1590	PENGELOLA LINGKUNGAN	TEKNIS
1591	PENGELOLA LINGKUNGAN BUDAYA	TEKNIS
1592	PENGELOLA LITERASI FILM	TEKNIS
1593	PENGELOLA LPSE	TEKNIS
1594	PENGELOLA LSP	TEKNIS
1595	PENGELOLA LSP – P1	TEKNIS
1596	PENGELOLA MANAJEMEN TRANSPORTASI ASDP	TEKNIS
1597	PENGELOLA MEDIA CENTER DAN KEMITRAAN MEDIA	TEKNIS
1598	PENGELOLA MEDIA CETAK	TEKNIS
1599	PENGELOLA METROLOGI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	TEKNIS
1600	PENGELOLA MONITORING DAN EVALUASI	TEKNIS
1601	PENGELOLA MONITORING DAN EVALUASI, PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DAN PENYELESAIAN KASUS - KASUS PEMERINTAHAN DESA	TEKNIS
1602	PENGELOLA MUSEUM DAN KOLEKSI BENDA SENI	TEKNIS
1603	PENGELOLA MUTASI PENDUDUK	TEKNIS
1604	PENGELOLA MUTU	TEKNIS

NO	NAMA JABATAN	RUMPUN
1605	PENGELOLA NASKAH	TEKNIS
1606	PENGELOLA OBAT DAN ALAT -ALAT KESEHATAN	TEKNIS
1607	PENGELOLA OBJEK WISATA	TEKNIS
1608	PENGELOLA OBSERVASI	TEKNIS
1609	PENGELOLA ORGANISASI KEMAHASISWAAN	TEKNIS
1610	PENGELOLA ORGANISASI PERGURUAN TINGGI	TEKNIS
1611	PENGELOLA ORGANISASI POLITIK DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	TEKNIS
1612	PENGELOLA PAI PADA PTU	TEKNIS
1613	PENGELOLA PAMERAN DAN PERAGAAN	TEKNIS
1614	PENGELOLA PARTISIPASI	TEKNIS
1615	PENGELOLA PASAR	TEKNIS
1616	PENGELOLA PASCA PANEN	TEKNIS
1617	PENGELOLA PBB P2 DAN BPHTB	TEKNIS
1618	PENGELOLA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH	TEKNIS
1619	PENGELOLA PEKARYA KEBUN	TEKNIS
1620	PENGELOLA PELABUHAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN	TEKNIS
1621	PENGELOLA PELAKSANAAN PENGUJIAN MUTU SECARA LABORATORIS TERHADAP PRODUK HASIL PERIKANAN	TEKNIS
1622	PENGELOLA PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN	TEKNIS
1623	PENGELOLA PELAKSANAAN PROGRAM INTERNALISASI NILAI DAN DIPLOMASI BUDAYA	TEKNIS
1624	PENGELOLA PELAKSANAAN PROGRAM KELEMBAGAAN DAN KERJASAMA	TEKNIS
1625	PENGELOLA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH	TEKNIS
1626	PENGELOLA PELAPORAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) DAN BANTUAN KEUANGAN PROVINSI	TEKNIS
1627	PENGELOLA PELAPORAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN	TEKNIS
1628	PENGELOLA PELAPORAN DATA PENERIMAAN	TEKNIS
1629	PENGELOLA PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	TEKNIS
1630	PENGELOLA PELAYANAN DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN KB	TEKNIS
1631	PENGELOLA PELAYANAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	TEKNIS
1632	PENGELOLA PELAYANAN KESEHATAN	TEKNIS
1633	PENGELOLA PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK DAN LOGISTIK	TEKNIS
1634	PENGELOLA PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL DAN LANSIA	TEKNIS
1635	PENGELOLA PELESTARIAN SUMBER DAYA ALAM	TEKNIS
1636	PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	TEKNIS
1637	PENGELOLA PEMANFAATAN ENERGI DAN PENYEDIAAN LISTRIK PERDESaan	TEKNIS
1638	PENGELOLA PEMANTAUAN	TEKNIS
1639	PENGELOLA PEMANTAUAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	TEKNIS
1640	PENGELOLA PEMASARAN	TEKNIS
1641	PENGELOLA PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JEMBATAN	TEKNIS
1642	PENGELOLA PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN	TEKNIS
1643	PENGELOLA PEMBELAJARAN BAHASA DAN SASTRA	TEKNIS
1644	PENGELOLA PEMBERANTASAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG(P2B2)	TEKNIS
1645	PENGELOLA PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG(P2ML)	TEKNIS
1646	PENGELOLA PEMBERDAYAAN LEMBAGA SOSIAL	TEKNIS
1647	PENGELOLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	TEKNIS
1648	PENGELOLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN	TEKNIS
1649	PENGELOLA PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	TEKNIS
1650	PENGELOLA PEMBERI KETATALAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN	TEKNIS
1651	PENGELOLA PEMBERIAN HAK PVT	TEKNIS
1652	PENGELOLA PEMBIAYAAN DAERAH	TEKNIS
1653	PENGELOLA PEMBINAAN BANTUAN	TEKNIS
1654	PENGELOLA PEMBINAAN DAN ANALISIS PEMBANGUNAN	TEKNIS
1655	PENGELOLA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN	TEKNIS
1656	PENGELOLA PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	TEKNIS
1657	PENGELOLA PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA	TEKNIS
1658	PENGELOLA PEMBINAAN TEKNIS SURVEYOR BERLISENSI	TEKNIS
1659	PENGELOLA PEMEGANG IJIN PENYEWA TANAH DAN INVENTARISASI ASET DAERAH	TEKNIS
1660	PENGELOLA PEMELIHARAAN DAN PEMUGARAN CAGAR BUDAYA DAN KOLEKSI MUSEUM	TEKNIS
1661	PENGELOLA PEMELIHARAAN JALAN	TEKNIS
1662	PENGELOLA PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI	TEKNIS
1663	PENGELOLA PEMELIHARAAN KONSERVASI LINGKUNGAN DAN KAWASAN KONSERVASI	TEKNIS
1664	PENGELOLA PEMERIKSA PERALATAN DAN FASILITAS PELABUHAN SDP	TEKNIS
1665	PENGELOLA PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN	TEKNIS
1666	PENGELOLA PEMETAAN SEJARAH	TEKNIS
1667	PENGELOLA PEMETAAN SUMBER DAYA INVESTASI	TEKNIS
1668	PENGELOLA PENAGIHAN DAN PENGAWASAN	TEKNIS
1669	PENGELOLA PENATAAN SARANA DAN PRASARANA	TEKNIS
1670	PENGELOLA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PAJAK/RETRIBUSI	TEKNIS
1671	PENGELOLA PENDAFTARAN/PEMBATALAN HAJI	TEKNIS
1672	PENGELOLA PENDAPATAN	TEKNIS
1673	PENGELOLA PENDIDIKAN	TEKNIS
1674	PENGELOLA PENDIDIKAN DAN EVALUASI	TEKNIS
1675	PENGELOLA PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	TEKNIS
1676	PENGELOLA PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN KESEHATAN	TEKNIS
1677	PENGELOLA PENELITIAN	TEKNIS
1678	PENGELOLA PENELITIAN BIDANG IPSK	TEKNIS
1679	PENGELOLA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	TEKNIS

NO	NAMA JABATAN	RUMPUT
1680	PENGELOLA PENELITIAN DASAR DAN PENGEMBANGAN ILMU	TEKNIS
1681	PENGELOLA PENERANGAN JALAN	TEKNIS
1682	PENGELOLA PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM	TEKNIS
1683	PENGELOLA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TEKNIS
1684	PENGELOLA PENGADAAN TANAH	TEKNIS
1685	PENGELOLA PENGADUAN PUBLIK	TEKNIS
1686	PENGELOLA PENGAIRAN	TEKNIS
1687	PENGELOLA PENGAJUAN SPP SEKRETARIAT DAERAH	TEKNIS
1688	PENGELOLA PENGAMATAN PENYAKIT (SURVEILANS EPIDEMIOLOGI) DAN IMUNISASI	TEKNIS
1689	PENGELOLA PENGANEKARAGAMAN PANGAN	TEKNIS
1690	PENGELOLA PENGAWAKAN KAPAL PENGAWAS	TEKNIS
1691	PENGELOLA PENGAWASAN	TEKNIS
1692	PENGELOLA PENGAWASAN LLAJ	TEKNIS
1693	PENGELOLA PENGAWASAN PEMBUDIDAYAAN IKAN	TEKNIS
1694	PENGELOLA PENGAWASAN PENANGKAPAN IKAN	TEKNIS
1695	PENGELOLA PENGAWASAN PENGOLAHAN, PENGANGKUTAN DAN PEMASARAN IKAN	TEKNIS
1696	PENGELOLA PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN	TEKNIS
1697	PENGELOLA PENGEMBANGAN BUDIDAYA DAN PEMASARAN PERIKANAN	TEKNIS
1698	PENGELOLA PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN USAHA	TEKNIS
1699	PENGELOLA PENGEMBANGAN INKUBASI BISNIS DAN WORKSHOP	TEKNIS
1700	PENGELOLA PENGEMBANGAN INVESTASI	TEKNIS
1701	PENGELOLA PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	TEKNIS
1702	PENGELOLA PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT	TEKNIS
1703	PENGELOLA PENGEMBANGAN MANAJEMEN SEKOLAH	TEKNIS
1704	PENGELOLA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH	TEKNIS
1705	PENGELOLA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN	TEKNIS
1706	PENGELOLA PENGEMBANGAN SARANA IPTEK	TEKNIS
1707	PENGELOLA PENGEMBANGAN SISTEM PEMBELAJARAN	TEKNIS
1708	PENGELOLA PENGEMBANGAN SUMBERDAYA PAUDNI	TEKNIS
1709	PENGELOLA PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN (OPT)	TEKNIS
1710	PENGELOLA PENGENDALIAN DAN OPERASIONAL	TEKNIS
1711	PENGELOLA PENGENDALIAN MASYARAKAT	TEKNIS
1712	PENGELOLA PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	TEKNIS
1713	PENGELOLA PENGENDALIAN PERTANAHAN	TEKNIS
1714	PENGELOLA PENGENDALIAN / MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN	TEKNIS
1715	PENGELOLA PENGGERAK PERAN SERTA MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	TEKNIS
1716	PENGELOLA PENGGUNAAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR	TEKNIS
1717	PENGELOLA PENGAJIAN DAN PENELAAHAN HUKUM	TEKNIS
1718	PENGELOLA PENGAJIAN DAN PERAWATAN	TEKNIS
1719	PENGELOLA PENGONSERVASI BAHASA DAN SASTRA	TEKNIS
1720	PENGELOLA PENGUATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	TEKNIS
1721	PENGELOLA PENGUATAN/PEMBERDAYAAN LEMBAGA	TEKNIS
1722	PENGELOLA PENGUJIAN KENDARAAN	TEKNIS
1723	PENGELOLA PENILAI USAHA PERKEBUNAN	TEKNIS
1724	PENGELOLA PENILAIAN DAN AKREDITASI PENDIDIKAN	TEKNIS
1725	PENGELOLA PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	TEKNIS
1726	PENGELOLA PENILAIAN PELAYANAN PELABUHAN ASDP	TEKNIS
1727	PENGELOLA PENILAIAN VARIETAS	TEKNIS
1728	PENGELOLA PENINGKATAN KOMPETENSI KEPALA SEKOLAH	TEKNIS
1729	PENGELOLA PENINGKATAN KOMPETENSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	TEKNIS
1730	PENGELOLA PENINGKATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DALAM NEGERI	TEKNIS
1731	PENGELOLA PENINGKATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN LUAR NEGERI	TEKNIS
1732	PENGELOLA PENUNJANG KARIR MAHASISWA	TEKNIS
1733	PENGELOLA PENYAJIAN DAN LAYANAN EDUKASI	TEKNIS
1734	PENGELOLA PENYAKIT TIDAK MENULAR(PTM)	TEKNIS
1735	PENGELOLA PENYALURAN DAN PENEMPATAN KERJA PENYANDANG CACAT DAN LANSIA	TEKNIS
1736	PENGELOLA PENYALURAN INVESTASI	TEKNIS
1737	PENGELOLA PENYALURAN PINJAMAN DAN HIBAH	TEKNIS
1738	PENGELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN	TEKNIS
1739	PENGELOLA PENYELENGGARAAN DIKLAT	TEKNIS
1740	PENGELOLA PENYELENGGARAAN MEDIA ELEKTRONIK	TEKNIS
1741	PENGELOLA PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH	TEKNIS
1742	PENGELOLA PENYELESAIAN HASIL PENGAWASAN	TEKNIS
1743	PENGELOLA PENYIAP BAHAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN KELEMBAGAAN PETANI	TEKNIS
1744	PENGELOLA PENYUSUNAN BAHAN PEMBINAAN TEKNIS PENGUKURAN DAN PEMETAAN	TEKNIS
1745	PENGELOLA PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN	TEKNIS
1746	PENGELOLA PENYUSUNAN RENCANA DAN PROGRAM	TEKNIS
1747	PENGELOLA PERANGKAT KECAMATAN	TEKNIS
1748	PENGELOLA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	TEKNIS
1749	PENGELOLA PERBENDAHARAAN DAN PELAYANAN	TEKNIS
1750	PENGELOLA PERBENGKELAN DAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	TEKNIS
1751	PENGELOLA PERBUKUAN PENDIDIKAN	TEKNIS
1752	PENGELOLA PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	TEKNIS
1753	PENGELOLA PERENCANAAN DAN PELAPORAN	TEKNIS
1754	PENGELOLA PERENCANAAN DAN PELAPORAN USAHATANI	TEKNIS
1755	PENGELOLA PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN	TEKNIS

NO	NAMA JABATAN	RUMPUT
1756	PENGELOLA PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENINGKATAN KUALIFIKASI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	TEKNIS
1757	PENGELOLA PERENCANAAN TEKNIS TATA BANGUNAN	TEKNIS
1758	PENGELOLA PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, BUDAYA DAN PARIWISATA	TEKNIS
1759	PENGELOLA PERHUTANAN SOSIAL DAN ANEKA USAHA	TEKNIS
1760	PENGELOLA PERIJINAN ANGKUTAN JALAN	TEKNIS
1761	PENGELOLA PERIJINAN USAHA PERTAMBANGAN	TEKNIS
1762	PENGELOLA PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN BADAN USAHA DAERAH	TEKNIS
1763	PENGELOLA PERIZINAN	TEKNIS
1764	PENGELOLA PERJALANAN DINAS	TEKNIS
1765	PENGELOLA PERKARA	TEKNIS
1766	PENGELOLA PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN	TEKNIS
1767	PENGELOLA PERLINDUNGAN SOSIAL	TEKNIS
1768	PENGELOLA PERLINDUNGAN TANAMAN DAN PENGELOLAAN HASIL PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN	TEKNIS
1769	PENGELOLA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN	TEKNIS
1770	PENGELOLA PERMODALAN DAN ANEKA USAHA PERHUTANAN SOSIAL	TEKNIS
1771	PENGELOLA PERMODALAN DAN INVESTASI	TEKNIS
1772	PENGELOLA PERMODALAN KOPERASI DAN UMKM	TEKNIS
1773	PENGELOLA PERMODALAN USAHA PERKEBUNAN	TEKNIS
1774	PENGELOLA PERPARKIRAN	TEKNIS
1775	PENGELOLA PERPUSTAKAAN	TEKNIS
1776	PENGELOLA PERSIDANGAN	TEKNIS
1777	PENGELOLA PERTAMBANGAN ENERGI DAN LINGKUNGAN HIDUP	TEKNIS
1778	PENGELOLA PERTANAHAN	TEKNIS
1779	PENGELOLA PERTANIAN DAN KELAUTAN	TEKNIS
1780	PENGELOLA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	TEKNIS
1781	PENGELOLA PESERTA DIDIK	TEKNIS
1782	PENGELOLA PETERNAKAN	TEKNIS
1783	PENGELOLA PIUTANG NEGARA	TEKNIS
1784	PENGELOLA PNBP	TEKNIS
1785	PENGELOLA POLA PANGAN HARAPAN	TEKNIS
1786	PENGELOLA POLIKLINIK	TEKNIS
1787	PENGELOLA PRODUKSI	TEKNIS
1788	PENGELOLA PROFESI SDM PERTANIAN	TEKNIS
1789	PENGELOLA PROGRAM DAN EVALUASI PENGEMBANGAN PAUDNI	TEKNIS
1790	PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN	TEKNIS
1791	PENGELOLA PROGRAM DAN LAPORAN	TEKNIS
1792	PENGELOLA PROGRAM DUNIA USAHA	TEKNIS
1793	PENGELOLA PROGRAM GIZI	TEKNIS
1794	PENGELOLA PROGRAM IMUNISASI	TEKNIS
1795	PENGELOLA PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN	TEKNIS
1796	PENGELOLA PROGRAM KESEHATAN KELUARGA	TEKNIS
1797	PENGELOLA PROGRAM MINAT, BAKAT, DAN PENALARAN MAHASISWA	TEKNIS
1798	PENGELOLA PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK	TEKNIS
1799	PENGELOLA PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI SDM KEBUDAYAAN	TEKNIS
1800	PENGELOLA PROGRAM PENYULUHAN	TEKNIS
1801	PENGELOLA PROGRAM SERTIFIKASI PENDIDIK	TEKNIS
1802	PENGELOLA PROGRAM STUDI	TEKNIS
1803	PENGELOLA PROMOSI DAN INFORMASI WISATA	TEKNIS
1804	PENGELOLA PROSES PENYENSORAN	TEKNIS
1805	PENGELOLA PTAPD DAN RT/RW SERTA PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA	TEKNIS
1806	PENGELOLA PUSTAKA ELEKTRONIK	TEKNIS
1807	PENGELOLA RAB PEMELIHARAAN SARANA PENGAIRAN	TEKNIS
1808	PENGELOLA REALISASI LAPORAN PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH	TEKNIS
1809	PENGELOLA REHABILITASI DAN PELAYANAN SOSIAL	TEKNIS
1810	PENGELOLA REHABILITASI SOSIAL	TEKNIS
1811	PENGELOLA REKAYASA LALU LINTAS	TEKNIS
1812	PENGELOLA RENCANA ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DAN LINGKUNGAN HIDUP	TEKNIS
1813	PENGELOLA RENCANA KEPEGAWAIAN KEUANGAN DAN POLDAGRI	TEKNIS
1814	PENGELOLA RENCANA PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN	TEKNIS
1815	PENGELOLA RENCANA PEMERINTAHAN UMUM	TEKNIS
1816	PENGELOLA RENCANA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	TEKNIS
1817	PENGELOLA RENCANA PENELITIAN PENGEMBANGAN	TEKNIS
1818	PENGELOLA RENCANA PENGENDALIAN	TEKNIS
1819	PENGELOLA RENCANA SOSIAL DAN KESEHATAN	TEKNIS
1820	PENGELOLA RENCANA TATA RUANG DAN PERHUBUNGAN	TEKNIS
1821	PENGELOLA RETRIBUSI TERMINAL	TEKNIS
1822	PENGELOLA RUJUKAN KESEHATAN	TEKNIS
1823	PENGELOLA RUMAH POTONG HEWAN	TEKNIS
1824	PENGELOLA SAMPAH	TEKNIS
1825	PENGELOLA SAMPEL PENGUJIAN	TEKNIS
1826	PENGELOLA SARANA ANGKUTAN	TEKNIS
1827	PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA KANTOR	TEKNIS
1828	PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA PAUD	TEKNIS
1829	PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA PEMAKAMAN UMUM	TEKNIS
1830	PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	TEKNIS

NO	NAMA JABATAN	RUMPUT
1831	PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DASAR	TEKNIS
1832	PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN MENENGAH	TEKNIS
1833	PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA PNFI	TEKNIS
1834	PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA SDA	TEKNIS
1835	PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA TAMAN	TEKNIS
1836	PENGELOLA SARANA IPTEK	TEKNIS
1837	PENGELOLA SARANA KESEHATAN LINGKUNGAN	TEKNIS
1838	PENGELOLA SARANA KURSUS DAN PELATIHAN	TEKNIS
1839	PENGELOLA SARANA OLAHRAGA	TEKNIS
1840	PENGELOLA SARANA OPERASI	TEKNIS
1841	PENGELOLA SARANA PEMBIBITAN DAN PENGHIJAUAN	TEKNIS
1842	PENGELOLA SARANA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ESDM	TEKNIS
1843	PENGELOLA SARANA PENYELIDIKAN GEOLOGI	TEKNIS
1844	PENGELOLA SARANA PERINDUSTRIAN	TEKNIS
1845	PENGELOLA SARANA PRASARANA RUMAH TANGGA DINAS	TEKNIS
1846	PENGELOLA SARANA WISATA	TEKNIS
1847	PENGELOLA SENGKETA KONFLIK PERTANAHAN	TEKNIS
1848	PENGELOLA SERAH SIMPAN KCKR	TEKNIS
1849	PENGELOLA SERTIFIKASI	TEKNIS
1850	PENGELOLA SERTIFIKASI DESAIN TEKNIS PERLENGKAPAN JALAN	TEKNIS
1851	PENGELOLA SERTIFIKASI KOMPETENSI PENILAI ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS	TEKNIS
1852	PENGELOLA SETELMEN INVESTASI	TEKNIS
1853	PENGELOLA SIAK	TEKNIS
1854	PENGELOLA SIM PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU	TEKNIS
1855	PENGELOLA SIMPEG	TEKNIS
1856	PENGELOLA SISTEM DAN JARINGAN	TEKNIS
1857	PENGELOLA SISTEM INFORMASI KEPENDUDUKAN	TEKNIS
1858	PENGELOLA SISTEM INFORMASI SARANA DAN PRASARANA JALAN	TEKNIS
1859	PENGELOLA SISTEM MANAJEMEN JALAN	TEKNIS
1860	PENGELOLA SISTEM PELAYANAN ANGKUTAN	TEKNIS
1861	PENGELOLA SISTEM PEMBELAJARAN	TEKNIS
1862	PENGELOLA SITUS/WEB	TEKNIS
1863	PENGELOLA SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB	TEKNIS
1864	PENGELOLA STATISTIK PERIKANAN	TEKNIS
1865	PENGELOLA SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH	TEKNIS
1866	PENGELOLA SUPERVISI DAN FASILITASI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN	TEKNIS
1867	PENGELOLA SURAT	TEKNIS
1868	PENGELOLA SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN	TEKNIS
1869	PENGELOLA SURVEYOR BERLISENSI	TEKNIS
1870	PENGELOLA TAKAH	TEKNIS
1871	PENGELOLA TANAH NEGARA, TANAH TERLANTAR DAN TANAH KRITIS	TEKNIS
1872	PENGELOLA TANAH NON PERTANIAN	TEKNIS
1873	PENGELOLA TANAH PERTANIAN	TEKNIS
1874	PENGELOLA TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	TEKNIS
1875	PENGELOLA TATA BANGUNAN PEMERINTAH	TEKNIS
1876	PENGELOLA TATA BANGUNAN UMUM	TEKNIS
1877	PENGELOLA TATA GUNA LAHAN, AIR, SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN	TEKNIS
1878	PENGELOLA TATA RUANG	TEKNIS
1879	PENGELOLA TATA RUANG DAN KONSERVASI KAWASAN	TEKNIS
1880	PENGELOLA TATA RUANG DAN TATA GUNA BANGUNAN	TEKNIS
1881	PENGELOLA TEACHING FACTORY	TEKNIS
1882	PENGELOLA TEKNIK KONSTRUKSI BERKELANJUTAN	TEKNIS
1883	PENGELOLA TEKNIS BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ASDP	TEKNIS
1884	PENGELOLA TEKNIS SURVEY JARINGAN PRASARANA DAN PELAYANAN	TEKNIS
1885	PENGELOLA TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN	TEKNIS
1886	PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI	TEKNIS
1887	PENGELOLA TEKNOLOGI PASCAPANEN	TEKNIS
1888	PENGELOLA TEKNOLOGI PENGENDALIAN OPT	TEKNIS
1889	PENGELOLA TEKNOLOGI PERBENIHAN	TEKNIS
1890	PENGELOLA TEKSTUAL DAN SPASIAL	TEKNIS
1891	PENGELOLA TEMPAT TAHANAN	TEKNIS
1892	PENGELOLA TEMPAT UJI KOMPETENSI	TEKNIS
1893	PENGELOLA TENAGA KEPENDIDIKAN	TEKNIS
1894	PENGELOLA TENAGA TEKNIS SLTP	TEKNIS
1895	PENGELOLA TENAGA TEKNIS TK/SD	TEKNIS
1896	PENGELOLA TERJEMAHAN DAN KERJASAMA	TEKNIS
1897	PENGELOLA TERMINAL	TEKNIS
1898	PENGELOLA TERMINAL AGRIBISNIS DAN PENDATAAN DISTRIBUSI KOMODITI PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	TEKNIS
1899	PENGELOLA TERNAK UNGGAS	TEKNIS
1900	PENGELOLA TIBUMTRANMAS	TEKNIS
1901	PENGELOLA TOPOONIMI	TEKNIS
1902	PENGELOLA TRANSFER	TEKNIS
1903	PENGELOLA TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TGR	TEKNIS
1904	PENGELOLA TV DAN RADIO	TEKNIS
1905	PENGELOLA UNIT LAYANAN PENGADAAN	TEKNIS
1906	PENGELOLA UNIT PRODUKSI	TEKNIS

NO	NAMA JABATAN	RUMPUT
1907	PENGELOLA UPTD PASAR HEWAN DAN RPH	TEKNIS
1908	PENGELOLA URUSAN AGAMA	TEKNIS
1909	PENGELOLA URUSAN KESEHATAN MASYARAKAT	TEKNIS
1910	PENGELOLA USAHA ANGKUTAN	TEKNIS
1911	PENGELOLA USAHA KEPARIWISATAAN	TEKNIS
1912	PENGELOLA USAHA PEMASARAN DAN PROMOSI WISATA	TEKNIS
1913	PENGELOLA USAHA PEMOTONGAN TERNAK/UNGGAS DAN LALU LINTAS DAGING	TEKNIS
1914	PENGELOLA USAHA TANI PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN	TEKNIS
1915	PENGELOLA USAHA TANI PETERNAKAN DAN KEHEWANAN	TEKNIS
1916	PENGELOLA WAJIB PAJAK/RETRIBUSI DAERAH	TEKNIS
1917	PENGELOLA WISMA	TEKNIS
1918	PENGELOLA/KOORDINATOR LABOBORATORIUM	TEKNIS
1919	PENGEMBANG DIALOG DAN WAWASAN MULTIKULTURAL	TEKNIS
1920	PENGEMBANG FUNGSI DAN PERAN BAHASA	TEKNIS
1921	PENGEMBANG KOLEKSI MUSEUM	TEKNIS
1922	PENGEMBANG KURIKULUM	TEKNIS
1923	PENGEMBANG KURIKULUM DAN PERBUKUAN PENDIDIKAN MENENGAH	TEKNIS
1924	PENGEMBANG METODE PENYULUHAN	TEKNIS
1925	PENGEMBANG MODEL PENILAIAN PENDIDIKAN	TEKNIS
1926	PENGEMBANG MUTU AKADEMIK	TEKNIS
1927	PENGEMBANG PERBUKUAN	TEKNIS
1928	PENGEMBANG POTENSI SISWA/SANTRI/MAHASISWA	TEKNIS
1929	PENGEMBANG PROFESI DOSEN	TEKNIS
1930	PENGEMBANG PROGRAM PENYULUHAN	TEKNIS
1931	PENGEMBANG PROGRAM STUDI	TEKNIS
1932	PENGEMBANG SARANA DAN PRASARANA	TEKNIS
1933	PENGEMBANG SISTEM AKREDITASI DAN SERTIFIKASI LINGKUNGAN	TEKNIS
1934	PENGEMBANG SISTEM AKREDITASI DAN SERTIFIKASI PRODUK, PELATIHAN DAN PERSONIL	TEKNIS
1935	PENGEMBANG SISTEM AKREDITASI DAN SERTIFIKASI PROLASTO	TEKNIS
1936	PENGEMBANG SISTEM AKREDITASI LAB KALIBRASI	TEKNIS
1937	PENGEMBANG SISTEM AKREDITASI LABORATORIUM KALIBRASI	TEKNIS
1938	PENGEMBANG SISTEM AKREDITASI LABORATORIUM PENGUJI	TEKNIS
1939	PENGEMBANG SISTEM UJIAN, TES, DAN PENGUKURAN	TEKNIS
1940	PENGEMBANG TENAGA KEPENDIDIKAN	TEKNIS
1941	PENGENDALI JARINGAN KOMUNIKASI	TEKNIS
1942	PENGENDALI TEKNOLOGI INFORMASI	TEKNIS
1943	PENGEVALUASI AKADEMIK	TEKNIS
1944	PENGEVALUASI HASIL KEGIATAN BANTUAN SOSIAL MASYARAKAT	TEKNIS
1945	PENGEVALUASI KEBIJAKAN PENELITIAN	TEKNIS
1946	PENGEVALUASI KEBIJAKAN PENGABDIAN MASYARAKAT	TEKNIS
1947	PENGEVALUASI KEBIJAKAN PUBLIKASI ILMIAH	TEKNIS
1948	PENGEVALUASI KETERTELUSURAN STANDAR FISIK	TEKNIS
1949	PENGEVALUASI PENDAPATAN DAN BELANJA	TEKNIS
1950	PENGEVALUASI PERKEMBANGAN BUMD	TEKNIS
1951	PENGEVALUASI PROGRAM DAN KINERJA	TEKNIS
1952	PENGEVALUASI PROSES BIDANG LINGKUNGAN	TEKNIS
1953	PENGEVALUASI PROSES BIDANG PRODUK DAN PERSONEL	TEKNIS
1954	PENGEVALUASI RENCANA	TEKNIS
1955	PENGEVALUASI SISTEM AKREDITASI LAB PENGUJI	TEKNIS
1956	PENGEVALUASI SISTEM AKREDITASI LABORATORIUM KALIBRASI	TEKNIS
1957	PENGEVALUASI SISTEM AKREDITASI LEMBAGA INSPEKSI DAN LAB MEDIK	TEKNIS
1958	PENGEVALUASI SISTEM AKREDITASI LEMBAGA INSPEKSI DAN LABORATORIUM MEDIK	TEKNIS
1959	PENGEVALUASI STANDARD PELAYANAN MINIMUM ANGKUTAN	TEKNIS
1960	PENGEVALUASI TENAGA KEPENDIDIKAN	TEKNIS
1961	PENGEVALUASI UJI BANDING	TEKNIS
1962	PENGKAJI BAHASA DAN SASTRA	TEKNIS
1963	PENGKAJI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA	TEKNIS
1964	PENGKAJI PELINDUNGAN SITUS MANUSIA PURBA	TEKNIS
1965	PENGKAJI PENGEMBANGAN SITUS MANUSIA PURBA	TEKNIS
1966	PENGOLAH BAHAN KOLEKSI DAN MUSEUM	TEKNIS
1967	PENGOLAH BAHAN LAPORAN HASIL AUDIT	TEKNIS
1968	PENGOLAH BAHAN PERENCANAAN	TEKNIS
1969	PENGOLAH BAHAN PERENCANAAN KETENAGAAN	TEKNIS
1970	PENGOLAH BAHAN REGISTRASI DAN SERTIFIKASI	TEKNIS
1971	PENGOLAH BAHAN UNTUK RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA	TEKNIS
1972	PENGOLAH BAKUAN KOMPETENSI	TEKNIS
1973	PENGOLAH BIAYA SENSOR	TEKNIS
1974	PENGOLAH DAFTAR GAJI	TEKNIS
1975	PENGOLAH DAMPAK PENOMENA ALAM (KEKERINGAN & KEBANJIRAN) REKOMONDASI DAN PEREDARAN PESTISIDA	TEKNIS
1976	PENGOLAH DATA	TEKNIS
1977	PENGOLAH DATA ADMINISTRASI PEMERIKSAAN	TEKNIS
1978	PENGOLAH DATA ANGGARAN BELANJA NEGARA	TEKNIS
1979	PENGOLAH DATA ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN	TEKNIS
1980	PENGOLAH DATA APLIKASI DAN PENGELOLAAN DATA SISTEM KEUANGAN	TEKNIS
1981	PENGOLAH DATA BAGAN AKUN STANDAR	TEKNIS
1982	PENGOLAH DATA BARANG HASIL PENINDAKAN	TEKNIS

NO	NAMA JABATAN	RUMPUT
1983	PENGOLAH DATA BEASISWA DAN BANTUAN	TEKNIS
1984	PENGOLAH DATA BERKAS SENGKETA	TEKNIS
1985	PENGOLAH DATA BIMBINGAN AKUNTANSI	TEKNIS
1986	PENGOLAH DATA BIMBINGAN PELAKSANAAN ANGGARAN	TEKNIS
1987	PENGOLAH DATA BIMBINGAN PENDATAAN, PENILAIAN, DAN PENGENAAN	TEKNIS
1988	PENGOLAH DATA BIMBINGAN PENGAWASAN	TEKNIS
1989	PENGOLAH DATA BIMBINGAN PENILAIAN	TEKNIS
1990	PENGOLAH DATA BIMBINGAN TEKNIS ANGGARAN	TEKNIS
1991	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI INKUBATOR BISNIS	TEKNIS
1992	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI NILAI TANAH	TEKNIS
1993	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI PENILAIAN	TEKNIS
1994	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI TEACHING FACTORY	TEKNIS
1995	PENGOLAH DATA DANA REHABILITASI FASILITAS PENDIDIKAN	TEKNIS
1996	PENGOLAH DATA DISTRIBUSI PITA CUKAI	TEKNIS
1997	PENGOLAH DATA DUKUNGAN OPERASI NARKOTIKA	TEKNIS
1998	PENGOLAH DATA DUKUNGAN PENGAWASAN	TEKNIS
1999	PENGOLAH DATA DUKUNGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN	TEKNIS
2000	PENGOLAH DATA EKONOMI MAKRO	TEKNIS
2001	PENGOLAH DATA EKSTENSIFIKASI	TEKNIS
2002	PENGOLAH DATA FASILITAS DUKUNGAN PEMERINTAH	TEKNIS
2003	PENGOLAH DATA FASILITASI KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN	TEKNIS
2004	PENGOLAH DATA HASIL PENYENSORAN	TEKNIS
2005	PENGOLAH DATA HUBUNGAN PERWAKILAN LUAR NEGERI	TEKNIS
2006	PENGOLAH DATA INFORMASI BLU	TEKNIS
2007	PENGOLAH DATA INFORMASI DAN HUKUM	TEKNIS
2008	PENGOLAH DATA INTELLIJEN	TEKNIS
2009	PENGOLAH DATA INVESTASI PEMERINTAH	TEKNIS
2010	PENGOLAH DATA INVESTIGASI INTERNAL	TEKNIS
2011	PENGOLAH DATA KEBERATAN DAN BANDING	TEKNIS
2012	PENGOLAH DATA KEBIJAKAN APBN	TEKNIS
2013	PENGOLAH DATA KEBIJAKAN AUDIT	TEKNIS
2014	PENGOLAH DATA KEBIJAKAN BMN	TEKNIS
2015	PENGOLAH DATA KEBIJAKAN CUKAI	TEKNIS
2016	PENGOLAH DATA KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBIAYAAN	TEKNIS
2017	PENGOLAH DATA KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS	TEKNIS
2018	PENGOLAH DATA KEBIJAKAN DANA ALOKASI UMUM	TEKNIS
2019	PENGOLAH DATA KEBIJAKAN DANA BAGI HASIL	TEKNIS
2020	PENGOLAH DATA KEBIJAKAN DANA PENDIDIKAN	TEKNIS
2021	PENGOLAH DATA KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO	TEKNIS
2022	PENGOLAH DATA KEBIJAKAN HIBAH DAERAH	TEKNIS
2023	PENGOLAH DATA KEBIJAKAN INTELLIJEN	TEKNIS
2024	PENGOLAH DATA KEBIJAKAN INVESTASI	TEKNIS
2025	PENGOLAH DATA KEBIJAKAN KEUANGAN INKLUSIF	TEKNIS
2026	PENGOLAH DATA KEBIJAKAN KEWAJIBAN KONTINJENSI	TEKNIS
2027	PENGOLAH DATA KEBIJAKAN KLASIFIKASI BARANG	TEKNIS
2028	PENGOLAH DATA KEBIJAKAN KND	TEKNIS
2029	PENGOLAH DATA KEBIJAKAN KREDIT PROGRAM DAN INVESTASI LAINNYA	TEKNIS
2030	PENGOLAH DATA KEBIJAKAN LELANG	TEKNIS
2031	PENGOLAH DATA KEBIJAKAN PAJAK	TEKNIS
2032	PENGOLAH DATA KEBIJAKAN PDRD	TEKNIS
2033	PENGOLAH DATA KEBIJAKAN PELAKSANAAN ANGGARAN	TEKNIS
2034	PENGOLAH DATA KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	TEKNIS
2035	PENGOLAH DATA KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PERUBAHAN IKLIM	TEKNIS
2036	PENGOLAH DATA KEBIJAKAN PENERIMAAN	TEKNIS
2037	PENGOLAH DATA KEBIJAKAN PENERUSAN PINJAMAN	TEKNIS
2038	PENGOLAH DATA KEBIJAKAN PENGANGGARAN	TEKNIS
2039	PENGOLAH DATA KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLU	TEKNIS
2040	PENGOLAH DATA KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN	TEKNIS
2041	PENGOLAH DATA KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PASAR SBSN	TEKNIS
2042	PENGOLAH DATA KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PASAR SUN	TEKNIS
2043	PENGOLAH DATA KEBIJAKAN PENILAIAN	TEKNIS
2044	PENGOLAH DATA KEBIJAKAN PENINDAKAN	TEKNIS
2045	PENGOLAH DATA KEBIJAKAN PINJAMAN DAN HIBAH	TEKNIS
2046	PENGOLAH DATA KEBIJAKAN PIUTANG NEGARA	TEKNIS
2047	PENGOLAH DATA KEBIJAKAN PNBP	TEKNIS
2048	PENGOLAH DATA KEBIJAKAN PNBP LABA BUMN	TEKNIS
2049	PENGOLAH DATA KEBIJAKAN PNBP MINYAK DAN GAS BUMI	TEKNIS
2050	PENGOLAH DATA KEBIJAKAN PORTOFOLIO DAN RISIKO LIKUIDITAS	TEKNIS
2051	PENGOLAH DATA KEBIJAKAN PORTOFOLIO DAN RISIKO PEMBIAYAAN	TEKNIS
2052	PENGOLAH DATA KEBIJAKAN PROFESI LELANG	TEKNIS
2053	PENGOLAH DATA KEBIJAKAN REMUNERASI	TEKNIS
2054	PENGOLAH DATA KELEMBAGAAN	TEKNIS
2055	PENGOLAH DATA KEUANGAN DAN PASAR SUN	TEKNIS
2056	PENGOLAH DATA KINERJA INVESTASI, PENERUSAN PINJAMAN DAN KREDIT PROGRAM	TEKNIS
2057	PENGOLAH DATA KINERJA PENGANGGARAN	TEKNIS
2058	PENGOLAH DATA KOMPETENSI TENAGA PENGAJAR	TEKNIS
2059	PENGOLAH DATA KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN REKENING PEMERINTAH	TEKNIS
2060	PENGOLAH DATA KONSOLIDASI REKENING PEMERINTAH	TEKNIS

NO	NAMA JABATAN	RUMPUT
2061	PENGOLAH DATA LAPORAN INVESTASI, PENERUSAN PINJAMAN DAN KREDIT PROGRAM	TEKNIS
2062	PENGOLAH DATA LAPORAN KAS	TEKNIS
2063	PENGOLAH DATA LAPORAN KEUANGAN	TEKNIS
2064	PENGOLAH DATA LAPORAN KEUANGAN REKENING PEMERINTAH	TEKNIS
2065	PENGOLAH DATA LAPORAN KEUANGAN TRANSFER DAERAH	TEKNIS
2066	PENGOLAH DATA LAPORAN NERACA	TEKNIS
2067	PENGOLAH DATA LAPORAN PENILAIAN	TEKNIS
2068	PENGOLAH DATA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA	TEKNIS
2069	PENGOLAH DATA LAPORAN REALISASI ANGGARAN	TEKNIS
2070	PENGOLAH DATA MANAJEMEN BEASISWA	TEKNIS
2071	PENGOLAH DATA MANAJEMEN DANA RISET	TEKNIS
2072	PENGOLAH DATA MONEV DANA REHABILITASI FASILITAS PENDIDIKAN	TEKNIS
2073	PENGOLAH DATA MONEV HASIL TES	TEKNIS
2074	PENGOLAH DATA MONEV KEBIJAKAN PDRD	TEKNIS
2075	PENGOLAH DATA MONEV PELAKSANAAN ANGGARAN	TEKNIS
2076	PENGOLAH DATA MONEV PENDANAAN DAERAH	TEKNIS
2077	PENGOLAH DATA MONEV PENYALURAN BEASISWA	TEKNIS
2078	PENGOLAH DATA OPTIMALISASI KAS BLU	TEKNIS
2079	PENGOLAH DATA PELAYANAN	TEKNIS
2080	PENGOLAH DATA PEMANTAUAN SISTEM KEUANGAN	TEKNIS
2081	PENGOLAH DATA PEMBAYARAN PERHITUNGAN FIHAK KETIGA DAN PENYELESAIAN TGR	TEKNIS
2082	PENGOLAH DATA PEMBINAAN BLU	TEKNIS
2083	PENGOLAH DATA PEMBINAAN KELEMBAGAAN INVESTASI	TEKNIS
2084	PENGOLAH DATA PEMBINAAN PELAKSANAAN ANGGARAN	TEKNIS
2085	PENGOLAH DATA PEMBINAAN PENILAI	TEKNIS
2086	PENGOLAH DATA PENDAPATAN DAN EKONOMI MAKRO	TEKNIS
2087	PENGOLAH DATA PENDATAAN, PEMETAAN, DAN PENILAIAN	TEKNIS
2088	PENGOLAH DATA PENELITIAN BIDANG IPSK	TEKNIS
2089	PENGOLAH DATA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BLU	TEKNIS
2090	PENGOLAH DATA PENGANGGARAN	TEKNIS
2091	PENGOLAH DATA PENGELOLAAN KEUANGAN	TEKNIS
2092	PENGOLAH DATA PENGELOLAAN PEMBIAYAAN	TEKNIS
2093	PENGOLAH DATA PENGELOLAAN PORTOFOLIO SUN	TEKNIS
2094	PENGOLAH DATA PENGEMBANGAN KAPASITAS KEUANGAN DAERAH	TEKNIS
2095	PENGOLAH DATA PENGEMBANGAN KAPASITAS PERBENDAHARAAN	TEKNIS
2096	PENGOLAH DATA PENGEMBANGAN MODEL EKONOMI MAKRO	TEKNIS
2097	PENGOLAH DATA PENGEMBANGAN PROGRAM AKADEMIS	TEKNIS
2098	PENGOLAH DATA PENGEMBANGAN SISTEM PERBENDAHARAAN	TEKNIS
2099	PENGOLAH DATA PENGUKURAN DAN PEMETAAN	TEKNIS
2100	PENGOLAH DATA PENINDAKAN DAN SARANA OPERASI	TEKNIS
2101	PENGOLAH DATA PENYULUHAN DAN LAYANAN INFORMASI	TEKNIS
2102	PENGOLAH DATA PERATURAN BLU	TEKNIS
2103	PENGOLAH DATA PERATURAN INVESTASI	TEKNIS
2104	PENGOLAH DATA PERBENDAHARAAN	TEKNIS
2105	PENGOLAH DATA PERENCANAAN ANGGARAN	TEKNIS
2106	PENGOLAH DATA PERENCANAAN BISNIS	TEKNIS
2107	PENGOLAH DATA PERENCANAAN DUKUNGAN PEMERINTAH	TEKNIS
2108	PENGOLAH DATA PERENCANAAN PENGANGGARAN	TEKNIS
2109	PENGOLAH DATA PERJANJIAN PENERUSAN PINJAMAN	TEKNIS
2110	PENGOLAH DATA PERKARA DAN PUTUSAN	TEKNIS
2111	PENGOLAH DATA PROGRAM BEASISWA	TEKNIS
2112	PENGOLAH DATA RANCANGAN NASKAH SOAL	TEKNIS
2113	PENGOLAH DATA RISIKO INVESTASI, PENERUSAN PINJAMAN DAN KREDIT PROGRAM	TEKNIS
2114	PENGOLAH DATA RISIKO KEUANGAN NEGARA	TEKNIS
2115	PENGOLAH DATA SATUAN PENGAWAS INTERNAL	TEKNIS
2116	PENGOLAH DATA SELEKSI DAN PENEMPATAN BEASISWA	TEKNIS
2117	PENGOLAH DATA SETELMEN TRANSAKSI	TEKNIS
2118	PENGOLAH DATA SISTEM AKUNTANSI BENDAHARA UMUM NEGARA DAN UNIT KHUSUS	TEKNIS
2119	PENGOLAH DATA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI	TEKNIS
2120	PENGOLAH DATA SISTEM INFORMASI PELAKSANAAN ANGGARAN	TEKNIS
2121	PENGOLAH DATA SISTEM INFORMASI PERBENDAHARAAN	TEKNIS
2122	PENGOLAH DATA STANDAR BIAYA	TEKNIS
2123	PENGOLAH DATA TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN	TEKNIS
2124	PENGOLAH LAPORAN DAN BAHAN PEMBINAAN PPAT	TEKNIS
2125	PENGOLAH SARANA DAN PRASARANA PENGAIIRAN	TEKNIS
2126	PENGUJI BAHAN DAN BANGUNAN	TEKNIS
2127	PENGUJI COBA PERBIBITAN DAN PERBENIHAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	TEKNIS
2128	PENGUJI HIPERKES	TEKNIS
2129	PENGUJI LABORATORIUM TANAH, ASPAL DAN BETON	TEKNIS
2130	PENGUJI NAUTIKA	TEKNIS
2131	PENILAI MUTU PRODUK	TEKNIS
2132	PENILAI PELAYANAN KEMETROLOGIAN	TEKNIS
2133	PENILAI PERBEKALAN	TEKNIS
2134	PENILAI PROPERTI	TEKNIS
2135	PENILAI TEKNIKA	TEKNIS
2136	PENYIDIK PIDANA UMUM	TEKNIS

NO	NAMA JABATAN	RUMPUT
2137	PENYULUH BAHASA	TEKNIS
2138	PENYULUH BENCANA	TEKNIS
2139	PENYULUH BIMBINGAN/KONSELING BAGI EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL	TEKNIS
2140	PENYULUH HAM	TEKNIS
2141	PENYULUH INFORMATIKA	TEKNIS
2142	PENYULUH K3	TEKNIS
2143	PENYULUH KAWASAN TRANSMIGRASI	TEKNIS
2144	PENYULUH KEAMANAN LAUT	TEKNIS
2145	PENYULUH KEAMANAN MASYARAKATAN	TEKNIS
2146	PENYULUH KEARSIPAN	TEKNIS
2147	PENYULUH KELUARGA PRA SEJAHTERA DAN KELUARGA SEJAHTERA	TEKNIS
2148	PENYULUH KEMASYARAKATAN	TEKNIS
2149	PENYULUH KEPEMUDAAN	TEKNIS
2150	PENYULUH KESEHATAN DAN PENCEGAHAN HIV/AIDS, IMS DAN BAHAYA NAFZA	TEKNIS
2151	PENYULUH KOPERASI	TEKNIS
2152	PENYULUH LEMBAGA KEUANGAN MIKRO	TEKNIS
2153	PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	TEKNIS
2154	PENYULUH OBAT DAN MAKANAN	TEKNIS
2155	PENYULUH OLAH RAGA	TEKNIS
2156	PENYULUH PANGAN	TEKNIS
2157	PENYULUH PELESTARIAN NILAI BUDAYA DAN TRADISI	TEKNIS
2158	PENYULUH PEMBANGUNAN DAERAH TERPENCIL	TEKNIS
2159	PENYULUH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN	TEKNIS
2160	PENYULUH PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	TEKNIS
2161	PENYULUH PEMILIHAN UMUM	TEKNIS
2162	PENYULUH PENANGANAN MASALAH SOSIAL	TEKNIS
2163	PENYULUH PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN ANAK	TEKNIS
2164	PENYULUH PEREKONOMIAN	TEKNIS
2165	PENYULUH PERKEBUNAN	TEKNIS
2166	PENYULUH PERPUSTAKAAN	TEKNIS
2167	PENYULUH PKK	TEKNIS
2168	PENYULUH SAR	TEKNIS
2169	PENYULUH STATISTIK	TEKNIS
2170	PENYULUH TENAGA KERJA	TEKNIS
2171	PENYULUH TRANSMIGRASI	TEKNIS
2172	PENYULUH USAHA MANDIRI DAN TTG / TPK	TEKNIS
2173	PENYULUH WISATA	TEKNIS
2174	PENYUNTING NASKAH PENERBITAN BUKU	TEKNIS
2175	PERANCANG GRAFIS	TEKNIS
2176	PERANCANG SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN	TEKNIS
2177	PERANCANG SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	TEKNIS
2178	PERANCANG SISTEM INFORMASI PENILAIAN PENDIDIKAN	TEKNIS
2179	PRANATA ACARA	TEKNIS
2180	PRANATA ALAT PERSANDIAN	TEKNIS
2181	PRANATA BARANG DAN JASA	TEKNIS
2182	PRANATA BENCANA	TEKNIS
2183	PRANATA BINA PROFESI	TEKNIS
2184	PRANATA DAS	TEKNIS
2185	PRANATA DIKLAT	TEKNIS
2186	PRANATA FOTOGRAFI	TEKNIS
2187	PRANATA KAWASAN KONSERVASI	TEKNIS
2188	PRANATA KEARSIPAN	TEKNIS
2189	PRANATA KETRANSIMGRASIAN	TEKNIS
2190	PRANATA KOPERASI	TEKNIS
2191	PRANATA LABORATORIUM KEARSIPAN	TEKNIS
2192	PRANATA LABORATORIUM PEREKAYASAAN	TEKNIS
2193	PRANATA LABORATORIUM SUMBER ENERGI	TEKNIS
2194	PRANATA LAPORAN KEUANGAN (PETUGAS SAI)	TEKNIS
2195	PRANATA LAPORAN KEUANGAN/PETUGAS SAI	TEKNIS
2196	PRANATA PENGELOLAAN LEGER JALAN	TEKNIS
2197	PRANATA PENGEMBANGAN BIBIT TANAMAN HUTAN/ PERKEBUNAN	TEKNIS
2198	PRANATA PROMOSI	TEKNIS
2199	PRANATA REPRODUKSI ARSIP	TEKNIS
2200	PRANATA RESTORASI ARSIP	TEKNIS
2201	PRANATA SARANA DAN PRASARANA DIKLAT	TEKNIS
2202	PRANATA SISTEM INFORMASI DIKLAT APARATUR (SIDA)	TEKNIS
2203	PRANATA STANDAR KESELAMATAN	TEKNIS
2204	PRANATA TAMAN MAKAM PAHLAWAN (TMP),	TEKNIS
2205	TEKNISI AIR	TEKNIS
2206	TEKNISI ALAT ELEKTRO DAN ALAT KOMUNIKASI	TEKNIS
2207	TEKNISI GEDUNG/BANGUNAN	TEKNIS
2208	TEKNISI INSTALASI BUDIDAYA	TEKNIS
2209	TEKNISI INSTRUMEN	TEKNIS
2210	TEKNISI JARINGAN INSTALASI	TEKNIS
2211	TEKNISI JARINGAN TIK PENDIDIKAN	TEKNIS
2212	TEKNISI KAPAL	TEKNIS
2213	TEKNISI KONSERVASI	TEKNIS
2214	TEKNISI LABORATORIUM	TEKNIS

NO	NAMA JABATAN	RUMPUT
2215	TEKNISI LABORATORIUM DAN BENGKEL	TEKNIS
2216	TEKNISI LISTRIK DAN JARINGAN	TEKNIS
2217	TEKNISI LISTRIK, TELEPON, AC, DAN LIFT	TEKNIS
2218	TEKNISI MESIN	TEKNIS
2219	TEKNISI NAUTIKA	TEKNIS
2220	TEKNISI PANGGUNG	TEKNIS
2221	TEKNISI PELESTARI CAGAR BUDAYA	TEKNIS
2222	TEKNISI PEMBORAN	TEKNIS
2223	TEKNISI PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA	TEKNIS
2224	TEKNISI PEMERIKSAAN DAN PERAWATAN BANGUNAN DAN JALUR KERETA API	TEKNIS
2225	TEKNISI PEMERIKSAAN DAN PERAWATAN SARANA PERKERETAAPIAN	TEKNIS
2226	TEKNISI PEMETAAN DAN PENGGAMBARAN	TEKNIS
2227	TEKNISI PENGECORAN LOGAM	TEKNIS
2228	TEKNISI PERALATAN DAN MESIN	TEKNIS
2229	TEKNISI PERALATAN KANTOR	TEKNIS
2230	TEKNISI PERALATAN LABORATORIUM RISET KEMASAN	TEKNIS
2231	TEKNISI PERALATAN LABORATORIUM RISET KIMIA	TEKNIS
2232	TEKNISI PERALATAN, LISTRIK DAN ELEKTRONIKA	TEKNIS
2233	TEKNISI PESAWAT	TEKNIS
2234	TEKNISI PRODUKSI	TEKNIS
2235	TEKNISI PRODUKSI MULTIMEDIA DAN WEB	TEKNIS
2236	TEKNISI RANCANG BAGUN	TEKNIS
2237	TEKNISI SANDI BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH	TEKNIS
2238	TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	TEKNIS
2239	TEKNISI SARANA DAN PRASARANA PELABUHAN	TEKNIS
2240	TEKNISI SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN	TEKNIS
2241	TEKNISI SIPIL	TEKNIS
2242	TEKNISI SURVEY ALUR DAN PERAMBUAN SDP	TEKNIS
2243	TEKNISI SURVEY ANGKUTAN JALAN	TEKNIS
2244	TEKNISI SURVEY ANGKUTAN SDP	TEKNIS
2245	TEKNISI SURVEY JARINGAN PRASARANA DAN PELAYANAN TRANSPORTASI JALAN	TEKNIS
2246	TEKNISI SURVEY JARINGAN TRANSPORTASI	TEKNIS
2247	TEKNISI SURVEY LALU LINTAS JALAN	TEKNIS
2248	TEKNISI TEKNIKA	TEKNIS
2249	TEKNISI UJI KOMPETENSI	TEKNIS
2250	VERIFIKATOR ANGGARAN	TEKNIS
2251	VERIFIKATOR BERKAS PERMOHONAN HAK	TEKNIS
2252	VERIFIKATOR DATA LAPORAN KEUANGAN	TEKNIS
2253	VERIFIKATOR KEUANGAN	TEKNIS
2254	VERIFIKATOR PAJAK	TEKNIS
2255	VERIFIKATOR TEKNIS PENDAFTARAN PVT SDG	TEKNIS
2256	KETUA UNIT MULTIMEDIA	TEKNIS/ KOORDINATOR
2257	KETUA UPPM (UNIT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT)	TEKNIS/ KOORDINATOR
2258	KOMANDAN PETUGAS KEAMANAN	TEKNIS/ KOORDINATOR
2259	KONSERVATOR	TEKNIS/ PEMELIHARA
2260	PERAWAT TERNAK	TEKNIS/ PEMELIHARA
2261	PREPARATOR	TEKNIS/ PEMELIHARA
2262	FILOLOG	TEKNIS/ PENGKAJI
2263	PEMANTAU PELAKSANAAN RENCANA UMUM ENERGI	TEKNIS/ PENGAMAT
2264	SURVEYOR PENANGANAN DAMPAK TRANSPORTASI DARAT	TEKNIS/ PENGAMAT
2265	PENILIK JALAN	TEKNIS/ PENGAWAS
2266	PENILIK TELEKOMUNIKASI	TEKNIS/ PENGAWAS
2267	PENGALIH MEDIA	TEKNIS/ PENYUNTING
2268	DESAINER INTERIOR	TEKNIS/ PERANCANG
2269	KARTOGRAFER	TEKNIS/ PERANCANG
2270	LEGISLASI	TEKNIS/ PERANCANG
2271	MONTIR TEKNIKA	TEKNIS/ TEKNISI
2272	PENELITI LABORATORIUM	TEKNIS/ PENELAAH



LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 46 TAHUN 2016

TANGGAL : 11 OKTOBER 2016

IKHTISAR JABATAN, URAIAN TUGAS DAN RUMPUN JABATAN**RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL UMUM PROVINSI RIAU:**

1. ADMINISTRASI
2. OPERASIONAL
3. PELAYANAN
4. TEKNIS

NO.	RUMPUN JABATAN ADMINISTRASI	JUMLAH
1.	NOTULIS	1
2.	PENGADMINISTRASI	94
3.	PENYUSUN	149
	JUMLAH	244

1. NOTULIS (1)**IKHTISAR JABATAN:**

Menyusun hasil notulen rapat, membuat kesimpulan dan resume suatu kegiatan rapat sesuai dengan prosedur yang berlaku agar hasil rapat dapat terdokumentasi dan dapat diinformasikan dengan baik.

URAIAN TUGAS:

- a. Mengumpulkan notulen hasil rapat sesuai dengan prosedur yang berlaku agar hasil rapat dapat terdokumentasi dan dapat diinformasikan dengan baik;
- b. Menganalisis permasalahan yang ada dan menentukan jenis masalah yang harus ditangani sesuai dengan situasi dan kondisi agar hasil rapat dapat terdokumentasi dan dapat diinformasikan dengan baik;
- c. Menyusun resume notulen hasil rapat sesuai prosedur yang berlaku agar hasil rapat dapat terdokumentasi dan dapat diinformasikan dengan baik;
- d. Membuat kesimpulan dari hasil resume notulen rapat sesuai dengan prosedur yang berlaku agar hasil rapat dapat terdokumentasi dan dapat diinformasikan dengan baik;
- e. Menyerahkan hasil notulen rapat dan kesimpulan kepada pimpinan sesuai dengan prosedur yang berlaku agar hasil rapat dapat terdokumentasi dan dapat diinformasikan dengan baik;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.

Yang Termasuk Dalam Jabatan NOTULIS:

1. NOTULIS RAPAT

2. PENGADMINISTRASI (94)**IKHTISAR JABATAN:**

Menerima, mencatat, menyimpan **objek kerja** serta dokumen lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.

URAIAN TUGAS:

- a. Menerima, mencatat, dan menyortir **objek kerja**, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian.
- b. Memberi lembar pengantar pada **objek kerja**, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian;

- c. Mendokumentasikan **objek kerja** sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.

Yang Termasuk Dalam Jabatan PENGADMINISTRASI:

1. PENGADMINISTRASI AKADEMIK
2. PENGADMINISTRASI AKREDITASI LABORATORIUM KALIBRASI
3. PENGADMINISTRASI AKREDITASI LABORATORIUM PENGUJI
4. PENGADMINISTRASI AKREDITASI LINGKUNGAN
5. PENGADMINISTRASI AKREDITASI PRODUK, PELATIHAN DAN PERSONIL
6. PENGADMINISTRASI AKREDITASI SISTEM MANAJEMEN
7. PENGADMINISTRASI AKSES IPTEK
8. PENGADMINISTRASI AKSES PERMODALAN
9. PENGADMINISTRASI AKTA KELAHIRAN DAN KEMATIAN
10. PENGADMINISTRASI AKTA PERKAWINAN, PERCERAIAN, PENGAKUAN, PENGANGKATAN DAN PENGESAHAN ANAK (P4 DAN PA)
11. PENGADMINISTRASI ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI
12. PENGADMINISTRASI ANAK TERLANTAR
13. PENGADMINISTRASI ANALISIS DAN KEMITRAAN MEDIA
14. PENGADMINISTRASI ANALISIS KEBUTUHAN IMPOR
15. PENGADMINISTRASI ANGGARAN
16. PENGADMINISTRASI BATAS WILAYAH
17. PENGADMINISTRASI CONTOH UJI
18. PENGADMINISTRASI DATA PENYAJIAN DAN PUBLIKASI
19. PENGADMINISTRASI DATA PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
20. PENGADMINISTRASI DATA PERAWATAN DAN PENGAWETAN
21. PENGADMINISTRASI EVALUASI DAN KERJASAMA PENELITIAN
22. PENGADMINISTRASI GUDANG FARMASI
23. PENGADMINISTRASI HUKUM
24. PENGADMINISTRASI IDENTIFIKASI DAN EVALUASI SENTRA PENGOLAHAN PRODUK
25. PENGADMINISTRASI IDENTIFIKASI PULAU-PULAU KECIL
26. PENGADMINISTRASI IMB GEDUNG/BANGUNAN
27. PENGADMINISTRASI IZIN KAWIN DAN IZIN CERAI
28. PENGADMINISTRASI IZIN USAHA
29. PENGADMINISTRASI IZIN USAHA PARIWISATA
30. PENGADMINISTRASI KARCIS
31. PENGADMINISTRASI KECELAKAAN LLAJ
32. PENGADMINISTRASI KEDATANGAN DAN PEMBERANGKATAN KAPAL
33. PENGADMINISTRASI KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI
34. PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
35. PENGADMINISTRASI KEPENDIDIKAN
36. PENGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
37. PENGADMINISTRASI KERJASAMA BILATERAL DAN REGIONAL
38. PENGADMINISTRASI KERJASAMA PELATIHAN
39. PENGADMINISTRASI KESENIAN DAN BUDAYA DAERAH
40. PENGADMINISTRASI KESISWAAN
41. PENGADMINISTRASI KEUANGAN
42. PENGADMINISTRASI KINERJA OPERASIONAL PELABUHAN SDP
43. PENGADMINISTRASI KOLEKSI TUMBUHAN
44. PENGADMINISTRASI KURIKULUM
45. PENGADMINISTRASI LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING
46. PENGADMINISTRASI LAYANAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN
47. PENGADMINISTRASI LAYANAN KESEJAHTERAAN MAHASISWA
48. PENGADMINISTRASI LLAJ
49. PENGADMINISTRASI MINAT, BAKAT, DAN PENALARAN MAHASISWA
50. PENGADMINISTRASI NOTA PERHITUNGAN PAJAK/RETRIBUSI DAERAH

51. PENGADMINISTRASI OTDA
52. PENGADMINISTRASI P2M
53. PENGADMINISTRASI PAJAK
54. PENGADMINISTRASI PANITIA ADHOC DAN ALAT KELENGKAPAN
55. PENGADMINISTRASI PDLN
56. PENGADMINISTRASI PELATIHAN
57. PENGADMINISTRASI PELAYANAN DINAS LUAR NEGERI (PDLN)
58. PENGADMINISTRASI PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR
59. PENGADMINISTRASI PEMERINTAHAN
60. PENGADMINISTRASI PENANGAN PERKARA
61. PENGADMINISTRASI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
62. PENGADMINISTRASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
63. PENGADMINISTRASI PENERIMAAN
64. PENGADMINISTRASI PENGAMANAN DAN PERLINDUNGAN AKSES PASAR
65. PENGADMINISTRASI PENGANGKATAN DAN PENGAKUAN ANAK
66. PENGADMINISTRASI PENGUJIAN
67. PENGADMINISTRASI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
68. PENGADMINISTRASI PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KOMPETENSI BAHASA
69. PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM
70. PENGADMINISTRASI PERIJINAN
71. PENGADMINISTRASI PERKAWINAN/PENCATAT NIKAH
72. PENGADMINISTRASI PERPUSTAKAAN
73. PENGADMINISTRASI PERSURATAN
74. PENGADMINISTRASI PERTANAHAN
75. PENGADMINISTRASI PERUMUSAN SNI
76. PENGADMINISTRASI PROGRAM DAN KERJASAMA
77. PENGADMINISTRASI PROGRAM DAN TATA OPERASIONAL PENELITIAN
78. PENGADMINISTRASI RAPAT
79. PENGADMINISTRASI REGISTRASI PERKARA
80. PENGADMINISTRASI REHABILITASI MASALAH SOSIAL
81. PENGADMINISTRASI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG CACAT
82. PENGADMINISTRASI REKAM MEDIS DAN INFORMASI
83. PENGADMINISTRASI RISALAH
84. PENGADMINISTRASI RTP
85. PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA
86. PENGADMINISTRASI SARANA PENGEMBANGAN USAHA
87. PENGADMINISTRASI SERTIFIKASI PVT
88. PENGADMINISTRASI SERTIFIKASI
89. PENGADMINISTRASI SISTEM INFORMASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
90. PENGADMINISTRASI TEKNIS PEMERIKSAAN DAN PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR
91. PENGADMINISTRASI TPA
92. PENGADMINISTRASI TUGAS BELAJAR/IJIN BELAJAR
93. PENGADMINISTRASI UMUM
94. PENGADMINISTRASI LPSE

3. PENYUSUN (149)

IKHTIAR JABATAN:

Menerima, mengumpulkan dan mengklasifikasikan **obyek kerja** serta mengkaji dan menyusun **obyek kerja** sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tercapainya sasaran sesuai yang diharapkan

URAIAN TUGAS:

- a. Menerima dan memeriksa bahan dan data **obyek kerja** sesuai prosedur sebagai bahan kajian dalam rangka penyusunan **obyek kerja**;
- b. Mengumpulkan dan mengklasifikasikan bahan dan data **obyek kerja** sesuai spesifikasi dan prosedur untuk memudahkan apabila diperlukan;
- c. Mempelajari dan mengkaji karakteristik, spesifikasi dan hal-hal yang terkait dengan **obyek kerja** sesuai prosedur dalam rangka penyusunan **obyek kerja**;

- e. Menyusun konsep penyusunan **obyek kerja** sesuai dengan hasil kajian dan prosedur untuk tercapainya sasaran yang diharapkan;
- f. Mendiskusikan konsep penyusunan **obyek kerja** dengan pejabat yang berwenang dan terkait sesuai prosedur untuk kesempurnaan penyusunan **obyek kerja**;
- g. Menyusun kembali **obyek kerja** berdasarkan hasil diskusi sesuai prosedur untuk kelancaran dan optimalisasi penyusunan **obyek kerja**;
- h. Mengevaluasi proses penyusunan **obyek kerja** sesuai prosedur sebagai bahan perbaikan dan kesempurnaan tercapainya sasaran;
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan.

Yang Termasuk Dalam Jabatan PENYUSUN:

1. PENYUSUN ABSTRAKSI
2. PENYUSUN ABSTRAKSI HUKUM
3. PENYUSUN ADMINISTRASI AKADEMIK
4. PENYUSUN ADVOKASI, DAN KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI
5. PENYUSUN AKREDITASI LEMBAGA KEAGAMAAN
6. PENYUSUN ANALISIS DAMPAK KEPENDUDUKAN
7. PENYUSUN BAHAN AUDITOR/LABORATORIUM
8. PENYUSUN BAHAN BANTUAN HUKUM
9. PENYUSUN BAHAN BIMBINGAN TEKNIS
10. PENYUSUN BAHAN DATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
11. PENYUSUN BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI
12. PENYUSUN BAHAN KEBIJAKAN PENELITIAN
13. PENYUSUN BAHAN KEBIJAKAN PENGABDIAN MASYARAKAT
14. PENYUSUN BAHAN KEBIJAKAN PUBLIKASI ILMIAH
15. PENYUSUN BAHAN KERJASAMA PELATIHAN
16. PENYUSUN BAHAN KERJASAMA PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN
17. PENYUSUN BAHAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
18. PENYUSUN BAHAN KETAHANAN KELUARGA
19. PENYUSUN BAHAN MATERI BIMBINGAN
20. PENYUSUN BAHAN MATERI PENYULUHAN
21. PENYUSUN BAHAN MEKASINSME OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
22. PENYUSUN BAHAN PEMBERIAN BANTUAN TEKNIS
23. PENYUSUN BAHAN PEMBINAAN
24. PENYUSUN BAHAN PEMBINAAN FAHAM KEAGAMAAN
25. PENYUSUN BAHAN PEMBINAAN INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN
26. PENYUSUN BAHAN PEMBINAAN KESERTAAN KELUARGA BERENCANA
27. PENYUSUN BAHAN PEMBINAAN MINAT DAN BAKAT
28. PENYUSUN BAHAN PEMBINAAN PENGHULU/PENYULUH
29. PENYUSUN BAHAN PEMBINAAN PENTASHIHAN
30. PENYUSUN BAHAN PEMBINAAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA
31. PENYUSUN BAHAN PEMBINAAN PPAIW
32. PENYUSUN BAHAN PENCATATAN DAN PELAPORAN DATA KEPENDUDUKAN DAN KB
33. PENYUSUN BAHAN PENERAPAN STANDAR SUKARELA DAN PENANGANAN PENGADUAN
34. PENYUSUN BAHAN PENERAPAN STANDAR WAJIB DAN PENANGANAN PENGADUAN
35. PENYUSUN BAHAN PENGAWASAN PIHK/PIU
36. PENYUSUN BAHAN PENGAWASAN PRODUK HALAL
37. PENYUSUN BAHAN PENGEMBANGAN PROGRAM KEAGAMAAN
38. PENYUSUN BAHAN PENGEMBANGAN REGULASI
39. PENYUSUN BAHAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
40. PENYUSUN BAHAN PENYELENGGARAAN LITBANG
41. PENYUSUN BAHAN PENYULUHAN BAHASA DAN SASTRA
42. PENYUSUN BAHAN PENYULUHAN HUKUM
43. PENYUSUN BAHAN PNBP DAN BLU
44. PENYUSUN BAHAN PRASARANA PENERAPAN STANDAR

45. PENYUSUN BAHAN PROSES PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN KETENAGAAN
46. PENYUSUN BAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SISTEM DAN METODA
47. PENYUSUN BAHAN SISTEM JAMINAN MUTU
48. PENYUSUN BERITA DAN PENDAPAT UMUM
49. PENYUSUN BIMBINGAN LANJUTAN, DAN EVALUASI PASCA DIKLAT PERTANIAN
50. PENYUSUN DAN PENGOLAH INSTRUMEN
51. PENYUSUN DATA PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN
52. PENYUSUN DATA PESERTA DIDIK
53. PENYUSUN DOKUMENTASI SEJARAH DAN NILAI BUDAYA
54. PENYUSUN EVALUASI DIKLAT PERTANIAN BAGI APARATUR DAN NON APARATUR
55. PENYUSUN INFORMASI ARKEOLOGI
56. PENYUSUN INFORMASI BAHASA DAN SASTRA
57. PENYUSUN INFORMASI DAN PUBLIKASI PENDIDIKAN TINGGI
58. PENYUSUN INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN
59. PENYUSUN KEBUTUHAN BARANG INVENTARIS
60. PENYUSUN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN JALAN
61. PENYUSUN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
62. PENYUSUN KERJASAMA PELATIHAN
63. PENYUSUN KERJASAMA PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN
64. PENYUSUN KERJASAMA TEKNIK LUAR NEGERI
65. PENYUSUN KINERJA JARINGAN TRANSPORTASI ASDP
66. PENYUSUN KURIKULUM, MODUL DAN BAHAN AJAR
67. PENYUSUN LAPORAN HASIL DIKLAT
68. PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN
69. PENYUSUN LAPORAN PENGENDALIAN BPS BPIH
70. PENYUSUN MEKASINSME OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
71. PENYUSUN MODUL PEMBELAJARAN BAHASA DAN SASTRA
72. PENYUSUN NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA
73. PENYUSUN NSPK PENDIDIKAN
74. PENYUSUN NSPK SARANA PERKERETAAPIAN
75. PENYUSUN PEMBERIAN BANTUAN TEKNIS
76. PENYUSUN PEMBINAAN INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN
77. PENYUSUN PEMBINAAN KESERTAAN KELUARGA BERENCANA
78. PENYUSUN PENCATATAN DAN PELAPORAN DATA KEPENDUDUKAN DAN KB
79. PENYUSUN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
80. PENYUSUN PENERAPAN STANDAR SUKARELA DAN PENANGANAN PENGADUAN
81. PENYUSUN PENERAPAN STANDAR WAJIB DAN PENANGANAN PENGADUAN
82. PENYUSUN PENYULUH KELUARGA BERENCANA
83. PENYUSUN PENYULUHAN BAHASA DAN SASTRA
84. PENYUSUN PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
85. PENYUSUN PERENCANAAN PROGRAM DAN LAPORAN
86. PENYUSUN PERKEMBANGAN HARGA DAN PENGKAJIAN PASAR
87. PENYUSUN PESERTA DIDIK
88. PENYUSUN PETUNJUK PELAKSANAAN APBD SEKRETARIAT DAERAH
89. PENYUSUN PROGRAM DIPLOMASI BUDAYA
90. PENYUSUN PROGRAM FASILITASI PENDIDIKAN
91. PENYUSUN PROGRAM FASILITASI SUPERVISI DAN FASILITASI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
92. PENYUSUN PROGRAM KELEMBAGAAN DAN KERJASAMA
93. PENYUSUN PROGRAM KESELAMATAN ANGKUTAN JALAN
94. PENYUSUN PROGRAM LAPORAN DAN BAHAN PERENCANAAN PENDIDIKAN
95. PENYUSUN PROGRAM MINAT, BAKAT, DAN PENALARAN MAHASISWA
96. PENYUSUN PROGRAM PEMBINAAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL
97. PENYUSUN PROGRAM PEMBINAAN KOMUNITAS ADAT
98. PENYUSUN PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN BUDAYA
99. PENYUSUN PROGRAM PENELITIAN DASAR DAN PENGEMBANGAN ILMU
100. PENYUSUN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
101. PENYUSUN PROGRAM PENGAWASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
102. PENYUSUN PROGRAM PENGAWASAN PEREKONOMIAN

103. PENYUSUN PROGRAM PENGAWASAN PRASARANA WILAYAH DAN LINGKUNGAN HIDUP
104. PENYUSUN PROGRAM PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN
105. PENYUSUN PROGRAM PENGEMBANGAN PAUDNI
106. PENYUSUN PROGRAM PENGEMBANGAN TENAGA TEKNIS DAN FUNGSIONAL NON PENDIDIK
107. PENYUSUN PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI KEPALA SEKOLAH
108. PENYUSUN PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
109. PENYUSUN PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI SDM KEBUDAYAAN
110. PENYUSUN PROGRAM PENINGKATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN
111. PENYUSUN PROGRAM PENULISAN SEJARAH DAN NILAI BUDAYA
112. PENYUSUN PROGRAM PENYELENGGARAAN DIKLAT
113. PENYUSUN PROGRAM PERENCANAAN DIKLAT
114. PENYUSUN PROGRAM PEROLEHAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
115. PENYUSUN PROGRAM PUBLIKASI ILMIAH
116. PENYUSUN PROGRAM SERTIFIKASI PENDIDIK
117. PENYUSUN PROGRAM, ANGGARAN, DAN LAPORAN
118. PENYUSUN PROMOSI DAN KERJASAMA
119. PENYUSUN RANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN
120. PENYUSUN REKAYASA LALU LINTAS
121. PENYUSUN RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM
122. PENYUSUN RENCANA BAHAN TEKNIS KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN
123. PENYUSUN RENCANA BAHAN TEKNIS PERBENIHAN
124. PENYUSUN RENCANA BAHAN TEKNIS PRASARANA DAN SARANA BUDIDAYA
125. PENYUSUN RENCANA BAHAN TEKNIS PRODUKSI
126. PENYUSUN RENCANA BIMBINGAN TEKNIS INDUSTRI
127. PENYUSUN RENCANA BIMBINGAN TEKNIS USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
128. PENYUSUN RENCANA EVALUASI DAN PELAPORAN
129. PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN PRASARANA PULAU-PULAU KECIL
130. PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN
131. PENYUSUN RENCANA KERJASAMA
132. PENYUSUN RENCANA MANAJEMEN MUTU PASCA PANEN
133. PENYUSUN RENCANA MONEV DAN AKREDITASI
134. PENYUSUN RENCANA PEMANFAATAN JENIS IKAN
135. PENYUSUN RENCANA PENDIDIKAN DAN KERJASAMA
136. PENYUSUN RENCANA PENGADAAN SARANA DAN PRASARAN
137. PENYUSUN RENCANA PENGAMANAN DAN PERLINDUNGAN AKSES PASAR
138. PENYUSUN RENCANA PENGAWASAN
139. PENYUSUN RENCANA PENGEMBANGAN PRODUK SKALA BESAR
140. PENYUSUN RENCANA PENGEMBANGAN PRODUK SKALA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
141. PENYUSUN RENCANA PENGENDALIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
142. PENYUSUN RENCANA PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT
143. PENYUSUN RENCANA PROMOSI
144. PENYUSUN RENCANA REHABILITASI
145. PENYUSUN RENCANA TATA RUANG
146. PENYUSUN TEKNIS IJIN OPERASI PELABUHAN SDP
147. PENYUSUN TEKNIS PELATIHAN FUNGSIONAL BAGI APARATUR DAN NON APARATUR
148. PENYUSUN TEKNIS USAHA BUDIDAYA
149. PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN

NO.	RUMPUN JABATAN OPERASIONAL	JUMLAH
1.	ANAK BUAH KAPAL	1
2.	KEPALA KAMAR MESIN	2
3.	MUALIM	1
4.	OPERATOR	19
5.	PETUGAS	10
6.	JURNALIS	3
JUMLAH		36

1. ANAK BUAH KAPAL (1)

IKHTISAR JABATAN:

Mengoperasikan dan memelihara serta menjaga kapal dan muatannya, sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

URAIAN TUGAS:

- a. Mengecek kondisi kapal sesuai prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan pelayaran;
- b. Menghidupkan mesin kapal sesuai prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelayaran;
- c. Memeriksa keadaan muatan sesuai prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan pelayaran;
- d. Menyandarkan kapal setelah pelaksanaan pelayaran sesuai prosedur yang berlaku agar kapal tetap terjaga keamanannya;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan.

Yang Termasuk Dalam Jabatan ANAK BUAH KAPAL:

1. AWAK KAPAL PENGAWAS

2. KEPALA KAMAR MESIN (2)

Ikhtisar Jabatan:

Melaksanakan Pengoperasian dan Pemeliharaan mesin kapal sesuai tugas dan tanggungjawabnya dalam rangka mendukung kesiapan pelayaran yang aman dan nyaman.

URAIAN TUGAS:

- a. Memelihara mesin kapal sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar mesin siap digunakan;
- b. Melaksanakan kesiapan pelayaran sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya agar operasi pelayaran dapat berjalan dengan lancar;
- c. Melaksanakan fungsi dan tugas sebagai KKM sesuai prosedur agar tidak terjadi hambatan dalam melaksanakan tugas;
- d. Melaksanakan tugas pelayaran sesuai dengan prosedur dan peraturan agar kegiatan operasi pelayaran dapat dilaksanakan dengan efektif;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik yang tertulis maupun lisan

Yang Termasuk Dalam Jabatan KEPALA KAMAR MESIN:

1. KEPALA KAMAR MESIN
2. KEPALA STASIUN RADAR

3. MUALIM (1)

IKHTISAR JABATAN:

Memeriksa peralatan navigasi, memastikan peralatan keselamatan pada kapal dalam keadaan yang layak pakai yang berlaku sesuai dengan peraturan pelayaran untuk digunakan pada saat melakukan pelayaran

URAIAN TUGAS:

- a. Melaksanakan pelayaran sesuai prosedur yang berlaku sehingga kapal dapat berjalan baik dalam keadaan dan cuaca apapun;
- b. Mengecek kesiapan kondisi kapal sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar pelayaran dapat terlaksana;
- c. Melakukan koordinasi dengan awak kapal selama dalam pelayaran maupun dalam keadaan sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga kapal selalu dalam keadaan siap;
- d. Melaksanakan arahan nakhoda dengan seksama sesuai prosedur yang berlaku sehingga kegiatan pelayaran dapat berjalan dengan baik;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan.

Yang Termasuk Dalam Jabatan MUALIM:

1. MUALIM KAPAL

4. OPERATOR (19)

IKHTISAR JABATAN:

Mengendalikan, memantau, mengecek peralatan yang rusak, dan mengatur pemeliharaan suatu **obyekkerja** sesuai prosedur yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar.

URAIAN TUGAS:

- a. Mengendalikan peralatan suatu **obyekkerja** sesuai prosedur yang berlaku agar proses dapat berlanjut;
- b. Mengendalikan persiapan suatu **obyekkerja** sesuai prosedur yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar;
- c. Melakukan pemantauan suatu **obyekkerja** sesuai prosedur yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan optimal;
- d. Melakukan inspeksi peralatan suatu **obyekkerja** sesuai prosedur yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar;
- e. Mengecek peralatan yang rusak suatu **obyekkerja** sesuai prosedur yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar;
- f. Mengatur pemeliharaan peralatan suatu **obyek kerja** sesuai prosedur yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan yang lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan.

Yang termasuk dalam jabatan OPERATOR:

1. OPERATOR ALAT BERAT
2. OPERATOR CONSOLE
3. OPERATOR GLOBAL POSITIONING SYSTEM (GPS)
4. OPERATOR JEMBATAN TIMBANG
5. OPERATOR KILANG DAN UTILITAS
6. OPERATOR KOMPUTER GRAFIS
7. OPERATOR KOMUNIKASI
8. OPERATOR MESIN
9. OPERATOR PENGEMBANGAN SARANA IPTEK
10. OPERATOR PERALATAN PENYENSORAN
11. OPERATOR RADAR

12. OPERATOR RADIO
13. OPERATOR ROODSWEEPER
14. OPERATOR SANDI DAN TELEKOMUNIKASI
15. OPERATOR SPEEDBOAT
16. OPERATOR TAYANGAN MULTIMEDIA DAN SMS
17. OPERATOR TELEKOMUNIKASI
18. OPERATOR TERMINAL
19. OPERATOR TRANSMISI SANDI

5. PETUGAS (10)

IKHTISAR JABATAN:

Menerima dan mencatat **objek kerja** sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ditindaklanjuti agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.

URAIAN TUGAS:

- a. Menerima dan mencatat **objek kerja** dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. Memberikan saran kepada perorangan/organisasi yang melanggar ketentuan yang berlaku agar tertib;
- c. Memeriksa aplikasi lapangan apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pencegahan;
- d. Mengerjakan tugas yang sejenisnya sesuai dengan perintah atasan agar dapat menyelesaikan pekerjaan yang diprioritaskan;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan.

Yang termasuk dalam jabatan PETUGAS:

1. PETUGAS KEAMANAN
2. PETUGAS PROTOKOL
3. PETUGAS STANDARISASI DAN SERTIFIKASI
4. ACCOUNT REPRESENTATIVE PELAYANAN TK I
5. ACCOUNT REPRESENTATIVE PELAYANAN TK II
6. ACCOUNT REPRESENTATIVE PENGAWASAN TK I
7. ACCOUNT REPRESENTATIVE PENGAWASAN TK II
8. AKUPUNTUR
9. PENJAGA TAMAN MAKAM PAHLAWAN
10. PEMULASARAAN JENAZAH

6. JURNALIS (3)

IKHTISAR JABATAN:

Mengumpulkan, mengolah, dan menyebarluaskan berita sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku dalam upaya mendukung kelancaran penyampaian berita kepada masyarakat luas.

URAIAN TUGAS:

- a. Mengumpulkan berbagai berita sesuai dengan prosedur dan perintah pimpinan dalam rangka menyusun berita;
- b. Mengolah berita yang telah terkumpul sesuai topiknya dalam rangka penyiapan bahan pemberitaan;
- c. Mengedit konsep berita sesuai dengan arahan dan koreksian pimpinan dalam rangka menyiapkan informasi yang layak dipublikasikan;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan.

Yang Termasuk Dalam Jabatan JURNALIS:

1. JURNALIS
2. PENULIS STENO
3. TENAGA PELIPUTAN

NO.	RUMPUN JABATAN PELAYANAN	JUMLAH
1.	FASILITATOR	17
2.	JURU	13
3.	KONSELOR	4
4.	PELAYAN	1
5.	PEMANDU	3
6.	PENGEMUDI	3
7.	PENYIAP	2
8.	PRAMU	7
9.	SEKRETARIS	2
JUMLAH		52

1. FASILITATOR (17)

IKHTISAR JABATAN:

Membimbing dan menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta tentang **obyek kerja** sesuai prosedur dan metode tertentu agar peserta terampil dibidangnya.

URAIAN TUGAS :

- Menyiapkan materi pembelajaran tentang **obyek kerja** sesuai prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelatihan;
- Membuat jadwal penyelenggaraan pelatihan sesuai tugas dan tanggungjawabnya untuk kelancaran pelaksanaan pelatihan;
- Mengatur ruang dan peralatan pembelajaran sesuai dengan sarana yang tersedia untuk kelancaran pelaksanaan pelatihan;
- Menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta sesuai dengan prosedur dan metode tertentu sehingga tujuan pembelajaran tercapai dengan baik;
- Melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai bagan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik yang tertulis maupun lisan.

Yang termasuk dalam jabatan FASILITATOR:

- FASILITATOR KELEMBAGAAN PEMASARAN
- FASILITATOR KEMITRAAN
- FASILITATOR KEWIRAUSAHAA
- FASILITATOR PERDAGANGAN
- FASILITATOR PROMOSI
- FASILITATOR SARANA PEMASARAN
- INSTRUKTUR BISNIS GARMEN
- INSTRUKTUR KEPALA ANJING PELACAK
- INSTRUKTUR MINYAK SAWIT LESTARI
- INSTRUKTUR PESAWAT UAP (BOILER)
- INSTRUKTUR SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA (SMK3)
- INSTRUKTUR SISTEM PRODUKSI
- INSTRUKTUR TEKSTIL
- INSTRUKTUR VOKASIONAL
- MEDIATOR PERTANAHAN
- PELATIH ATLET DISABLE (NPC)
- PELATIH SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS)

2. JURU (13)

IKHTISAR JABATAN:

Menerima, menyiapkan, memeriksa dan memelihara **obyek kerja** sesuai prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

URAIAN TUGAS:

- a. Menerima **obyek kerja** sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk diolah menjadi hasil kerja;
- b. Menyiapkan **obyek kerja** berdasarkan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Memeriksa **obyek kerja** sesuai prosedur yang berlaku agar sesuai dengan target yang telah ditentukan;
- d. Memelihara **obyek kerja** sesuai prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan.

Yang Termasuk Dalam Jabatan JURU:

1. JURU GAMBAR
2. JURU INFORMASI DAN KOMUNIKASI
3. JURU MESIN
4. JURU MINYAK
5. JURU MOTOR
6. JURU MUDI
7. JURU PELESTARI CAGAR BUDAYA
8. JURU PUNGUT KEBERSIHAN
9. JURU PUNGUT RETRIBUSI
10. JURU RAWAT JENAZAH
11. JURU SITA (KEKAYAAN NEGARA)
12. JURU SURVEY PERMUKIMAN PERUMAHAN
13. JURU UKUR

3. KONSELOR (4)**IKHTISAR JABATAN:**

Melaksanakan kegiatan pemulihan dan peningkatan sosial budaya masyarakat dan kepegawaian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka pemulihan kejiwaan masyarakat/pegawai supaya dapat melakukan kegiatan normal kembali.

URAIAN TUGAS:

- a. Memberikan layanan **objek kerja** kepada masyarakat/pegawai sesuai dengan pedoman dan norma yang berlaku sebagai usaha pemulihan kejiwaan;
- b. Melakukan pemulihan dan peningkatan sosial budaya masyarakat/pegawai sesuai dengan metode dan pedoman yang tepat agar tercipta kondisi lingkungan yang harmonis;
- c. Melakukan pendampingan pemulihan trauma secara terstruktur dengan berbagai metode terapi psikologis agar individu yang mengalami trauma pulih kembali;
- d. Memberikan pelatihan dan pemulihan kondisi **objek kerja** kepada masyarakat/pegawai sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku agar tercipta lingkungan dan suasana yang harmonis;
- e. Melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan.

Yang Termasuk Dalam Jabatan KONSELOR:

1. KONSELOR
2. ASSESOR INDUSTRI
3. ASSESOR K3
4. PEMBINA KARAKTER

4. PELAYAN (1)

IKHTISAR JABATAN:

Memberikan bantuan, melayani, dan mengurus kebutuhan pelanggan sesuai prosedur yang berlaku agar tugas dapat berjalan dengan lancar.

URAIAN TUGAS:

- a. Memberikan bantuan kepada pelanggan sesuai prosedur yang berlaku agar tugas dapat berjalan dengan lancar;
- b. Mengambil tindakan yang tepat terhadap pelanggan sesuai prosedur yang berlaku agar tugas dapat berjalan dengan lancar;
- c. Melayani kebutuhan pelanggan sesuai prosedur yang berlaku agar tugas dapat berjalan dengan lancar;
- d. Mengurus kebutuhan dan kenyamanan pelanggan sesuai prosedur yang berlaku agar tugas dapat berjalan dengan lancar;
- e. Melaksanakan tugas yang sejenis terhadap pelanggan sesuai prosedur yang berlaku agar tugas dapat berjalan dengan lancar;
- f. Membuat laporan kegiatan sesuai dengan prosedur sebagai akuntabilitas pelaksanaan tugas; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Yang Termasuk Dalam Jabatan PELAYAN:

- 1 BINATU RUMAH SAKIT

5. PEMANDU (3)

IKHTISAR JABATAN:

Membimbing dan memberikan penjelasan tentang **obyek kerja** kepada peserta secara rinci sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sehingga mudah dipahami oleh peserta.

URAIAN TUGAS:

- a. Menyiapkan materi panduan **objek kerja** secara baik sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- b. Mengantarkan peserta ke lokasi **objek kerja** berdasarkan jadwal yang telah ditentukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Memberikan penjelasan **objek kerja** secara rinci dan mendetail sehingga peserta dapat melaksanakan tugas seperti yang diharapkan;
- d. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pemanduan sebagai upaya perbaikan kinerja di masa mendatang;
- e. Melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan.

Yang Termasuk Dalam Jabatan PEMANDU:

1. PEMANDU KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
2. PEMANDU MUSEUM
3. PEMANDU WISATA

6. PENGEMUDI (3)

IKHTISAR JABATAN:

Memeriksa, memanaskan, dan merawat kelengkapan kendaraan berdasarkan petunjuk norma yang berlaku serta mengemudikan, memperbaiki, dan melaporkan segala kerusakan agar kondisi kendaraan selalu siap pakai.

URAIAN TUGAS:

- a. Memeriksa kelengkapan **objek kerja** dengan cara mengecek rem, oli dan lampu di mesin, air radiator, air aki dan tekanan udara ban agar **objek kerja** dapat dikendarai dengan baik;

- b. Memanaskan mesin **objek kerja** guna mengetahui kelainan mesin;
- c. Merawat **objek kerja** dengan cara membersihkan mesin, ruangan dalam dan luar **objek kerja** agar kendaraan kelihatan bersih;
- d. Mengemudikan **objek kerja** berdasarkan tujuan dan ketentuan lalu lintas yang berlaku agar kendaraan dapat tiba di tujuan dengan selamat;
- e. Memperbaiki kerusakan kecil agar **objek kerja** dapat beroperasional secara layak;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan.

Yang Termasuk Dalam Jabatan PENGEMUDI:

1. PENGEMUDI MOBIL DAMKAR
2. PENGEMUDI PENGAWAL TAHANAN
3. SOPIR/PENGEMUDI MOBIL

7. PENYIAP (2)

IKHTISAR JABATAN:

Menerima, mencatat, dan memeriksa bahan dan data **objek kerja** sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

URAIAN TUGAS:

- a. Menerima dan mencatat bahan dan data **obyek kerja** sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, dalam rangka pelaksanaan tugas;
- b. Memeriksa dan mengklasifikasikan bahan dan data **obyek kerja** sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan tugas;
- c. Mengkaji dan menelaah bahan dan data **obyek kerja** sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, dalam rangka pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun konsep penyiapan **obyek kerja** sesuai hasil kajian, telaahan dan prosedur sebagai bahan pelaksanaan tugas;
- e. Mendiskusikan konsep penyiapan dengan pejabat yang berwenang dan terkait sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Menyiapkan alat dan sarana kelengkapan yang diperlukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Membuat laporan kegiatan sesuai dengan prosedur sebagai akuntabilitas pelaksanaan tugas; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Yang Termasuk Dalam Jabatan PENYIAP:

1. PENYIAP BAHAN INSTRUMENT EVALUASI DIRI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI
2. PENYIAP BAHAN PEMBINAAN LSP, LDP DAN TUK

8. PRAMU (7)

IKHTISAR JABATAN:

Menyiapkan peralatan dan menyajikan kebutuhan sesuai perintah dan ketentuan yang berlaku serta membersihkan dan merawat peralatan yang digunakan agar tetap terawat

URAIAN TUGAS:

- a. Menyiapkan **objek kerja** yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- b. Menyiapkan kebutuhan **objek kerja** yang diperlukan sesuai perintah dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. Membersihkan **objek kerja** yang digunakan dengan menggunakan fasilitas yang ada agar tetap bersih dan siap digunakan kembali;
- d. Menyimpan dan merawat **objek kerja** yang digunakan agar tidak cepat rusak;
- e. Membuat laporan kegiatan sesuai dengan prosedur sebagai akuntabilitas pelaksanaan tugas; dan

- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Yang Termasuk Dalam Jabatan PRAMU:

1. PRAMU BAKTI
2. PRAMU BENIH IKAN
3. PRAMU KEBERSIHAN
4. PRAMU KELAS
5. PRAMU LABORATORIUM
6. PRAMU PEMAKAMAN
7. PRAMU TAMAN

9. SEKRETARIS(1)

IKHTISAR JABATAN:

Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi dan mengatur jadwal sertamemfasilitasi pimpinan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalamrangka melancarkan pelaksanaan tugaspimpinan.

URAIAN TUGAS:

- a. Menerima, membuka, membaca, mencatat **objek kerja** masuk sesuai prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. Menerima telepon dan menyampaikan pesan sesuai prosedur yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Menerima dan mengirim fax sesuai prosedur yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. Menerima tamu dan mencatat keperluannya sesuai prosedur yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- e. Mencatat janji pertemuan dengan relasi sesuai prosedur yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- f. Mencatat jadwal kegiatan pimpinan sesuai prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Mendokumentasikan surat masuk dan keluar sesuai prosedur yang berlaku agar memudahkan dalam mencari;
- h. Membuat laporan kegiatan sesuai dengan prosedur sebagai akuntabilitas pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisanmaupun tertulis.

Yang Termasuk Dalam Jabatan SEKRETARIS:

1. SEKRETARIS
2. AJUDAN

NO.	RUMPUN JABATAN TEKNIS	JUMLAH
1.	ANALIS	773
2.	ASISTEN	3
3.	BENDAHARA	1
4.	KOORDINATOR	13
5.	KURATOR	2
6.	PEMELIHARA	12
7.	PEMERIKSA	39
8.	PEMROSES	1
9.	PENAGIH	1
10.	PENATA	6
11.	PENEELAH	27
12.	PENGAMAT	4
13.	PENGAMBIL SAMPEL	1
14.	PENGAWAS	85
15.	PENGELOLA	629
16.	PENGEMBANG	22
17.	PENGENDALI	2
18.	PENGEVALUASI	19
19.	PENGKAJI	5
20.	PENGOLAH	160
21.	PENGUJI	5
22.	PENILAI	5
23.	PENYIDIK	1
24.	PENYULUH	37
25.	PENYUNTING	2
26.	PERANCANG	7
27.	PRANATA	26
28.	TEKNISI	46
29.	VERIFIKATOR	6
JUMLAH		1940

1. ANALIS (773)

IKHTISAR JABATAN:

Menelaah dan menganalisa **objek kerja** sesuai dengan prosedur yang berlaku agar semua pekerjaan dapat diselesaikan secara berdayaguna dan berhasilguna.

URAIAN TUGAS:

- Mengumpulkan bahan-bahan **objek kerja** sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan;
- Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan **obyek kerja** dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas;
- Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan **obyek kerja** dalam rangkamenyelesaikan pekerjaan;
- Membuat laporan berdasarkan hasil **objek kerja** untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat ;
- Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

Yang Termasuk Dalam Jabatan ANALIS:

- ANALIS ADAPTASI DAMPAK PERUBAHAN IKLIM
- ANALIS ADMINISTRASI PERIZINAN PENELITIAN
- ANALIS ADVOKASI
- ANALIS ADVOKASI DAN KIE
- ANALIS AKREDITASI FASILITAS NUKLIR
- ANALIS AKREDITASI LEMBAGA DIKLAT

7. ANALIS AKSES INDUSTRI
8. ANALIS AKUNTABILITAS KINERJA APARATUR
9. ANALIS ALAT DAN MESIN PERTANIAN
10. ANALIS ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI
11. ANALIS ALAT PENANGKAP IKAN DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN
12. ANALIS ALAT REPRODUKSI
13. ANALIS ALIH TEKNOLOGI DAN INKUBASI
14. ANALIS ALOKASI USAHA PENANGKAPAN IKAN
15. ANALIS ANGKUTAN DARAT
16. ANALIS ANGKUTAN LAUT
17. ANALIS ANGKUTAN UDARA
18. ANALIS APLIKASI DAN PENGELOLAAN DATA SISTEM KEUANGAN
19. ANALIS APLIKASI MODEL PENGEMBANGAN INDUSTRI
20. ANALIS APRESIASI FILM
21. ANALIS APRESIASI KARYA SENI
22. ANALIS ASET NEGARA
23. ANALIS BADAN LAYANAN UMUM
24. ANALIS BAGAN AKUN STANDAR
25. ANALIS BAHAN DAN BARANG TEKNIK LOGAM
26. ANALIS BAHAN KETERJAGAN
27. ANALIS BAHASA DAN SASTRA
28. ANALIS BANGUNAN DAN PERUMAHAN
29. ANALIS BARANG HASIL PENINDAKAN
30. ANALIS BATAS WILAYAH
31. ANALIS BEA DAN CUKAI
32. ANALIS BENCANA
33. ANALIS BENIH
34. ANALIS BERITA
35. ANALIS BERKAS SENGKETA
36. ANALIS BIDANG PENGAWASAN
37. ANALIS BIMBINGAN AKUNTANSI
38. ANALIS BIMBINGAN PELAYANAN DAN KONSULTASI
39. ANALIS BIMBINGAN PENDATAAN, PENILAIAN, DAN PENGENAAN
40. ANALIS BIMBINGAN TEKNIS ANGGARAN
41. ANALIS BIMBINGAN USAHA
42. ANALIS BIMTEK DAN BANTEK
43. ANALIS BINA KEHIDUPAN AGAMA
44. ANALIS BIOFISIK
45. ANALIS BUDAYA
46. ANALIS BUDAYA KEAGAMAAN
47. ANALIS BUDIDAYA PERIKANAN
48. ANALIS CAGAR BUDAYA DAN KOLEKSI MUSEUM
49. ANALIS CONTAINER SCANNER
50. ANALIS CUACA
51. ANALIS DAMPAK SOSIAL
52. ANALIS DANA HAJI
53. ANALIS DANA REHABILITASI FASILITAS PENDIDIKAN
54. ANALIS DATA AKADEMIK
55. ANALIS DATA BIDANG EVALUASI DAN KERJASAMA PENELITIAN
56. ANALIS DATA BIDANG PROGRAM DAN TATA OPERASIONAL PENELITIAN
57. ANALIS DATA BLU (PTAN)
58. ANALIS DATA BUMN
59. ANALIS DATA CAGAR BUDAYA DAN KOLEKSI MUSEUM
60. ANALIS DATA DAN INFORMASI
61. ANALIS DATA DAN INFORMASI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
62. ANALIS DATA DAN KERJASAMA DIKLAT
63. ANALIS DATA DAN KERJASAMA PEMASYARAKATAN
64. ANALIS DATA EKONOMI MAKRO
65. ANALIS DATA INTELIJEN
66. ANALIS DATA KEBAHASAAN
67. ANALIS DATA PENGADAAN TANAH

68. ANALIS DATA SERTIFIKASI INDUSTRI ELEKTRONIKA
69. ANALIS DATA SERTIFIKASI INDUSTRI KACA & KERAMIK
70. ANALIS DATA SERTIFIKASI INDUSTRI KARET & PLASTIK
71. ANALIS DATA SERTIFIKASI INDUSTRI KIMIA
72. ANALIS DATA SERTIFIKASI INDUSTRI METALURGI
73. ANALIS DATA SERTIFIKASI INDUSTRI PANGAN
74. ANALIS DATA STANDARISASI/PENYELIA
75. ANALIS DESA/KELURAHAN
76. ANALIS DESAIN PAMERAN
77. ANALIS DIALOG DAN WAWASAN MULTIKULTURAL
78. ANALIS DIKLAT
79. ANALIS DISTRIBUSI PITA CUKAI
80. ANALIS DOKUMEN PERIZINAN PIHK
81. ANALIS DOKUMENTASI CAGAR BUDAYA DAN MUSEUM
82. ANALIS DOKUMENTASI KESENIAN DAN PERFILMAN
83. ANALIS DUKUNGAN OPERASI NARKOTIKA
84. ANALIS DUKUNGAN PENGAWASAN
85. ANALIS DUKUNGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
86. ANALIS DUNIA USAHA
87. ANALIS EKONOMI
88. ANALIS EKONOMI KREATIF
89. ANALIS EKSPLORASI CAGAR BUDAYA
90. ANALIS EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL
91. ANALIS EKSTENSIFIKASI
92. ANALIS EVALUASI AUDIT
93. ANALIS EVALUASI DAN PELAPORAN
94. ANALIS FASILITASI HKI
95. ANALIS FASILITASI KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
96. ANALIS FASILITASI LITBANG TEKNOLOGI INDUSTRI
97. ANALIS FASILITASI PENINGKATAN KOMPETENSI
98. ANALIS FISKAL
99. ANALIS FORUM KERUKUNAN UMAT
100. ANALIS FORUM KEWASPASPADEAN DINI MASYARAKAT (FKDM)
101. ANALIS FUNGSI DAN PERAN BAHASA/SASTRA
102. ANALIS GENETIK
103. ANALIS GEREJA
104. ANALIS GIZI
105. ANALIS HAJI
106. ANALIS HAKIM
107. ANALIS HASIL HUTAN
108. ANALIS HASIL MONITORING DAN EVALUASI
109. ANALIS HASIL PENANGANAN PELANGGARAN
110. ANALIS HASIL PENELITIAN
111. ANALIS HASIL PENGAWASAN DAN DUMAS
112. ANALIS HIGIENE INDUSTRI
113. ANALIS HSE (KESEHATAN, KESELAMATAN DAN LINGKUNGAN) SERTA SECURITY KAPAL
114. ANALIS HSE/ KESELAMATAN DAN LINGKUNGAN
115. ANALIS HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
116. ANALIS HUBUNGAN ANTARLEMBAGA KEPERCAYAAN
117. ANALIS HUBUNGAN KEMASYARAKATAN
118. ANALIS HUBUNGAN PERWAKILAN LUAR NEGERI
119. ANALIS HUKUM
120. ANALIS HUKUM PERTANAHAN
121. ANALIS HUMAS DAN PROTOKOL
122. ANALIS HUTAN DAN LAHAN (RHL)
123. ANALIS IKLIM
124. ANALIS IKLIM USAHA DAN KERJASAMA
125. ANALIS INDUSTRI
126. ANALIS INDUSTRI DAN PENCEGAHAN PENCEMARAN
127. ANALIS INFORMASI

128. ANALIS INFORMASI BLU
129. ANALIS INFORMASI HASIL PERTANIAN
130. ANALIS INFORMASI IPTEK NUKLIR
131. ANALIS INFORMASI KEBUDAYAAN
132. ANALIS INFORMASI PASAR HASIL PERTANIAN
133. ANALIS INFORMASI PENDIDIKAN
134. ANALIS INFORMASI PENGEMBANGAN PENDIDIK/TENAGA KEPENDIDIKAN
135. ANALIS INFORMASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEBUDAYAAN
136. ANALIS INFORMASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN
137. ANALIS INFORMASI PERENCANAAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI
138. ANALIS INFORMASI PUBLIK PELAYANAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN
139. ANALIS INFORMASI SUMBER DAYA HUTAN
140. ANALIS INFRASTRUKTUR STANDAR
141. ANALIS INSPEKSI BAHAN DAN BARANG TEKNIK NON LOGAM
142. ANALIS INSPEKSI BHN & BARTEK LOGAM
143. ANALIS INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN
144. ANALIS INSTRUMENTASI DAN KONTROL KAPAL
145. ANALIS INTELIJEN
146. ANALIS INVESTASI DAN PERMODALAN USAHA
147. ANALIS INVESTASI PEMERINTAH
148. ANALIS INVESTIGASI INTERNAL
149. ANALIS IPTEK
150. ANALIS JABATAN
151. ANALIS JALAN
152. ANALIS JASA KONSULTASI
153. ANALIS KAPASITAS KEPALA MADRASAH
154. ANALIS KAPASITAS PENDIDIK DAN/ATAU SANTRI
155. ANALIS KAPASITAS PENGAWAS
156. ANALIS KAPASITAS PENYULUH
157. ANALIS KATA DAN ISTILAH
158. ANALIS KAWASAN INDUSTRI
159. ANALIS KAWASAN TRANSMIGRASI
160. ANALIS KEAMANAN
161. ANALIS KEBAKARAN
162. ANALIS KEBERATAN DAN BANDING
163. ANALIS KEBIJAKAN APBN
164. ANALIS KEBIJAKAN AUDIT
165. ANALIS KEBIJAKAN BMN
166. ANALIS KEBIJAKAN CUKAI
167. ANALIS KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBIAYAAN
168. ANALIS KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS
169. ANALIS KEBIJAKAN DANA ALOKASI UMUM
170. ANALIS KEBIJAKAN DANA BAGI HASIL
171. ANALIS KEBIJAKAN DANA PENDIDIKAN
172. ANALIS KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO
173. ANALIS KEBIJAKAN HIBAH DAERAH
174. ANALIS KEBIJAKAN INDUSTRI
175. ANALIS KEBIJAKAN INTELIJEN
176. ANALIS KEBIJAKAN INVESTASI DAERAH
177. ANALIS KEBIJAKAN KEBERATAN DAN BANDING
178. ANALIS KEBIJAKAN KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN
179. ANALIS KEBIJAKAN KEUANGAN INKLUSIF
180. ANALIS KEBIJAKAN KEWAJIBAN KONTINJENSI
181. ANALIS KEBIJAKAN KLASIFIKASI BARANG
182. ANALIS KEBIJAKAN KND
183. ANALIS KEBIJAKAN KREDIT PROGRAM DAN INVESTASI LAINNYA
184. ANALIS KEBIJAKAN LELANG
185. ANALIS KEBIJAKAN PAJAK
186. ANALIS KEBIJAKAN PDRD
187. ANALIS KEBIJAKAN PELAKSANAAN ANGGARAN
188. ANALIS KEBIJAKAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN

189. ANALIS KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH
190. ANALIS KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PERUBAHAN IKLIM
191. ANALIS KEBIJAKAN PENELITIAN
192. ANALIS KEBIJAKAN PENERIMAAN
193. ANALIS KEBIJAKAN PENERUSAN PINJAMAN
194. ANALIS KEBIJAKAN PENGABDIAN MASYARAKAT
195. ANALIS KEBIJAKAN PENGANGGARAN
196. ANALIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLU
197. ANALIS KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN
198. ANALIS KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PASAR SBSN
199. ANALIS KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PASAR SUN
200. ANALIS KEBIJAKAN PENILAIAN
201. ANALIS KEBIJAKAN PENINDAKAN
202. ANALIS KEBIJAKAN PINJAMAN DAN HIBAH
203. ANALIS KEBIJAKAN PIUTANG NEGARA
204. ANALIS KEBIJAKAN PNBP LABA BUMN
205. ANALIS KEBIJAKAN PNBP MINYAK DAN GAS BUMI
206. ANALIS KEBIJAKAN PORTOFOLIO DAN RISIKO LIKUIDITAS
207. ANALIS KEBIJAKAN PORTOFOLIO DAN RISIKO PEMBIAYAAN
208. ANALIS KEBIJAKAN PROFESI LELANG
209. ANALIS KEBIJAKAN PUBLIKASI ILMIAH
210. ANALIS KEBIJAKAN REMUNERASI
211. ANALIS KEBIJAKAN SARANA OPERASI
212. ANALIS KEBUTUHAN DIKLAT KEPALA SEKOLAH
213. ANALIS KEBUTUHAN LOGISTIK INTELIJEN
214. ANALIS KEBUTUHAN PENDIDIK/TENAGA KEPENDIDIKAN
215. ANALIS KEBUTUHAN PENINGKATAN KOMPETENSI BAHASA
216. ANALIS KEBUTUHAN TENAGA KERJA INDUSTRI
217. ANALIS KEGIATAN EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI MIGAS
218. ANALIS KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
219. ANALIS KEHIDUPAN AGAMA
220. ANALIS KELAIKAN TEKNIK DAN KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN
221. ANALIS KELAIKAN TEKNIK MINYAK DAN GAS BUMI
222. ANALIS KELAUTAN DAN PERIKANAN
223. ANALIS KELEMBAGAAN
224. ANALIS KELEMBAGAAN IPTEK
225. ANALIS KELEMBAGAAN KURSUS DAN PELATIHAN
226. ANALIS KELEMBAGAAN MASYARAKAT
227. ANALIS KELEMBAGAAN PEMBINAAN PENDIDIKAN
228. ANALIS KELEMBAGAAN USAHA
229. ANALIS KELUARGA BERENCANA
230. ANALIS KEMAHASISWAAN
231. ANALIS KEMASYARAKATAN
232. ANALIS KEMITRAAN
233. ANALIS KENELAYANAN
234. ANALIS KEOLAHHRAGAAN
235. ANALIS KEPALA MADRASAH
236. ANALIS KEPEMUDAAN
237. ANALIS KEPENDIDIKAN
238. ANALIS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
239. ANALIS KEPULAUAN
240. ANALIS KERJASAMA
241. ANALIS KERJASAMA APARAT PENEGAK HUKUM
242. ANALIS KERJASAMA ATDIKBUD DAN SILN
243. ANALIS KERJASAMA BILATERAL DAN REGIONAL
244. ANALIS KERJASAMA DALAM NEGERI PENDIDIKAN TINGGI
245. ANALIS KERJASAMA DAN PERMODALAN
246. ANALIS KERJASAMA DIKLAT
247. ANALIS KERJASAMA INDUSTRI
248. ANALIS KERJASAMA INDUSTRI HIJAU
249. ANALIS KERJASAMA KEBAHASAAN

250. ANALIS KERJASAMA KEBUDAYAAN
251. ANALIS KERJASAMA LEMBAGA KEAGAMAAN
252. ANALIS KERJASAMA LINTAS SEKTOR
253. ANALIS KERJASAMA LUAR NEGERI
254. ANALIS KERJASAMA LUAR NEGERI PENDIDIKAN TINGGI
255. ANALIS KERJASAMA PENDIDIKAN
256. ANALIS KERJASAMA PENDIDIKAN TINGGI
257. ANALIS KERJASAMA PRASARANA STANDARDISASI
258. ANALIS KERJASAMA TEKNIK
259. ANALIS KERJASAMA TEKNIS STANDARDISASI
260. ANALIS KERUGIAN NEGARA
261. ANALIS KESEHATAN
262. ANALIS KESEHATAN IBU DAN ANAK
263. ANALIS KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN
264. ANALIS KESEHATAN KERJA
265. ANALIS KESEJAHTERAAN KELUARGA
266. ANALIS KESEJAHTERAAN RAKYAT
267. ANALIS KESEJAHTERAAN SDM APARATUR
268. ANALIS KESELAMATAN KERJA
269. ANALIS KESELAMATAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI
270. ANALIS KESENIAN DAN BUDAYA DAERAH
271. ANALIS KESYAHBANDARAN
272. ANALIS KETAHANAN BUDAYA
273. ANALIS KETAHANAN EKONOMI
274. ANALIS KETAHANAN ENERGI
275. ANALIS KETAHANAN INDUSTRI
276. ANALIS KETAHANAN KELUARGA
277. ANALIS KETENAGALISTRIKAN
278. ANALIS KEUANGAN
279. ANALIS KEUANGAN DAN PASAR SBSN
280. ANALIS KEUANGAN DAN PASAR SUN
281. ANALIS KIMIA
282. ANALIS KINERJA
283. ANALIS KINERJA BUMN
284. ANALIS KINERJA INDUSTRI
285. ANALIS KINERJA INVESTASI, PENERUSAN PINJAMAN DAN KREDIT PROGRAM
286. ANALIS KOLEKSI MUSEUM
287. ANALIS KOMERSIALISASI HKI
288. ANALIS KOMPETENSI
289. ANALIS KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI KETENAGAAAN
290. ANALIS KOMPETENSI INTI INDUSTRI DAERAH
291. ANALIS KOMPETENSI KELULUSAN
292. ANALIS KOMPETENSI TENAGA PENGAJAR
293. ANALIS KOMUNITAS ADAT
294. ANALIS KONDISI KRISIS ENERGI
295. ANALIS KONFLIK PERTANAHAN
296. ANALIS KONSERVASI AIR DAN LH
297. ANALIS KONSERVASI DAN REHABILITASI WILAYAH PESISIR
298. ANALIS KONSERVASI ENERGI
299. ANALIS KONSERVASI INDUSTRI
300. ANALIS KONSERVASI KAWASAN
301. ANALIS KONSERVASI PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
302. ANALIS KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN REKENING PEMERINTAH
303. ANALIS KONSOLIDASI REKENING PEMERINTAH
304. ANALIS KONSOLIDASI TANAH
305. ANALIS KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM
306. ANALIS KONTEN MEDIA SOSIAL
307. ANALIS KONVENSI INTERNASIONAL
308. ANALIS KOPERASI
309. ANALIS KREASI DAN PRODUKSI MUSIK
310. ANALIS KUALIFIKASI DAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- 311. ANALIS KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN
- 312. ANALIS KURSUS DAN KESETARAAN
- 313. ANALIS KURSUS DAN PELATIHAN
- 314. ANALIS LABORATORIUM
- 315. ANALIS LABORATORIUM TUMBUHAN DAN SARANA
- 316. ANALIS LAHAN PERTANIAN
- 317. ANALIS LALU LINTAS
- 318. ANALIS LANDREFORM
- 319. ANALIS LAPORAN
- 320. ANALIS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
- 321. ANALIS LAPORAN HASIL AUDIT
- 322. ANALIS LAPORAN HASIL PENGAWASAN
- 323. ANALIS LAPORAN INVESTASI, PENERUSAN PINJAMAN DAN KREDIT PROGRAM
- 324. ANALIS LAPORAN KEUANGAN
- 325. ANALIS LAPORAN KEUANGAN REKENING PEMERINTAH
- 326. ANALIS LAPORAN KEUANGAN TRANSFER DAERAH
- 327. ANALIS LAPORAN NERACA
- 328. ANALIS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
- 329. ANALIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN
- 330. ANALIS LAYANAN INFORMASI PENERIMAAN NEGARA
- 331. ANALIS LAYANAN UMUM
- 332. ANALIS LEKSIKOGRAF/PEKAMUS
- 333. ANALIS LEMBAGA DAKWAH/ KEAGAMAAN
- 334. ANALIS LEMBAGA KEAGAMAAN
- 335. ANALIS LINDUNGAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN
- 336. ANALIS LINGKUNGAN HIDUP
- 337. ANALIS LOGAM
- 338. ANALIS MANAJEMEN BEASISWA
- 339. ANALIS MANAJEMEN DANA RISET
- 340. ANALIS MANAJEMEN LANTAS
- 341. ANALIS MANAJEMEN LEMBAGA KEAGAMAAN
- 342. ANALIS MANAJEMEN MONITORING & PENGENDALIAN KEKAMBUHAN DAN WAJIB LAPOR
- 343. ANALIS MANAJEMEN PERKANTORAN
- 344. ANALIS MANAJEMEN RISIKO
- 345. ANALIS MANIFES
- 346. ANALIS MASALAH SOSIAL
- 347. ANALIS MATERI PENYULUHAN
- 348. ANALIS MATERI SIDANG
- 349. ANALIS MEDIA PEMBELAJARAN
- 350. ANALIS MEKASINSME OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
- 351. ANALIS METALOGRAFI
- 352. ANALIS METODE PENYULUHAN
- 353. ANALIS MITIGASI BENCANA
- 354. ANALIS MODEL PENGEMBANGAN INDUSTRI
- 355. ANALIS MONEV DANA REHABILITASI FASILITAS PENDIDIKAN
- 356. ANALIS MONEV DANA RISET
- 357. ANALIS MONEV FISKAL DAERAH
- 358. ANALIS MONEV HASIL TES
- 359. ANALIS MONEV KEBIJAKAN PDRD
- 360. ANALIS MONEV PELAKSANAAN ANGGARAN
- 361. ANALIS MONEV PENDANAAN DAERAH
- 362. ANALIS MONEV PENYALURAN BEASISWA
- 363. ANALIS MUTU AKADEMIK
- 364. ANALIS MUTU HASIL PERIKANAN
- 365. ANALIS MUTU PENDIDIKAN
- 366. ANALIS MUTU PRODUK
- 367. ANALIS MUTU SERTIFIKASI INDUSTRI
- 368. ANALIS NARKOBA
- 369. ANALIS NILAI BUDAYA
- 370. ANALIS NOTIFIKASI

- 371. ANALIS OBAT DAN MAKANAN
- 372. ANALIS OBJEK WISATA
- 373. ANALIS OPERASI INTELIJEN KEIMIGRASIAN
- 374. ANALIS OPTIMALISASI KAS BLU
- 375. ANALIS OPTIMALISASI KAS NEGARA
- 376. ANALIS OPTIMASI, REHABILITASI DAN KONSERVASI LAHAN
- 377. ANALIS ORGANISASI MASYARAKAT
- 378. ANALIS ORGANISASI PERGURUAN TINGGI
- 379. ANALIS PAJAK
- 380. ANALIS PAJAK/RETRIBUSI
- 381. ANALIS PAJAK/RETRIBUSI DAERAH
- 382. ANALIS PAKAN TERNAK
- 383. ANALIS PANGAN
- 384. ANALIS PARIWISATA
- 385. ANALIS PASAR
- 386. ANALIS PASAR HASIL HUTAN
- 387. ANALIS PELABUHAN
- 388. ANALIS PELAKSANAAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
- 389. ANALIS PELAKSANAAN KEMITRAAN PENDIDIKAN
- 390. ANALIS PELAKSANAAN KURIKULUM PENDIDIKAN
- 391. ANALIS PELAKSANAAN PROGRAM INTERNALISASI NILAI DAN DIPLOMASI BUDAYA
- 392. ANALIS PELAKSANAAN PROGRAM KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DAN TRADISI
- 393. ANALIS PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
- 394. ANALIS PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN TENAGA TEKNIS DAN FUNGSIONAL NON PENDIDIK
- 395. ANALIS PELAKSANAAN PROGRAM SERTIFIKASI SDM KEBUDAYAAN
- 396. ANALIS PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH
- 397. ANALIS PELANGGARAN HAM
- 398. ANALIS PELANGGARAN DISIPLIN
- 399. ANALIS PELANGGARAN KEPPH
- 400. ANALIS PELAPORAN DAN TRANSAKSI KEUANGAN
- 401. ANALIS PELAYANAN
- 402. ANALIS PELAYANAN DAN BIMBINGAN USAHA PANAS BUMI
- 403. ANALIS PELAYANAN DAN PENGAWASAN USAHA BIO ENERGI DAN ANEKA EBT
- 404. ANALIS PELAYANAN SOSIAL
- 405. ANALIS PELAYANAN USAHA MINERAL DAN BATUBARA
- 406. ANALIS PELAYARAN
- 407. ANALIS PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN
- 408. ANALIS PELINDUNGAN HAK-HAK SIPIL DAN HAM
- 409. ANALIS PEMANFAATAN CAGAR BUDAYA DAN KOLEKSI MUSEUM
- 410. ANALIS PEMANFAATAN ENERGI
- 411. ANALIS PEMANFAATAN RUANG
- 412. ANALIS PEMANFAATAN TANAH
- 413. ANALIS PEMANPAATAN TEKNOLOGI
- 414. ANALIS PEMANTAUAN PERTANAHAN
- 415. ANALIS PEMANTAUAN SISTEM KEUANGAN
- 416. ANALIS PEMASARAN DAN KERJASAMA
- 417. ANALIS PEMASARAN HASIL PERTANIAN
- 418. ANALIS PEMBANGUNAN
- 419. ANALIS PEMBANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN
- 420. ANALIS PEMBAYARAN JAMINAN KESEHATAN
- 421. ANALIS PEMBAYARAN PERHITUNGAN FIHAK KETIGA DAN PENYELESAIAN TGR
- 422. ANALIS PEMBAYARAN PROGRAM PENSIUN
- 423. ANALIS PEMBELAJARAN KURSUS DAN PELATIHAN
- 424. ANALIS PEMBELAJARAN PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
- 425. ANALIS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN
- 426. ANALIS PEMBERDAYAAN KEMAHASISWAAN
- 427. ANALIS PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEPERCAYAAN TUHAN YANG MAHA ESA DAN TRADISI
- 428. ANALIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

429. ANALIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN
430. ANALIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
431. ANALIS PEMBIAYAAN DAN RISIKO FISKAL
432. ANALIS PEMBIAYAAN PERTANIAN
433. ANALIS PEMBINAAN BLU
434. ANALIS PEMBINAAN KB
435. ANALIS PEMBINAAN KELEMBAGAAN INVESTASI
436. ANALIS PEMBINAAN PELAKSANAAN ANGGARAN
437. ANALIS PEMBINAAN PENILAI
438. ANALIS PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN
439. ANALIS PEMBINAAN PROSES BISNIS DAN HUKUM
440. ANALIS PEMBINAAN UMAT
441. ANALIS PEMBUKAAN LAHAN
442. ANALIS PEMELIHARAAN DAN PEMUGARAN CAGAR BUDAYA DAN KOLEKSI MUSEUM
443. ANALIS PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
444. ANALIS PEMERIKSAAN PAJAK
445. ANALIS PEMERINTAH DAERAH
446. ANALIS PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH
447. ANALIS PEMETA DAN PENILAI TANAH
448. ANALIS PEMILIHAN UMUM
449. ANALIS PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN
450. ANALIS PENAGIHAN
451. ANALIS PENAGIHAN DAN PENGEMBALIAN
452. ANALIS PENAGIHAN PAJAK
453. ANALIS PENANAMAN MODAL
454. ANALIS PENANGGANAN OBJEK VITAL, TRANSPORTASI DAN VVIP
455. ANALIS PENANGGULANGAN KRISIS
456. ANALIS PENANGGULANGAN PENCEMARAN SUMBER DAYA LAUT
457. ANALIS PENANGGULANGAN PENCEMARAN SUMBER DAYA PESISIR
458. ANALIS PENANGKALAN
459. ANALIS PENATAAN KAWASAN
460. ANALIS PENATAGUNAAN TANAH DAN KAWASAN TERTENTU
461. ANALIS PENCEMARAN LAUT
462. ANALIS PENDAFTARAN HAK TANAH DAN GUNA RUANG
463. ANALIS PENDAFTARAN KAPAL PERIKANAN
464. ANALIS PENDAPATAN DAERAH
465. ANALIS PENDAPATAN DAN EKONOMI MAKRO
466. ANALIS PENDAPATAN NEGARA
467. ANALIS PENDAYAGUNAAN LEMBAGA KEAGAMAAN
468. ANALIS PENDIDIK DAN/ATAU SANTRI
469. ANALIS PENDIDIKAN
470. ANALIS PENDIDIKAN KHONGHUCU
471. ANALIS PENEGAKAN INTEGRITAS SDM APARATUR
472. ANALIS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
473. ANALIS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BLU
474. ANALIS PENERAPAN JASA INDUSTRI
475. ANALIS PENERAPAN KEBIJAKAN TEKNOLOGI INDUSTRI
476. ANALIS PENERBANGAN
477. ANALIS PENERIMAAN DAN JAMINAN
478. ANALIS PENERIMAAN DAN PENGEMBALIAN
479. ANALIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
480. ANALIS PENERIMAAN NEGARA MINYAK DAN GAS BUMI
481. ANALIS PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR
482. ANALIS PENERTIBAN PEMANFAATAN RUANG
483. ANALIS PENETAPAN CAGAR BUDAYA DAN KOLEKSI MUSEUM
484. ANALIS PENETAPAN HAK ATAS TANAH
485. ANALIS PENGADUAN MASYARAKAT
486. ANALIS PENGADUAN PEMERINTAHAN
487. ANALIS PENGAMANAN LINGKUNGAN

488. ANALIS PENGANGGARAN INVESTASI, PENERUSAN PINJAMAN DAN KREDIT PROGRAM
489. ANALIS PENGATURAN DAN PENGADAAN TANAH
490. ANALIS PENGAWAKAN KAPAL PERIKANAN
491. ANALIS PENGAWAS
492. ANALIS PENGAWASAN EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI
493. ANALIS PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
494. ANALIS PENGAWASAN MASYARAKAT
495. ANALIS PENGAWASAN MUTU PRODUK
496. ANALIS PENGELOLA DATA KOMODITAS PERKEBUNAN
497. ANALIS PENGELOLAAN ASET SBSN
498. ANALIS PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS
499. ANALIS PENGELOLAAN DANA ALOKASI UMUM
500. ANALIS PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL PAJAK & SDA
501. ANALIS PENGELOLAAN DANA OTSUS DAN DANA TRANSFER LAINNYA
502. ANALIS PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH
503. ANALIS PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA
504. ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN
505. ANALIS PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
506. ANALIS PENGELOLAAN PORTOFOLIO SUN
507. ANALIS PENGELOLAAN REKENING PEMERINTAH
508. ANALIS PENGELOLAAN SARANA PROGRAM
509. ANALIS PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERBENDAHARAAN
510. ANALIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN
511. ANALIS PENGELOLAAN TRANSAKSI SBSN
512. ANALIS PENGEMBANGAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN
513. ANALIS PENGEMBANGAN CAGAR BUDAYA DAN KOLEKSI MUSEUM
514. ANALIS PENGEMBANGAN DAN PENATAAN BATAS ANTAR NEGARA
515. ANALIS PENGEMBANGAN EKONOMI PEDESAAN
516. ANALIS PENGEMBANGAN ENERGI
517. ANALIS PENGEMBANGAN HUTAN
518. ANALIS PENGEMBANGAN IKM
519. ANALIS PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR STANDAR
520. ANALIS PENGEMBANGAN INVESTASI MINYAK DAN GAS BUMI
521. ANALIS PENGEMBANGAN JASA SERTIFIKASI
522. ANALIS PENGEMBANGAN JASA TEKNIK
523. ANALIS PENGEMBANGAN KAPASITAS KEUANGAN DAERAH
524. ANALIS PENGEMBANGAN KAPASITAS PERBENDAHARAAN
525. ANALIS PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK/TENAGA KEPENDIDIKAN
526. ANALIS PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN AIR
527. ANALIS PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN
528. ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI
529. ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI INDUSTRI
530. ANALIS PENGEMBANGAN MODEL EKONOMI MAKRO
531. ANALIS PENGEMBANGAN MODEL TERAPI & REHABILITASI
532. ANALIS PENGEMBANGAN PASAR
533. ANALIS PENGEMBANGAN PAUDNI
534. ANALIS PENGEMBANGAN PESERTA DIDIK
535. ANALIS PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH
536. ANALIS PENGEMBANGAN PROGRAM AKADEMIS
537. ANALIS PENGEMBANGAN PROTOKOL MANAJEMEN KRISIS DAN SIMULASI PENANGANAN KRISIS
538. ANALIS PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA
539. ANALIS PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
540. ANALIS PENGEMBANGAN SDM
541. ANALIS PENGEMBANGAN SISTEM OPERASI MEDIS
542. ANALIS PENGEMBANGAN SISTEM PEMBELAJARAN
543. ANALIS PENGEMBANGAN SISTEM PERBENDAHARAAN
544. ANALIS PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PAUDNI
545. ANALIS PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
546. ANALIS PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MEDIS

547. ANALIS PENGEMBANGAN USAHA AGRO INDUSTRI
548. ANALIS PENGEMBANGAN USAHA HULU
549. ANALIS PENGEMBANGAN WILAYAH
550. ANALIS PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN PERTANAHAN
551. ANALIS PENGENDALIAN LAHAN
552. ANALIS PENGGUNAAN BARANG OPERASI MINYAK DAN GAS BUMI
553. ANALIS PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH
554. ANALIS PENGGUNAAN TENAGA KERJA MINYAK DAN GAS BUMI
555. ANALIS PENGKAJIAN JASA INDUSTRI
556. ANALIS PENGKAJIAN KEBIJAKAN TEKNOLOGI INDUSTRI
557. ANALIS PENGOLAH HASIL PERTANIAN
558. ANALIS PENGUJIAN
559. ANALIS PENGUJIAN KELAIKAN ALAT PENANGKAP IKAN
560. ANALIS PENGUJIAN KELAIKAN KAPAL PERIKANAN
561. ANALIS PENGUKURAN
562. ANALIS PENGUKURAN DAN PEMETAAN
563. ANALIS PENGUSAHAAN DAN PELAYANAN
564. ANALIS PENILAIAN DAN AKREDITASI
565. ANALIS PENILAIAN TANAH DAN KAWASAN
566. ANALIS PENINDAKAN
567. ANALIS PENINGKATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN
568. ANALIS PENINGKATAN USAHA PERTANIAN DAN AGROBISNIS
569. ANALIS PENJAMIN MUTU
570. ANALIS PENTASHIH MUSHAF AL-QURAN
571. ANALIS PENUNTUTAN
572. ANALIS PENYAJIAN DATA SUMBER DAYA IKAN
573. ANALIS PENYAKIT MENULAR
574. ANALIS PENYEDIAAN ENERGI
575. ANALIS PENYELESAIAN LHP/TP/TGR
576. ANALIS PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
577. ANALIS PENYIAPAN PENERAPAN STANDAR
578. ANALIS PENYIDIKAN
579. ANALIS PENYULUH KELUARGA BERENCANA
580. ANALIS PENYULUHAN DAN LAYANAN INFORMASI
581. ANALIS PENYULUHAN SYARIAH
582. ANALIS PENYUSUN PENYIAPAN LAHAN
583. ANALIS PERATURAN ADMINISTRASI
584. ANALIS PERATURAN BLU
585. ANALIS PERATURAN HKI
586. ANALIS PERATURAN IKLIM INDUSTRI
587. ANALIS PERATURAN IKLIM USAHA
588. ANALIS PERATURAN INVESTASI
589. ANALIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
590. ANALIS PERATURAN STANDARDISASI TEKNOLOGI DAN HKI
591. ANALIS PERBANKAN
592. ANALIS PERBENDAHARAAN
593. ANALIS PERDAGANGAN
594. ANALIS PEREKONOMIAN
595. ANALIS PERENCANAAN
596. ANALIS PERENCANAAN ANGGARAN
597. ANALIS PERENCANAAN BISNIS
598. ANALIS PERENCANAAN DAN KERJASAMA
599. ANALIS PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN
600. ANALIS PERENCANAAN DUKUNGAN PEMERINTAH
601. ANALIS PERENCANAAN PENGANGGARAN
602. ANALIS PERENCANAAN STRATEGIS
603. ANALIS PERENCANAAN WILAYAH PERUMAHAN
604. ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
605. ANALIS PERFILMAN
606. ANALIS PERGURUAN TINGGI

607. ANALIS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI
608. ANALIS PERIJINAN
609. ANALIS PERIJINAN DAN PENGAMANAN CAGAR BUDAYA DAN KOLEKSI MUSEUM
610. ANALIS PERIKANAN BUDIDAYA
611. ANALIS PERJANJIAN PENERUSAN PINJAMAN
612. ANALIS PERKARA TANAH DAN RUANG
613. ANALIS PERKEBUNRAYAAN
614. ANALIS PERLENGKAPAN INTELIJEN
615. ANALIS PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN IKAN
616. ANALIS PERLINDUNGAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
617. ANALIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN
618. ANALIS PERLINDUNGAN SUMBER DAYA
619. ANALIS PERMASALAHAN (KASUS-KASUS PILKADES)
620. ANALIS PERMASALAHAN HUKUM
621. ANALIS PERMOHONAN HAK TANAH DAN PENDAFTARAN TANAH
622. ANALIS PERSANDIAN
623. ANALIS PERTAHANAN DAN KEAMANAN
624. ANALIS PERTAMBANGAN
625. ANALIS PERUMAHAN
626. ANALIS PERUMUSAN SNI
627. ANALIS PERUNDANG-UNDANGAN
628. ANALIS PESERTA DIDIK
629. ANALIS PESPARAWI/LPPN
630. ANALIS PESTISIDA
631. ANALIS PETA WILAYAH
632. ANALIS PIHK/PIU
633. ANALIS PINJAMAN DAN OBLIGASI
634. ANALIS PNBP KEMENTERIAN/LEMBAGA
635. ANALIS POLA KONSUMSI PANGAN MASYARAKAT
636. ANALIS POLITIK DALAM NEGERI
637. ANALIS POLITIK HUKUM DAN KEAMANAN
638. ANALIS POLITIK LUAR NEGERI
639. ANALIS POTENSI BUDIDAYA ANEKA KACANG DAN UMBI
640. ANALIS POTENSI BUDIDAYA SEREALIA
641. ANALIS POTENSI KELAUTAN
642. ANALIS POTENSI MASJID
643. ANALIS POTENSI PERBENIHAN
644. ANALIS POTENSI SISWA/SANTRI/MAHASISWA
645. ANALIS POTENSI SUMBER AIR PERMUKAAN
646. ANALIS POTENSI SUMBER AIR TANAH
647. ANALIS POTENSI UMAT
648. ANALIS POTENSI, KEPATUHAN, DAN PENERIMAAN
649. ANALIS PPAT
650. ANALIS PRASARANA DAN ENERGI
651. ANALIS PRASARANA KOTA DAN PEDESAAN
652. ANALIS PRASARANA PENDIDIKAN
653. ANALIS PREKURSOR
654. ANALIS PRODUK HUKUM
655. ANALIS PROFESI DOSEN
656. ANALIS PROGRAM
657. ANALIS PROGRAM BEASISWA
658. ANALIS PROGRAM DAN PORTOFOLIO
659. ANALIS PROGRAM DIKLAT
660. ANALIS PROGRAM ENERGI BARU TERBARUKAN
661. ANALIS PROGRAM KERJASAMA LEMBAGA MASYARAKAT
662. ANALIS PROGRAM KETENAGALISTRIKAN
663. ANALIS PROGRAM MINERAL DAN BATUBARA
664. ANALIS PROGRAM PEMBANGUNAN
665. ANALIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN MASALAH SOSIAL

- 666. ANALIS PROGRAM PEMBERDAYAAN UMAT
- 667. ANALIS PROGRAM PENYULUHAN
- 668. ANALIS PROGRAM STUDI PERGURUAN TINGGI
- 669. ANALIS PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN PERTANIAN
- 670. ANALIS PROSES AKREDITASI LABORATORIUM KALIBRASI
- 671. ANALIS PROSES AKREDITASI LABORATORIUM PENGUJI
- 672. ANALIS PROSES AKREDITASI LS PRODUK, LS PERSONEL, LS HALAL, LS PANGAN ORGANIK
- 673. ANALIS PROSES AKREDITASI LSSM LS SHACCP/LS 22000 LS QS9000
- 674. ANALIS PROSES UJI BANDING
- 675. ANALIS PROSES UJI KOMPARASI
- 676. ANALIS PUBLIKASI
- 677. ANALIS PUPUK ANORGANIK
- 678. ANALIS PUPUK ORGANIK DAN PEMBENAH TANAH
- 679. ANALIS PUSTAKA DAN MUSEUM KEAGAMAAN
- 680. ANALIS RADIASI
- 681. ANALIS RAHASIA NEGARA
- 682. ANALIS RANCANG BANGUN ALAT PENANGKAP IKAN
- 683. ANALIS RANCANG BANGUN KAPAL PERIKANAN
- 684. ANALIS RANCANGAN NASKAH PERJANJIAN
- 685. ANALIS REHABILITASI DAN KONSERVASI
- 686. ANALIS REHABILITASI MASALAH SOSIAL
- 687. ANALIS REKLAMASI
- 688. ANALIS REKRUTMEN HAKIM
- 689. ANALIS RENCANA INDUK JARINGAN TRANSPORTASI DARAT
- 690. ANALIS RENCANA PRODUKSI DAN PEMANFAATAN MINERAL DAN BATUBARA
- 691. ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
- 692. ANALIS RENCANA UMUM ENERGI
- 693. ANALIS RENCANA UMUM PEMADUAN MODA TRANSPORTASI DARAT
- 694. ANALIS RESOLUSI BADAN NON PBB
- 695. ANALIS RESOSIALISASI DAN REHABILITASI
- 696. ANALIS REVANSI DAN PRODUKTIVITAS IPTEK
- 697. ANALIS RISET KEMASAN
- 698. ANALIS RISIKO INVESTASI, PENERUSAN PINJAMAN DAN KREDIT PROGRAM
- 699. ANALIS RISIKO KEUANGAN NEGARA
- 700. ANALIS SAR
- 701. ANALIS SARANA PAUD
- 702. ANALIS SARANA PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
- 703. ANALIS SARANA PRASARANA IBADAH
- 704. ANALIS SARANA PROGRAM KELUARGA BERENCANA
- 705. ANALIS SARANA RISET
- 706. ANALIS SATUAN PENGAWAS INTERNAL
- 707. ANALIS SATUAN PENGAWAS MUTU
- 708. ANALIS SDM APARATUR
- 709. ANALIS SELEKSI DAN PENEMPATAN BEASISWA
- 710. ANALIS SENGKETA DAN KONFLIK TANAH DAN RUANG
- 711. ANALIS SENGKETA PERADILAN
- 712. ANALIS SENGKETA PERTANAHAN
- 713. ANALIS SERTIFIKASI FASILITAS NUKLIR
- 714. ANALIS SERTIFIKASI MUTU INDUSTRI
- 715. ANALIS SETELMEN TRANSAKSI
- 716. ANALIS SISTEM AKUNTANSI BENDAHARA UMUM NEGARA DAN UNIT KHUSUS
- 717. ANALIS SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
- 718. ANALIS SISTEM DAN JARINGAN PERTANAHAN
- 719. ANALIS SISTEM DATA ARKEOLOGI
- 720. ANALIS SISTEM INFORMASI
- 721. ANALIS SISTEM INFORMASI DAN DISEMINASI HUKUM
- 722. ANALIS SISTEM INFORMASI DAN JARINGAN PENDIDIKAN
- 723. ANALIS SISTEM INFORMASI PELAKSANAAN ANGGARAN
- 724. ANALIS SISTEM INFORMASI PERBENDAHARAAN
- 725. ANALIS SISTEM INFORMASI PERTANAHAN

726. ANALIS SISTEM INFORMASI PUSDATIN DAN LPPB
 727. ANALIS SISTEM MUTU DAN LINGKUNGAN
 728. ANALIS SISTEM PEMADUAN MODA TRANSPORTASI PERKOTAAN
 729. ANALIS SOSIAL BUDAYA
 730. ANALIS STANDAR BIAYA
 731. ANALIS STANDAR MUTU BAHAN DAN PERALATAN
 732. ANALIS STANDARD HARGA
 733. ANALIS STANDARDISASI BUDIDAYA
 734. ANALIS STANDARDISASI DAN TEKNOLOGI
 735. ANALIS STANDARDISASI INDUSTRI
 736. ANALIS STANDARDISASI KETENAGALISTRIKAN
 737. ANALIS STANDARDISASI MINERAL DAN BATUBARA
 738. ANALIS STANDARDISASI MINYAK DAN GAS BUMI
 739. ANALIS STATISTIK
 740. ANALIS SUMBER DAYA IPTEK
 741. ANALIS SUMBER SEJARAH
 742. ANALIS SURVEI DAN PEMETAAN TEMATIK
 743. ANALIS TAMAN
 744. ANALIS TANAH PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
 745. ANALIS TANAMAN HIAS/ TANAMAN KOLEKSI
 746. ANALIS TATA KELOLA SUMBER DAYA IKAN
 747. ANALIS TATA LAKSANA
 748. ANALIS TATA PAMERAN
 749. ANALIS TATA PRAJA
 750. ANALIS TATA RUANG
 751. ANALIS TATA USAHA DRN
 752. ANALIS TEKNIK PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
 753. ANALIS TEKNIK SURVEY MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS
 754. ANALIS TEKNIK SURVEY PEMADUAN MODA TRANSPORTASI DARAT
 755. ANALIS TEKNIS SURVEY PENANGANAN DAMPAK TRANSPORTASI DARAT
 756. ANALIS TEKNOLOGI INDUSTRI
 757. ANALIS TEKNOLOGI PEMBELAJARAN
 758. ANALIS TENAGA KEPENDIDIKAN
 759. ANALIS TENAGA KERJA
 760. ANALIS TINDAK LANJUT LHP
 761. ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN
 762. ANALIS TULISAN FIKSI
 763. ANALIS TUNTUTAN GANTI RUGI
 764. ANALIS UJI KONSEKUENSI
 765. ANALIS UPACARA ADAT
 766. ANALIS USAHA JASA MINERAL DAN BATUBARA
 767. ANALIS USAHA PENUNJANG MINYAK DAN GAS BUMI
 768. ANALIS WAKAF
 769. ANALIS WARISAN BUDAYA
 770. ANALIS WAWASAN KEBANGSAAN
 771. ANALIS WILAYAH KEPROSPEKAN
 772. ANALIS WILAYAH KERJA
 773. ANALIS WILAYAH PERTAMBANGAN

2. ASISTEN (3)

IKHTISAR JABATAN:

Menerima, memeriksa dan membantu serta mengkonsultasikan dengan pejabat tentang **obyek kerja** sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

URAIAN TUGAS:

- Menerima dan memeriksa data **obyek kerja** dari pejabat **obyek kerja** sesuai prosedur yang berlaku, sebagai bahan pelaksanaan tugas;
- Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pejabat **obyek kerja** sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- c. Membantu kegiatan pejabat **obyek kerja** sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Mengkonsultasikan kenda yang timbul dengan pejabat **obyek kerja** sesuai prosedur untuk mendapat penyelesaian dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Mengonsep hasil obyek kerja untuk disampaikan kepada atasan guna mendapatkan persetujuan;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur untuk bahan perbaikan;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai prosedur sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

Yang Termasuk Dalam Jabatan ASISTEN:

1. ASISTEN CLIENT COORDINATOR
2. ASISTEN PELELANG
3. ASISTEN PENGELOLA TEMPAT TAHANAN

3. BENDAHARA (1)

IKHTISAR JABATAN:

Mengelola serta mengkonsultasikan masalah keuangan dan anggaran dengan pejabat obyek kerja sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

URAIAN TUGAS:

- a. Mengelola uang/surat berharga/barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk bahan pertanggungjawaban;
- b. Mengajukan surat permintaan pembayaran ke KPKN berdasarkan surat perintah untuk mengurus keuangan;
- c. Mengurus surat perintah membayar uang SPM Giro berdasarkan prosedur yang berlaku untuk penerimaan uang;
- d. Melakukan pembayaran atas tagihan-tagihan berdasarkan surat dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Melayani permintaan uang muka berdasarkan surat perintah untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Mencatat, men5rusun penerimaan dan pengeluaran uang di dalam formulir daftar penerimaan dan pengeluaran yang telah ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku untuk bahan lampiran laporan;
- g. Membuat laporan mengenai permintaan, pengeluaran dan keadaan kas berdasarkan penerimaan dan pengeluaran sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.

Yang Termasuk Dalam Jabatan BENDAHARA:

1. BENDAHARA

4. KOORDINATOR (13)

IKHTISAR JABATAN:

Mengkoordinir, merencanakan dan membuat laporan kegiatan suatu **obyek kerja** sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan optimal.

URAIAN TUGAS:

- a. Mengkoordinir kegiatan suatu **obyek kerja** sesuai prosedur yang berlaku agar kegiatan berjalan lancar;
- b. Mengatur dan mengurus keperluan dan kebutuhan peralatan kegiatan suatu **obyek kerja** sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar kegiatan berjalan lancar;

- c. Mengelola penggunaan dana kegiatan **obyek kerja** sesuai prosedur yang berlaku agar kegiatan berjalan lancar;
- d. Memantau kegiatan **obyek kerja** sesuai prosedur yang berlaku agar kegiatan berjalan lancar;
- e. Menghimpun dan membuat laporan kegiatan **obyek kerja** sesuai prosedur yang berlaku agar kegiatan berjalan lancar;
- f. Menyiapkan bahan kegiatan **obyek kerja** sesuai prosedur yang berlaku agar kegiatan berjalan lancar;
- g. Mengatur pelaksanaan kegiatan **obyek kerja** sesuai prosedur yang berlaku agar kegiatan berjalan lancar;
- h. Memberi pengarahan kegiatan **obyek kerja** sesuai prosedur yang berlaku agar kegiatan berjalan lancar;
- i. Melaporkan hasil kegiatan **obyek kerja** sesuai prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara lisan maupun tertulis.

Yang Termasuk Dalam Jabatan KOORDINATOR:

1. KOORDINATOR
2. KOORDINATOR KEBUN PERCOBAAN
3. KOORDINATOR LABORATORIUM DISEMINASI
4. KOORDINATOR PENGEMBANGAN SISTEM UJIAN, TES DAN PENGUKURAN
5. KOORDINATOR PENGOLAHAN HASIL UJIAN
6. KOORDINATOR PENYIAPAN DAN PENGGANDAAN BAHAN UJIAN
7. KOORDINATOR PENYIAPAN NASKAH
8. KOORDINATOR PERGUDANGAN
9. KOORDINATOR PRODUKSI DAN PENERBITAN
10. KOORDINATOR SISTEM INFORMASI DISTRIBUSI
11. KETUA UNIT MULTIMEDIA
12. KETUA UPPM
13. KOMANDAN PETUGAS KEAMANAN

5. KURATOR (2)

IKHTISAR JABATAN:

Mengadakan riset, mengumpulkan, menyimpan, menjamin keselamatan dan kelestarian isi beberapa arsip dan benda sejarah budaya, artistik, seni, dan benda lain yang mengorganisir pameran musium dan gedung kesenian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar benda-benda tersebut terpelihara dan dapat diambil manfaatnya dalam jangka waktu yang lama.

URAIAN TUGAS:

- a. meneliti, menaksir dan mengembangkan, mengorganisir dan melestarikan dokumen penting dan berharga menurut sejarah, seperti dokumen pemerintah, dokumen swasta, photograph, rekaman suara, dan film sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar benda-benda tersebut dapat terpelihara dan dapat diambil manfaatnya dalam jangka waktu yang lama;
- b. Mengatur dan melaksanakan persiapan index, biografi, salinan microfilm, dan bantuan referensi lain pada bahan yang dikoleksi dan membuatnya sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk dapat dimanfaatkan dengan optimal oleh para pengguna;
- c. Meneliti asal mula distribusi dan pengguna bahan serta benda-benda kepentingan sejarah dan budaya sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar benda-benda tersebut terpelihara dan dapat diambil manfaatnya dalam jangka waktu lama;
- d. Mengorganisir, mengembangkan dan menjaga koleksi benda-benda artistik ilmiah atau yang berarti menurut sejarah dimuseum atau gedung kesenian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar benda-benda tersebut terpelihara dan dapat diambil manfaatnya dalam jangka waktu yang lama;
- e. Mengatur atau melaksanakan klasifikasi dan membuat daftar nama-nama buku di museum dan koleksi gedung kesenian dan mengkoordinir pameran sesuai prosedur

- dan ketentuan yang berlaku agar dapat diketahui dimanfaatkan dengan optimal oleh masyarakat;
- f. Menyiapkan makalah dan laporan ilmiah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar usaha pemeliharaan dapat dilaksanakan dengan optimal;
 - g. Melaporkan hasil kegiatan obyek kerja sesuai prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

Yang Termasuk Dalam Jabatan KURATOR:

- 1. KURATOR KOLEKSI MUSEUM
- 2. KURATOR SENI

6. PEMELIHARA (12)

IKHTISAR JABATAN:

Menerima, memeriksa, dan mempelajari karakteristik, spesifikasi dan hal-hal yang terkait dengan **obyek kerja** serta memelihara **obyek kerja** sesuai dengan prosedur dengan ketentuan yang berlaku untuk tercapainya sasaran yang diharapkan.

URAIAN TUGAS:

- a. Menerima dan memeriksa **obyek kerja** dari pejabat yang berwenang atau yang terkait sesuai dengan prosedur dan ketentuan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- b. Mempelajari karakteristik, spesifikasi dan hal-hal yang terkait dengan **obyek kerja** sesuai dengan prosedur untuk mengetahui cara dan teknik pemeliharaan agar menunjang pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan pemeliharaan **obyek kerja** sesuai prosedur agar **obyek kerja** dapat dipelihara dengan baik;
- d. Mencatat **obyek kerja** mengalami kerusakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk dilaporkan pada pejabat berwenang dan terkait;
- e. Mengevaluasi dan mengkaji ulang dengan cara mendiskusikan dengan pejabat yang berwenang dan terkait sesuai dengan prosedur untuk keberhasilan pemeliharaan **obyek kerja** sesuai yang diharapkan;
- f. Melaporkan kepada atasan sesuai dengan prosedur sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan baik secara lisan maupun tertulis.

Yang Termasuk Dalam Jabatan PEMELIHARA:

- 1. PEMELIHARA BANGUNAN
- 2. PEMELIHARA JALAN
- 3. PEMELIHARA KEBUN
- 4. PEMELIHARA KENDARAAN
- 5. PEMELIHARA KOLEKSI DAN MUSEUM
- 6. PEMELIHARA PENERANGAN JALAN
- 7. PEMELIHARA PERALATAN
- 8. PEMELIHARA SARANA DAN PRASARANA
- 9. PEMELIHARA SATWA
- 10. KONSERVATOR
- 11. PERAWAT TERNAK
- 12. PREPARATOR

7. PEMERIKSA (39)

IKHTISAR JABATAN:

Mencatat, menginventarisir, mengelompokan, dan memeriksa, **obyek kerja** yang diserahkan dari pejabat yang berwenang, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar permasalahan dapat ditemukan.

URAIAN TUGAS:

- a. Mencatat dan menghitung **obyek kerja** yang diserahkan dari pejabat yang berwenang, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar **obyek kerja** yang diperiksa dapat diketahui jumlahnya;
- b. Menginventarisir permasalahan **obyek kerja** yang diberikan dari pejabat yang berwenang, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar **obyek kerja** dapat diketahui permasalahannya;
- c. Mengelompokan **obyek kerja** menurut jenis dan sifat permasalahannya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pemeriksaan;
- d. Melakukan pemeriksaan **obyek kerja**, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar mendapatkan temuan sesuai dengan yang diharapkan;
- e. Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan
- f. Melakukan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan petunjuk atasan baik tertulis maupun lisan.

Yang Termasuk Dalam Jabatan PEMERIKSA:

1. PEMERIKSA ALAT MESIN PERTANIAN
2. PEMERIKSA ANGGARAN
3. PEMERIKSA BAHASA/SASTRA
4. PEMERIKSA CUACA
5. PEMERIKSA DATA PROFESI KEUANGAN
6. PEMERIKSA GUDANG SENJATA
7. PEMERIKSA INDUSTRI
8. PEMERIKSA INTELIJEN
9. PEMERIKSA IRIGASI
10. PEMERIKSA JALAN DAN JEMBATAN
11. PEMERIKSA KEKAYAAN NEGARA
12. PEMERIKSA KELISTRIKAN
13. PEMERIKSA KEPARIWISATAAN
14. PEMERIKSA KEPENDUDUKAN
15. PEMERIKSA KESELAMATAN DARAT (JALAN)
16. PEMERIKSA KESELAMATAN PELAYARAN
17. PEMERIKSA KESELAMATAN UDARA
18. PEMERIKSA KETRANSMIGRASIAN
19. PEMERIKSA LALU LINTAS DARAT
20. PEMERIKSA LALU LINTAS LAUT
21. PEMERIKSA LALU LINTAS UDARA
22. PEMERIKSA PELABUHAN
23. PEMERIKSA PELAPORAN DAN TRANSAKSI KEUANGAN
24. PEMERIKSA PELAYANAN KB
25. PEMERIKSA PEMBANGUNAN DAERAH TERPENCIL
26. PEMERIKSA PENANAMAN MODAL
27. PEMERIKSA PENELITIAN DAN HKI
28. PEMERIKSA PENGADILAN
29. PEMERIKSA PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN DAN AIR IRIGASI
30. PEMERIKSA PEREMPUAN DAN ANAK
31. PEMERIKSA PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
32. PEMERIKSA PERTANAHAN
33. PEMERIKSA PERUSAHAAN NEGARA
34. PEMERIKSA PUPUK DAN PESTISIDA
35. PEMERIKSA SANITASI
36. PEMERIKSA SEKTOR SUMBER DAYA AIR
37. PEMERIKSA TEKNOLOGI INFORMASI
38. PEMERIKSA TERMINAL
39. PEMERIKSA TRANSAKSI KEUANGAN

8. PEMROSES (1)

IKHTISAR JABATAN:

Menerima, mencatat, menghitung dan memproses data **objek kerja** sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.

URAIAN TUGAS:

- a. Menerima dan mencatat **objek kerja** sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut;
- b. Memeriksa data **objek kerja** sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka proses **objek kerja**;
- c. Mengelompokkan data objek kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut;
- d. Memroses objek kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai wujud pelayanan prima;
- e. Memeriksa dan mengkonsultasikan kendala yang timbul dalam pelaksanaan proses objek kerja dengan pejabat yang berwenang dan terkait sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk penyelesaian masalah;
- f. Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sesuai dengan prosedur sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

Yang Termasuk Dalam Jabatan PEMROSES:

1. PEMROSES DOKUMEN ATDIKBUD DAN SEKOLAHINDONESIA

9. PENAGIH (1)

IKHTISAR JABATAN:

Menerima dan memeriksa data tagihan **objek kerja** serta menagih kepada orang yang menjadi subjek dari **objek kerja** sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, untuk diproses lebih lanjut.

URAIAN TUGAS:

- a. Menerima dan memeriksa data tagihan **obyek kerja** dari pejabat yang berwenang sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut;
- b. Mengelompokkan dan mengkonfirmasikan data tagihan dengan pejabat yang berwenang dan terkait sesuai prosedur dalam rangka penagihan;
- c. Menagih **obyek kerja** kepada subjek dari **obyek kerja** sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut;
- d. Menyusun dan mempelajari permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan penagihan sesuai prosedur untuk penyelesaian proses selanjutnya;
- e. Menyerahkan hasil tagihan kepada pejabat yang berwenang sesuai prosedur sebagai pertanggungjawaban penagihan;
- f. Melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan kepada atasan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

Yang Termasuk Dalam Jabatan PENAGIH:

1. PENAGIH RETRIBUSI

10. PENATA (6)

IKHTISAR JABATAN:

Menerima dan mempelajari, serta menata **obyek kerja** sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tercapai hasil yang optimal.

URAIAN TUGAS:

- a. Menerima dan memeriksa **obyek kerja** sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlalu, untuk diproses lebih lanjut;

- b. Mempelajari **obyek kerja**, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, untuk mencapai hasil yang diharapkan;
- c. Menata **obyek kerja** sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, untuk mencapai hasil yang diharapkan;
- d. Mengkonsultasikan kendala proses penataan **obyek kerja**, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, untuk mencapai hasil yang diharapkan;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan penataan **obyek kerja** dengan caramembandingkan antara rencana dengan pelaksanaan penataan **obyek kerja** sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
- f. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan dan hasil sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

Yang Termasuk Dalam Jabatan PENATA:

1. PENATA DOKUMEN BAHASA DAN SASTRA
2. PENATA DOKUMEN HASIL PRODUKSI
3. PENATA KENDARAAN DINAS
4. PENATA KEUANGAN
5. PENATA LAPORAN KEUANGAN
6. PENATA RONTGEN

11. PENELAAH (27)

IKHTISAR JABATAN:

Menelaah **obyek kerja** dengan cara menginventarisasi, mengumpulkan, memilah, mengecek, membuat konsep hasil penelaahan **obyek kerja** sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk bahan pertimbangan kebijakan.

URAIAN TUGAS:

- a. Menginventarisasi peraturan perundangan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan terkait dengan **obyek kerja** untuk digunakan sebagai landasan hukum pengambilan keputusan;
- b. Mengumpulkan data-data dan informasi serta permasalahan yang ada sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan kerja;
- c. Memilah-milah permasalahan **obyek kerja** sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan penyelesaian;
- d. Mengecek kebenaran dan keabsahan terhadap **obyek kerja** sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui apakah **obyek kerja** tersebut sudah memenuhi persyaratan;
- e. Membuat konsep pemecahan masalah terhadap **obyek kerja** sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai hasil telaahan;
- f. Menetik konsep rekomendasi atas hasil telaahan **obyek kerja** sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai hasil telaahan untuk bahan pertimbangan kebijakan pimpinan;
- g. Melaporkan kepada atasan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan.

Yang Termasuk Dalam Jabatan PENELAAH:

1. PENELAAH AUDIT KESELAMATAN JALAN
2. PENELAAH BAHAN JALAN
3. PENELAAH BAHAN KAJIAN BENCANA ALAM
4. PENELAAH DAMPAK LINGKUNGAN
5. PENELAAH DATA PENGENDALIAN BAHAN BAKU
6. PENELAAH DATA PENGOLAHAN INDUSTRI PRIMER
7. PENELAAH DATA PENGUJIAN MUTU PERSUTERAAN ALAM
8. PENELAAH DATA PENGUKURAN DAN PENGUJIAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU
9. PENELAAH DATA PENGUKURAN DAN PENGUJIAN HASIL HUTAN KAYU
10. PENELAAH DATA SDA

11. PENELAAH DATA SERTIFIKASI DAN AKREDITASI TELUR ULAT SUTERA
12. PENELAAH DATA SERTIFIKASI MUTU BENIH/BIBIT
13. PENELAAH DATA SISTEM INFORMASI PERBENIHAN DAN PEMBIBITAN TANAMAN HUTAN
14. PENELAAH DATA STATISTIK PENGELOLAAN DAS
15. PENELAAH DATA SUMBER BENIH
16. PENELAAH DATA SUMBERDAYA GENETIK
17. PENELAAH DATA TANDA LEGALITAS HASIL HUTAN
18. PENELAAH DIFUSI & ALIH TEKNOLOGI
19. PENELAAH EROSI DAN SEDIMENTASI
20. PENELAAH KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
21. PENELAAH LHP DAN KERUGIAN NEGARA
22. PENELAAH PENERAPAN & PELAYANAN TEKNIS
23. PENELAAH PENGADAAN TANAH
24. PENELAAH PENGELOLAAN LEGER JALAN
25. PENELAAH PENGEMBANGAN USAHA
26. PENELAAH PERJANJIAN & INFORMASI HUKUM
27. PENELITI LABORATORIUM

12. PENGAMAT(4)

IKHTISAR JABATAN:

Mengamati dan membuat analisis **objek kerja** dengan cara menyiapkan, mengelompokkan, mencatat, dan membuat rekomendasi sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kepentingan pihak-pihak terkait.

URAIAN TUGAS:

- a. Menyiapkan catatan dan referensi dan **obyek kerja** sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Mengelompokkan **obyek kerja** berdasarkan jenis sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pekerjaan;
- c. Mencatat perkembangan **obyek kerja** sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk bahan pemantauan;
- d. Membuat rekomendasi **obyek kerja** sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pengambilan keputusan;
- e. Melaporkan hasil kegiatan untuk disampaikan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tulisan maupun lisan.

Yang Termasuk Dalam Jabatan PENGAMAT:

1. PENGAMAT PERBEKALAN
2. PENGAMAT TEKNIKA
3. PEMANTAU PELAKSANAAN RENCANA UMUM ENERGI
4. SURVEYOR PENANGANAN DAMPAK TRANSPORTASI DARAT

13. PENGAMBIL SAMPEL(1)

IKHTISAR JABATAN:

Melakukan pengambilan sampel **objek kerja** dengan cara menyusun jadwal kerja, menyiapkan, alat, dan perlengkapan, mendatangi lokasi **objek kerja**, mencatat, mengelompokkan, member kode dan menyerahkan sampel sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar dapat digunakan sesuai dengan tugasnya.

URAIAN TUGAS:

- a. Menyusun jadwal kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan lancar;
- b. Menyiapkan bahan, alat dan perlengkapan yang akan dipergunakan berdasarkan pelaksanaan tugas agar mempermudah pekerjaan;
- c. Melakukan pengambilan sampel di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan agar dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan;

- d. Mencatat, mengelompokkan, member kode/tanda sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan agar tidak terjadi kekeliruan;
- e. Menyerahkan sampel kepada yang berkepentingan sesuai dengan prosedur dan ketentuan agar dapat digunakan dalam proses kegiatan selanjutnya;
- f. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan;

Yang Termasuk Dalam Jabatan PENGAMBIL SAMPEL:

1. PENGAMBIL SAMPEL

14. PENGAWAS (83)

IKHTISAR JABATAN:

Menerima, mempelajari, dan mengawasi **obyek kerja** sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut.

URAIAN TUGAS:

- a. Menerima dan menginventarisasi **data obyek** kerja sesuai prosedur untuk diproses lebih lanjut;
- b. Mengklasifikasi data **data obyek** sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan;
- c. Mempelajari data **data obyek** sesuai prosedur yang berlaku dalam rangkapelaksanaan pengawasan;
- d. Mengidentifikasi data **data obyek** sesuai prosedur dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- e. Mengawasi **obyek kerja** sesuai prosedur dalam rangka tercapainya sasaranyang diharapkan;
- f. Mengevaluasi dan mengkonsultasikan permasalahan yang timbul dengan pejabat yang berwenang dan terkait sesuai prosedur agar tercapai sasaran yang diharapkan;
- g. Melaporkan pelaksanaan tugas sesuai prosedur sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan.

Yang Termasuk Dalam Jabatan PENGAWAS:

1. PENGAWAS ALSINTAN
2. PENGAWAS ANGKUTAN DAN TERMINAL
3. PENGAWAS BAHASA/SASTRA
4. PENGAWAS BANGUNAN DAN GEDUNG
5. PENGAWAS BANGUNAN DAN TAMAN
6. PENGAWAS BARANG BEREDAR DAN JASA
7. PENGAWAS CUACA
8. PENGAWAS DAN PEMBINA ANGKUTAN
9. PENGAWAS DAN PEMBINA TERMINAL
10. PENGAWAS DAN PENYIDIK STANDARDISASI INDUSTRI
11. PENGAWAS FISIK PEMUKIMAN
12. PENGAWAS HARGA PANGAN
13. PENGAWAS HYGIENE, SANITASI USAHA PETERNAKAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
14. PENGAWAS INDUSTRI
15. PENGAWAS IRIGASI
16. PENGAWAS JALAN DAN JEMBATAN
17. PENGAWAS JARINGAN UTILITAS
18. PENGAWAS K3 DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN
19. PENGAWAS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
20. PENGAWAS KELISTRIKAN
21. PENGAWAS KEMAHASISWAAN
22. PENGAWAS KEPARIWISATAAN
23. PENGAWAS KEPATUHAN TRANSAKSI KEUANGAN

24. PENGAWAS KEPENDUDUKAN
25. PENGAWAS KESELAMATAN ANGKUTAN
26. PENGAWAS KESELAMATAN DARAT/JALAN
27. PENGAWAS KESELAMATAN UDARA
28. PENGAWAS KETRANSMIGRASIAN
29. PENGAWAS KONSERVASI ENERGI
30. PENGAWAS LALU LINTAS DARAT
31. PENGAWAS LALU LINTAS HEWAN DAN WILAYAH KARANTINA HEWAN
32. PENGAWAS LALU LINTAS LAUT
33. PENGAWAS LALU LINTAS UDARA
34. PENGAWAS LAPANGAN ANGKUTAN SAMPAH
35. PENGAWAS LAPANGAN PETUGAS KEBERSIHAN JALAN, SALURAN DAN SELOKAN
36. PENGAWAS LAPANGAN PETUGAS KEBERSIHAN TPA
37. PENGAWAS LAPANGAN PETUGAS PERTAMANAN
38. PENGAWAS MONITORING DAN EVALUASI IMUNISASI PUSKESMAS
39. PENGAWAS MUTU BIBIT TERNAK
40. PENGAWAS MUTU HASIL KEHUTANAN
41. PENGAWAS MUTU HASIL PERKEBUNAN
42. PENGAWAS MUTU PAKAN DAN PRODUksi BIBIT TERNAK BESAR
43. PENGAWAS MUTU PAKAN DAN PRODUksi BIBIT TERNAK KECIL DAN UNGGAS
44. PENGAWAS OLAH RAGA
45. PENGAWAS OPERASI KILANG
46. PENGAWAS OPERASI UTILITAS
47. PENGAWAS PELABUHAN
48. PENGAWAS PELAPORAN DAN TRANSAKSI KEUANGAN
49. PENGAWAS PELAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN
50. PENGAWAS PELAYANAN KB
51. PENGAWAS PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
52. PENGAWAS PEMANFAATAN TANAH
53. PENGAWAS PEMBANGUNAN DAERAH TERPENCIL
54. PENGAWAS PENANAMAN MODAL
55. PENGAWAS PENELITIAN DAN HKI
56. PENGAWAS PENGAIRAN
57. PENGAWAS PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN DAN AIR IRIGASI
58. PENGAWAS PENGEMBANGAN SARANA IPTEK
59. PENGAWAS PENGOPERASIAN ALAT BERAT
60. PENGAWAS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
61. PENGAWAS PENTASHIHAN
62. PENGAWAS PENYAKIT DAN PENGENDALI PENYAKIT HEWAN
63. PENGAWAS PENYAKIT DAN PENGENDALI PENYAKIT IKAN
64. PENGAWAS PENYELENGGARA DAN PELAKU PASAR LELANG
65. PENGAWAS PERBATASAN
66. PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
67. PENGAWAS PEREMPUAN DAN ANAK
68. PENGAWAS PERHOTELAN
69. PENGAWAS PERPUSTAKAAN
70. PENGAWAS PERUSAHAAN NEGARA
71. PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA
72. PENGAWAS REHABILITASI NARKOBA
73. PENGAWAS RESI GUDANG
74. PENGAWAS SARANA BENGKEL
75. PENGAWAS TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN
76. PENGAWAS TATA PERTAMANAN
77. PENGAWAS TATA RUANG
78. PENGAWAS TEKNOLOGI INFORMASI
79. PENGAWAS TELEKOMUNIKASI
80. PENGAWAS TERMINAL
81. PENGAWAS TRANSAKSI PASAR LELANG
82. PENGAWAS TRANSPORTASI
83. PENGAWAS USAHA OPERASI PRODUksi DAN PEMASARAN

15. PENGELOLA (629)

IKHTISAR JABATAN:

Mengelola **obyek kerja** dengan cara menyusun program, mengendalikan dan mengkoordinasikan serta memeriksa dan mengevaluasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan

URAIAN TUGAS:

- a. Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan **obyek kerja** sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;
- b. Memantau, **obyek kerja** sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal;
- c. Mengendalikan program kerja, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;
- d. Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;
- e. Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya; dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan.

Yang Termasuk Dalam Jabatan PENGELOLA:

1. PENGELOLA ADAT DAN KESENIAN
2. PENGELOLA ADMINISTRASI & DOKUMEN HKI
3. PENGELOLA ADMINISTRASI KERJASAMA LUAR NEGERI
4. PENGELOLA ADMINISTRASI KPHI
5. PENGELOLA ADMINISTRASI LSP
6. PENGELOLA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
7. PENGELOLA ADMINISTRASI PERTANAHAN DESA/KELURAHAN DAN PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
8. PENGELOLA ADMINISTRASI SIMLUHTAN
9. PENGELOLA ADMINISTRASI TEMPAT UJI KOMPETENSI
10. PENGELOLA ADVOKASI KONSELING DAN PEMBINAAN KB DAN KESEHATAN REPRODUKSI
11. PENGELOLA AKTA DAN LEGALISASI
12. PENGELOLA AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
13. PENGELOLA AKUISISI
14. PENGELOLA AKUNTABILITAS
15. PENGELOLA AKUNTANSI
16. PENGELOLA ALAT PENGUKURAN DAN PEMETAAN
17. PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI
18. PENGELOLA ALSINTAN
19. PENGELOLA ANGGARAN
20. PENGELOLA ANGGARAN SEKRETARIAT DAERAH
21. PENGELOLA ANGKUTAN KENDARAAN
22. PENGELOLA APRESIASI FILM
23. PENGELOLA ARKEOLOGI
24. PENGELOLA ASRAMA
25. PENGELOLA BAHAN AKADEMIK DAN PENGAJARAN
26. PENGELOLA BAHAN DATABASE KELEMBAGAAN PETANI
27. PENGELOLA BAHAN PEMBERI KETATALAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN
28. PENGELOLA BAHAN PENGUATAN/PEMBERDAYAAN LEMBAGA
29. PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN
30. PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN USAHATANI
31. PENGELOLA BAHAN PUSTAKA
32. PENGELOLA BANDING DAN GUGATAN
33. PENGELOLA BANGUNAN GEDUNG
34. PENGELOLA BANK SOAL
35. PENGELOLA BANTUAN HUKUM

36. PENGELOLA BANTUAN KEAGAMAAN I (MASJID, GEREJA, PURA DAN WIHARA)
37. PENGELOLA BANTUAN KEBUDAYAAN
38. PENGELOLA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA (ADD, PAJAK, PBB, TERMINAL DAN PASAR)
39. PENGELOLA BANTUAN OPERASIONAL
40. PENGELOLA BANTUAN ORMAS SOSIAL
41. PENGELOLA BANTUAN PENDIDIKAN
42. PENGELOLA BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH
43. PENGELOLA BARANG PERSEDIAAN DAN BARANG MILIK NEGARA
44. PENGELOLA BATAS WILAYAH, RUPABUMI DAN PATEN
45. PENGELOLA BENGKEL
46. PENGELOLA BERKAS PENINJAUAN KEMBALI
47. PENGELOLA BIMBINGAN DAN KONSELING
48. PENGELOLA BIMBINGAN MASYARAKAT
49. PENGELOLA BIMBINGAN SOSIAL
50. PENGELOLA BIMBINGAN TEKNIS DAN BANTUAN TEKNIS
51. PENGELOLA BIMBINGAN TEKNIS SERTIFIKASI PROFESI
52. PENGELOLA BIMBINGAN TEKNIS STANDARDISASI KOMPETENSI
53. PENGELOLA BINA KESEJAHTERAAN KELUARGA
54. PENGELOLA BUDIDAYA DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
55. PENGELOLA BUDIDAYA DAN PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN
56. PENGELOLA BUDIDAYA PENGEMBANGAN TERNAK DAN HEWAN LAINNYA
57. PENGELOLA CAGAR BUDAYA DAN KOLEKSI MUSEUM
58. PENGELOLA DAMPAK PENOMENA ALAM (KEKERINGAN DAN PEREDARAN PESTISIDA)
59. PENGELOLA DAN INFORMASI NILAI TANAH
60. PENGELOLA DAN KEBUTUHAN BIBIT TANAMAN PADI, BUAH-BUAHAN SERTA SAYURAN
61. PENGELOLA DATA ADMINISTRASI BUKTI PERMULAAN DAN PENYIDIKAN
62. PENGELOLA DATA ADMINISTRASI DAN BIMBINGAN PEMERIKSAAN
63. PENGELOLA DATA ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI
64. PENGELOLA DATA ALUMNI
65. PENGELOLA DATA ALUR DAN PERAMBUAN SDP
66. PENGELOLA DATA ANGKUTAN SDP
67. PENGELOLA DATA APRESIASI FILM
68. PENGELOLA DATA ARKEOLOGI
69. PENGELOLA DATA BANTUAN SOSIAL
70. PENGELOLA DATA BELANJA DAN LAPORAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH
71. PENGELOLA DATA BIMBINGAN DAN KONSELING
72. PENGELOLA DATA BIMBINGAN EKSTENSIFIKASI
73. PENGELOLA DATA BIMBINGAN PENDAFTARAN
74. PENGELOLA DATA CAGAR BUDAYA DAN KOLEKSI MUSEUM
75. PENGELOLA DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN
76. PENGELOLA DATA DAN INFORMASI PERPAJAKAN
77. PENGELOLA DATA DAN POTENSI PAJAK
78. PENGELOLA DATA DAN SISTEM PEMBELAJARAN
79. PENGELOLA DATA DIPLOMASI BUDAYA DALAM NEGERI
80. PENGELOLA DATA DIPLOMASI BUDAYA LUAR NEGERI
81. PENGELOLA DATA EDUKASI
82. PENGELOLA DATA EKSPLORASI CAGAR BUDAYA
83. PENGELOLA DATA EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL
84. PENGELOLA DATA FASILITASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERTANAHAN
85. PENGELOLA DATA HAK ATAS TANAH
86. PENGELOLA DATA HUBUNGAN MASYARAKAT DAN RUMAH TANGGA
87. PENGELOLA DATA INFORMASI, DATA, LAPORAN, DAN PENGADUAN
88. PENGELOLA DATA JARINGAN LINTAS TRANSPORTASI SDP
89. PENGELOLA DATA JARINGAN TRANSPORTASI JALAN
90. PENGELOLA DATA KARIR PENDIDIK
91. PENGELOLA DATA KEBAHASAAN
92. PENGELOLA DATA KEKAYAAN BUDAYA
93. PENGELOLA DATA KELEMBAGAAN BENIH

94. PENGELOLA DATA KELEMBAGAAN KURSUS DAN PELATIHAN
95. PENGELOLA DATA KESENIAN DAN PERFILMAN
96. PENGELOLA DATA KEUANGAN DAERAH
97. PENGELOLA DATA KINERJA ATDIKBUD DAN SEKOLAH INDONESIA
98. PENGELOLA DATA KOMUNITAS ADAT
99. PENGELOLA DATA KONSOLIDASI TANAH
100. PENGELOLA DATA KREATIVITAS DAN INOVASI
101. PENGELOLA DATA KURIKULUM DAN PERBUKUAN PENDIDIKAN MENENGAH
102. PENGELOLA DATA LANDREFORM
103. PENGELOLA DATA LAYANAN INFORMASI DAN EDUKASI PUBLIK
104. PENGELOLA DATA LAYANAN PUBLIK DAN HUBUNGAN INVESTOR
105. PENGELOLA DATA LINGKUNGAN BUDAYA
106. PENGELOLA DATA LITERASI FILM
107. PENGELOLA DATA MONEV BERKAS SENGKETA
108. PENGELOLA DATA MONEV PROGRAM BEASISWA
109. PENGELOLA DATA MONEV SBSN
110. PENGELOLA DATA MUTU DAN SUPERVISI
111. PENGELOLA DATA MUTU PENDIDIKAN
112. PENGELOLA DATA NILAI BUDAYA
113. PENGELOLA DATA OBSERVASI
114. PENGELOLA DATA PAMERAN DAN KEMITRAAN
115. PENGELOLA DATA PARTISIPASI
116. PENGELOLA DATA PASCA PANEN
117. PENGELOLA DATA PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN
118. PENGELOLA DATA PELAKSANAAN PROGRAM INTERNALISASI NILAI DAN DIPLOMASI BUDAYA
119. PENGELOLA DATA PELAKSANAAN PROGRAM SERTIFIKASI SDM KEBUDAYAAN
120. PENGELOLA DATA PELAYANAN PERPAJAKAN
121. PENGELOLA DATA PEMANFAATAN CAGAR BUDAYA DAN KOLEksi MUSEUM
122. PENGELOLA DATA PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH
123. PENGELOLA DATA PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA
124. PENGELOLA DATA PEMBERDAYAAN KEMAHASISWAAN
125. PENGELOLA DATA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN
126. PENGELOLA DATA PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN
127. PENGELOLA DATA PEMETAAN SEJARAH
128. PENGELOLA DATA PENATAGUNAAN TANAH
129. PENGELOLA DATA PENCAIRAN DANA
130. PENGELOLA DATA PENCEGAHAN DAN MONITORING
131. PENGELOLA DATA PENDIDIKAN DAN EVALUASI
132. PENGELOLA DATA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
133. PENGELOLA DATA PENELITIAN DASAR DAN PENGEMBANGAN ILMU
134. PENGELOLA DATA PENGEMASAN NILAI BUDAYA
135. PENGELOLA DATA PENGEMBANGAN INVESTASI
136. PENGELOLA DATA PENGEMBANGAN KOMPETENSI KELULUSAN
137. PENGELOLA DATA PENGEMBANGAN SITUS
138. PENGELOLA DATA PENGENDALIAN MASYARAKAT
139. PENGELOLA DATA PENGENDALIAN PERTANAHAN
140. PENGELOLA DATA PENGETAHUAN TRADISIONAL
141. PENGELOLA DATA PENGGUNAAN BAHASA
142. PENGELOLA DATA PENGKAJIAN DAN PERAWATAN
143. PENGELOLA DATA PENILAIAN VARIETAS
144. PENGELOLA DATA PENULISAN NILAI BUDAYA
145. PENGELOLA DATA PENULISAN SEJARAH
146. PENGELOLA DATA PENYELENGGARAAN TES
147. PENGELOLA DATA PENYUSUNAN BAHAN PEMBINAAN TEKNIS PENGUKURAN DAN PEMETAAN
148. PENGELOLA DATA PERAWATAN KAPAL PENGAWAS
149. PENGELOLA DATA PERIJINAN CAGAR BUDAYA DAN KOLEksi MUSEUM
150. PENGELOLA DATA PERUMUSAN NILAI BUDAYA
151. PENGELOLA DATA PNBP
152. PENGELOLA DATA PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

153. PENGELOLA DATA PROGRAM INTERNALISASI NILAI DAN DIPLOMASI BUDAYA
154. PENGELOLA DATA PROGRAM PENGEMBANGAN TENAGA TEKNIS DAN FUNGSIONAL NON PENDIDIK
155. PENGELOLA DATA PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI SDM KEBUDAYAAN
156. PENGELOLA DATA PROGRAM SERTIFIKASI SDM KEBUDAYAAN
157. PENGELOLA DATA PUBLIKASI ILMIAH
158. PENGELOLA DATA PUBLIKASI SEJARAH
159. PENGELOLA DATA RANCANG BANGUN SARANA ANGKUTAN SDP
160. PENGELOLA DATA REKONSILIASI
161. PENGELOLA DATA SARANA ANGKUTAN SDP
162. PENGELOLA DATA SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
163. PENGELOLA DATA SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN
164. PENGELOLA DATA SEJARAH
165. PENGELOLA DATA SENGKETA PERTANAHAN
166. PENGELOLA DATA SENI PERTUNJUKAN NONTRADISIONAL
167. PENGELOLA DATA SENI PERTUNJUKAN TRADISIONAL
168. PENGELOLA DATA SENI RUPA MURNI
169. PENGELOLA DATA SENI RUPA TERAPAN
170. PENGELOLA DATA SISTEM PEMBELAJARAN
171. PENGELOLA DATA STATISTIK
172. PENGELOLA DATA SUMBER SEJARAH
173. PENGELOLA DATA SUPERVISI DAN FASILITASI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
174. PENGELOLA DATA SUPERVISI KPPN
175. PENGELOLA DATA TANAH NEGARA, TANAH TERLANTAR DAN TANAH KRITIS
176. PENGELOLA DATA TENAGA KEPENDIDIKAN
177. PENGELOLA DATA TP/TGR
178. PENGELOLA DATA TRANSAKSI
179. PENGELOLA DATA UPACARA ADAT
180. PENGELOLA DATA WARISAN BUDAYA BENDA
181. PENGELOLA DATA WARISAN BUDAYA TAKBENDA
182. PENGELOLA DATABASE
183. PENGELOLA DATABASE KELEMBAGAAN PETANI
184. PENGELOLA DATABASE PENDIDIKAN
185. PENGELOLA DATABASE PROFESI SDM PERTANIAN
186. PENGELOLA DATABASE SPM
187. PENGELOLA DISIPLIN PEGAWAI
188. PENGELOLA DISTRIBUSI DAN PEMASARAN
189. PENGELOLA DISTRIBUSI TERNAK GADUHAN DAN SEMI GADUHAN
190. PENGELOLA DOKUMEN CAGAR BUDAYA DAN KOLEKSI MUSEUM
191. PENGELOLA DOKUMEN DAN ALAT PENGUKURAN DAN PEMETAAN
192. PENGELOLA DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM
193. PENGELOLA DOKUMEN MENGENAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
194. PENGELOLA DOKUMEN PERIZINAN
195. PENGELOLA DOKUMEN PERJALANAN LUAR NEGERI
196. PENGELOLA DOKUMEN PUTUSAN
197. PENGELOLA DOKUMENTASI
198. PENGELOLA DUKUNGAN KOORDINASI STABILITAS SISTEM KEUANGAN
199. PENGELOLA EDUKASI
200. PENGELOLA EKSPLORASI CAGAR BUDAYA
201. PENGELOLA EKSPOR HASIL USAHA INDUSTRI DAN USAHA PERDAGANGAN
202. PENGELOLA EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL
203. PENGELOLA ENERGI, MINYAK DAN GAS BUMI
204. PENGELOLA EVALUASI DAN PENGAWASAN PENYERAPAN ANGGARAN
205. PENGELOLA EVALUASI TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
206. PENGELOLA FASILITAS PENGUJIAN, PEMERIKSA DAN PERAWATAN
207. PENGELOLA FASILITAS SOSIAL DAN UMUM
208. PENGELOLA FASILITASI BANTUAN HUKUM
209. PENGELOLA FASILITASI DAN MEDIASI PEMBANGUNAN USAHA PERDAGANGAN EKSPOR-IMPOR
210. PENGELOLA FASILITASI DAN MEDIASI PERLINDUNGAN KONSUMEN

- 211. PENGELOLA FORMASI DAN PENGADAAN PEGAWAI
- 212. PENGELOLA GAJI
- 213. PENGELOLA GEOLOGI, TATA LINGKUNGAN DAN AIR BAWAH TANAH
- 214. PENGELOLA GEOSPASIAL
- 215. PENGELOLA HAK CIPTA DAN MEREK
- 216. PENGELOLA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
- 217. PENGELOLA HUBUNGAN KERJASAMA USAHA INDUSTRI
- 218. PENGELOLA IJIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH
- 219. PENGELOLA IMB GEDUNG/BANGUNAN
- 220. PENGELOLA INFORMASI AKADEMIK (PTAN)
- 221. PENGELOLA INFORMASI KEPARIWISATAAN
- 222. PENGELOLA INFORMASI KERJASAMA
- 223. PENGELOLA INFORMASI LINGKUNGAN
- 224. PENGELOLA INFORMASI PERTANAHAN
- 225. PENGELOLA INFORMASI PRODUK HUKUM
- 226. PENGELOLA INKUBASI
- 227. PENGELOLA INSPEKSI SUNGAI DANAU DAN PENYEGERANGAN
- 228. PENGELOLA INSTALASI
- 229. PENGELOLA INSTALASI AIR DAN LISTRIK
- 230. PENGELOLA INSTALASI KEBUN/LAHAN PRAKTEK DAN SCREEN HOUSE
- 231. PENGELOLA INSTALASI TEKNOLOGI INFORMASI
- 232. PENGELOLA INSTALASI TERNAK
- 233. PENGELOLA INVENTARISASI, TABULASI DAN STATISTIK PROGRAM KERJA
- 234. PENGELOLA IRIGASI
- 235. PENGELOLA JASA KONSTRUKSI
- 236. PENGELOLA JASA PANGKALAN PENDARATAN IKAN
- 237. PENGELOLA KALENDER PENDIDIKAN DASAR
- 238. PENGELOLA KALIBRASI PERALATAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
- 239. PENGELOLA KANDANG HEWAN PERCOBAAN
- 240. PENGELOLA KARIR PENDIDIK
- 241. PENGELOLA KARTU PENGENAL NPWP
- 242. PENGELOLA KEAMANAN DAN KETERTIBAN
- 243. PENGELOLA KEAMANAN PANGAN SEGAR DAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH
- 244. PENGELOLA KEAMANAN SISTEM INFORMASI
- 245. PENGELOLA KEBIDANAN
- 246. PENGELOLA KEBIJAKAN KELEMBAGAAN KOPERASI
- 247. PENGELOLA KEBUTUHAN BIBIT TANAMAN PADI, BUAH-BUAHAN SERTA SAYURAN
- 248. PENGELOLA KEFARMASIAN
- 249. PENGELOLA KEGIATAN DAN ANGGARAN
- 250. PENGELOLA KEGIATAN HARI BESAR KEAGAMAAN
- 251. PENGELOLA KEGIATAN SURVEY DAN PERENCANAAN
- 252. PENGELOLA KEKAYAAN DESA DAN ADMINISTRASI DESA
- 253. PENGELOLA KEKAYAAN NEGARA
- 254. PENGELOLA KELAYAKAN SDA
- 255. PENGELOLA KELEMBAGAAN BENIH
- 256. PENGELOLA KELEMBAGAAN KURSUS DAN PELATIHAN
- 257. PENGELOLA KELEMBAGAAN PAUD
- 258. PENGELOLA KELEMBAGAAN PENDIDIKAN
- 259. PENGELOLA KELENGKAPAN JALAN
- 260. PENGELOLA KEMAHASISWAAN/ALUMNI
- 261. PENGELOLA KEMASJIDAN
- 262. PENGELOLA KEMASYARAKATAN SPIRITAL
- 263. PENGELOLA KENDARAAN
- 264. PENGELOLA KENDARAAN DAN PERJALANAN DINAS
- 265. PENGELOLA KEPERAWATAN
- 266. PENGELOLA KERJASAMA DAN INVESTASI
- 267. PENGELOLA KERJASAMA PENANAMAN MODAL
- 268. PENGELOLA KERUGIAN NEGARA
- 269. PENGELOLA KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET

- 270. PENGELOLA KESEHATAN TERNAK BESAR, KECIL DAN UNGGAS
- 271. PENGELOLA KESEHATAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
- 272. PENGELOLA KESEJAHTERAAN SOSIAL
- 273. PENGELOLA KESELAMATAN DAN KEAMANAN KAPAL SDP
- 274. PENGELOLA KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN SDP
- 275. PENGELOLA KETAHANAN PANGAN
- 276. PENGELOLA KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN
- 277. PENGELOLA KETRANSMIGRASIAN
- 278. PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DESA
- 279. PENGELOLA KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH
- 280. PENGELOLA KOLEKSI
- 281. PENGELOLA KONSULTAN PAJAK
- 282. PENGELOLA KURIKULUM
- 283. PENGELOLA KURIKULUM PENINGKATAN MUTU SEKOLAH
- 284. PENGELOLA LABORATORIUM
- 285. PENGELOLA LABORATORIUM KOMPUTER
- 286. PENGELOLA LABORATORIUM PENGOLAHAN HASIL DAN KULTUR JARINGAN
- 287. PENGELOLA LAHAN PERTANIAN
- 288. PENGELOLA LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN
- 289. PENGELOLA LALU LINTAS TERNAK/PENGURUS IZIN BUDI DAYA TERNAK
- 290. PENGELOLA LAPORAN KEUANGAN
- 291. PENGELOLA LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN (LPPD), LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (EPPD)
- 292. PENGELOLA LAYANAN AKADEMIK
- 293. PENGELOLA LAYANAN BKB, BKR DAN BKL
- 294. PENGELOLA LAYANAN INFORMASI PENERIMAAN NEGARA
- 295. PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL
- 296. PENGELOLA LAYANAN PELABUHAN DAN STEIGHER
- 297. PENGELOLA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
- 298. PENGELOLA LHKPN
- 299. PENGELOLA LIMBAH
- 300. PENGELOLA LIMBAH PENGUJIAN
- 301. PENGELOLA LINGKUNGAN
- 302. PENGELOLA LINGKUNGAN BUDAYA
- 303. PENGELOLA LITERASI FILM
- 304. PENGELOLA LPSE
- 305. PENGELOLA LSP
- 306. PENGELOLA LSP – P1
- 307. PENGELOLA MANAJEMEN TRANSPORTASI ASDP
- 308. PENGELOLA MEDIA CENTER DAN KEMITRAAN MEDIA
- 309. PENGELOLA MEDIA CETAK
- 310. PENGELOLA METROLOGI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
- 311. PENGELOLA MONITORING DAN EVALUASI
- 312. PENGELOLA MONITORING DAN EVALUASI, PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DAN PENYELESAIAN KASUS - KASUS PEMERINTAHAN DESA
- 313. PENGELOLA MUSEUM DAN KOLEKSI BENDA SENI
- 314. PENGELOLA MUTASI PENDUDUK
- 315. PENGELOLA MUTU
- 316. PENGELOLA NASKAH
- 317. PENGELOLA OBAT DAN ALAT -ALAT KESEHATAN
- 318. PENGELOLA OBJEK WISATA
- 319. PENGELOLA OBSERVASI
- 320. PENGELOLA ORGANISASI KEMAHASISWAAN
- 321. PENGELOLA ORGANISASI PERGURUAN TINGGI
- 322. PENGELOLA ORGANISASI POLITIK DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
- 323. PENGELOLA PAI PADA PTU
- 324. PENGELOLA PAMERAN DAN PERAGAAN
- 325. PENGELOLA PARTISIPASI
- 326. PENGELOLA PASAR

327. PENGELOLA PASCA PANEN
328. PENGELOLA PBB P2 DAN BPHTB
329. PENGELOLA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
330. PENGELOLA PEKARYA KEBUN
331. PENGELOLA PELABUHAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN
332. PENGELOLA PELAKSANAAN PENGUJIAN MUTU SECARA LABORATORIS
TERHADAP PRODUK HASIL PERIKANAN
333. PENGELOLA PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN
334. PENGELOLA PELAKSANAAN PROGRAM INTERNALISASI NILAI DAN DIPLOMASI
BUDAYA
335. PENGELOLA PELAKSANAAN PROGRAM KELEMBAGAAN DAN KERJASAMA
336. PENGELOLA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH
337. PENGELOLA PELAPORAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN DANA ALOKASI
KHUSUS (DAK) DAN BANTUAN KEUANGAN PROVINSI
338. PENGELOLA PELAPORAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN APBD
KABUPATEN
339. PENGELOLA PELAPORAN DATA PENERIMAAN
340. PENGELOLA PELAPORAN KEUANGAN DAERAH
341. PENGELOLA PELAYANAN DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN KB
342. PENGELOLA PELAYANAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
343. PENGELOLA PELAYANAN KESEHATAN
344. PENGELOLA PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK DAN LOGISTIK
345. PENGELOLA PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL DAN LANSIA
346. PENGELOLA PELESTARIAN SUMBER DAYA ALAM
347. PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
348. PENGELOLA PEMANFAATAN ENERGI DAN PENYEDIAAN LISTRIK PERDESAAN
349. PENGELOLA PEMANTAUAN
350. PENGELOLA PEMANTAUAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
351. PENGELOLA PEMASARAN
352. PENGELOLA PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JEMBATAN
353. PENGELOLA PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN
354. PENGELOLA PEMBELAJARAN BAHASA DAN SASTRA
355. PENGELOLA PEMBERANTASAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG(P2B2)
356. PENGELOLA PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG(P2ML)
357. PENGELOLA PEMBERDAYAAN LEMBAGA SOSIAL
358. PENGELOLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
359. PENGELOLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN
360. PENGELOLA PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
361. PENGELOLA PEMBERI KETATALAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN
362. PENGELOLA PEMBERIAN HAK PVT
363. PENGELOLA PEMBIAYAAN DAERAH
364. PENGELOLA PEMBINAAN BANTUAN
365. PENGELOLA PEMBINAAN DAN ANALISIS PEMBANGUNAN
366. PENGELOLA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN
367. PENGELOLA PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI
368. PENGELOLA PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA
369. PENGELOLA PEMBINAAN TEKNIS SURVEYOR BERLISENSI
370. PENGELOLA PEMEGANG IJIN PENYEWA TANAH DAN INVENTARISASI ASET
DAERAH
371. PENGELOLA PEMELIHARAAN DAN PEMUGARAN CAGAR BUDAYA DAN KOLEKSI
MUSEUM
372. PENGELOLA PEMELIHARAAN JALAN
373. PENGELOLA PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI
374. PENGELOLA PEMELIHARAAN KONSERVASI LINGKUNGAN DAN KAWASAN
KONSERVASI
375. PENGELOLA PEMERIKSA PERALATAN DAN FASILITAS PELABUHAN SDP
376. PENGELOLA PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN
377. PENGELOLA PEMETAAN SEJARAH
378. PENGELOLA PEMETAAN SUMBER DAYA INVESTASI
379. PENGELOLA PENAGIHAN DAN PENGAWASAN

- 380. PENGELOLA PENATAAN SARANA DAN PRASARANA
- 381. PENGELOLA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PAJAK/RETRIBUSI
- 382. PENGELOLA PENDAFTARAN/PEMBATALAN HAJI
- 383. PENGELOLA PENDAPATAN
- 384. PENGELOLA PENDIDIKAN
- 385. PENGELOLA PENDIDIKAN DAN EVALUASI
- 386. PENGELOLA PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
- 387. PENGELOLA PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN KESEHATAN
- 388. PENGELOLA PENELITIAN
- 389. PENGELOLA PENELITIAN BIDANG IPSK
- 390. PENGELOLA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
- 391. PENGELOLA PENELITIAN DASAR DAN PENGEMBANGAN ILMU
- 392. PENGELOLA PENERANGAN JALAN
- 393. PENGELOLA PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
- 394. PENGELOLA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
- 395. PENGELOLA PENGADAAN TANAH
- 396. PENGELOLA PENGADUAN PUBLIK
- 397. PENGELOLA PENGAIRAN
- 398. PENGELOLA PENGAJUAN SPP SEKRETARIAT DAERAH
- 399. PENGELOLA PENGAMATAN PENYAKIT (SURVEILANS EPIDEMIOLOGI) DAN IMUNISASI
- 400. PENGELOLA PENGANEKARAGAMAN PANGAN
- 401. PENGELOLA PENGAWAKAN KAPAL PENGAWAS
- 402. PENGELOLA PENGAWASAN
- 403. PENGELOLA PENGAWASAN LLAJ
- 404. PENGELOLA PENGAWASAN PEMBUDIDAYAAN IKAN
- 405. PENGELOLA PENGAWASAN PENANGKAPAN IKAN
- 406. PENGELOLA PENGAWASAN PENGOLAHAN, PENGANGKUTAN DAN PEMASARAN IKAN
- 407. PENGELOLA PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN
- 408. PENGELOLA PENGEMBANGAN BUDIDAYA DAN PEMASARAN PERIKANAN
- 409. PENGELOLA PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN USAHA
- 410. PENGELOLA PENGEMBANGAN INKUBASI BISNIS DAN WORKSHOP
- 411. PENGELOLA PENGEMBANGAN INVESTASI
- 412. PENGELOLA PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
- 413. PENGELOLA PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT
- 414. PENGELOLA PENGEMBANGAN MANAJEMEN SEKOLAH
- 415. PENGELOLA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH
- 416. PENGELOLA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
- 417. PENGELOLA PENGEMBANGAN SARANA IPTEK
- 418. PENGELOLA PENGEMBANGAN SISTEM PEMBELAJARAN
- 419. PENGELOLA PENGEMBANGAN SUMBERDAYA PAUDNI
- 420. PENGELOLA PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN (OPT)
- 421. PENGELOLA PENGENDALIAN DAN OPERASIONAL
- 422. PENGELOLA PENGENDALIAN MASYARAKAT
- 423. PENGELOLA PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
- 424. PENGELOLA PENGENDALIAN PERTANAHAN
- 425. PENGELOLA PENGENDALIAN/ MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN
- 426. PENGELOLA PENGERAK PERAN SERTA MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
- 427. PENGELOLA PENGGUNAAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR
- 428. PENGELOLA PENGKAJIAN DAN PENELAAHAN HUKUM
- 429. PENGELOLA PENGKAJIAN DAN PERAWATAN
- 430. PENGELOLA PENGONSERVASI BAHASA DAN SASTRA
- 431. PENGELOLA PENGUATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
- 432. PENGELOLA PENGUATAN/ PEMBERDAYAAN LEMBAGA
- 433. PENGELOLA PENGUJIAN KENDARAAN
- 434. PENGELOLA PENILAI USAHA PERKEBUNAN
- 435. PENGELOLA PENILAIAN DAN AKREDITASI PENDIDIKAN
- 436. PENGELOLA PENILAIAN KINERJA PEGAWAI

437. PENGELOLA PENILAIAN PELAYANAN PELABUHAN ASDP
438. PENGELOLA PENILAIAN VARIETAS
439. PENGELOLA PENINGKATAN KOMPETENSI KEPALA SEKOLAH
440. PENGELOLA PENINGKATAN KOMPETENSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
441. PENGELOLA PENINGKATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DALAM NEGERI
442. PENGELOLA PENINGKATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN LUAR NEGERI
443. PENGELOLA PENUNJANG KARIR MAHASISWA
444. PENGELOLA PENYAJIAN DAN LAYANAN EDUKASI
445. PENGELOLA PENYAKIT TIDAK MENULAR(PTM)
446. PENGELOLA PENYALURAN DAN PENEMPATAN KERJA PENYANDANG CACAT DAN LANSIA
447. PENGELOLA PENYALURAN INVESTASI
448. PENGELOLA PENYALURAN PINJAMAN DAN HIBAH
449. PENGELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN
450. PENGELOLA PENYELENGGARAAN DIKLAT
451. PENGELOLA PENYELENGGARAAN MEDIA ELEKTRONIK
452. PENGELOLA PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH
453. PENGELOLA PENYELESAIAN HASIL PENGAWASAN
454. PENGELOLA PENYIAP BAHAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN KELEMBAGAAN PETANI
455. PENGELOLA PENYUSUNAN BAHAN PEMBINAAN TEKNIS PENGUKURAN DAN PEMETAAN
456. PENGELOLA PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
457. PENGELOLA PENYUSUNAN RENCANA DAN PROGRAM
458. PENGELOLA PERANGKAT KECAMATAN
459. PENGELOLA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
460. PENGELOLA PERBENDAHARAAN DAN PELAYANAN
461. PENGELOLA PERBENGKELAN DAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
462. PENGELOLA PERBUKUAN PENDIDIKAN
463. PENGELOLA PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
464. PENGELOLA PERENCANAAN DAN PELAPORAN
465. PENGELOLA PERENCANAAN DAN PELAPORAN USAHATANI
466. PENGELOLA PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN
467. PENGELOLA PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENINGKATAN KUALIFIKASI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
468. PENGELOLA PERENCANAAN TEKNIS TATA BANGUNAN
469. PENGELOLA PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, BUDAYA DAN PARIWISATA
470. PENGELOLA PERHUTANAN SOSIAL DAN ANEKA USAHA
471. PENGELOLA PERIJINAN ANGKUTAN JALAN
472. PENGELOLA PERIJINAN USAHA PERTAMBANGAN
473. PENGELOLA PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN BADAN USAHA DAERAH
474. PENGELOLA PERIZINAN
475. PENGELOLA PERJALANAN DINAS
476. PENGELOLA PERKARA
477. PENGELOLA PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
478. PENGELOLA PERLINDUNGAN SOSIAL
479. PENGELOLA PERLINDUNGAN TANAMAN DAN PENGELOLAAN HASIL PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
480. PENGELOLA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN
481. PENGELOLA PERMODALAN DAN ANEKA USAHA PERHUTANAN SOSIAL
482. PENGELOLA PERMODALAN DAN INVESTASI
483. PENGELOLA PERMODALAN KOPERASI DAN UMKM
484. PENGELOLA PERMODALAN USAHA PERKEBUNAN
485. PENGELOLA PERPARKIRAN
486. PENGELOLA PERPUSTAKAAN
487. PENGELOLA PERSIDANGAN
488. PENGELOLA PERTAMBANGAN ENERGI DAN LINGKUNGAN HIDUP
489. PENGELOLA PERTANAHAN
490. PENGELOLA PERTANIAN DAN KELAUTAN
491. PENGELOLA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

492. PENGELOLA PESERTA DIDIK
493. PENGELOLA PETERNAKAN
494. PENGELOLA PIUTANG NEGARA
495. PENGELOLA PNBP
496. PENGELOLA POLA PANGAN HARAPAN
497. PENGELOLA POLIKLINIK
498. PENGELOLA PRODUKSI
499. PENGELOLA PROFESI SDM PERTANIAN
500. PENGELOLA PROGRAM DAN EVALUASI PENGEMBANGAN PAUDNI
501. PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN
502. PENGELOLA PROGRAM DAN LAPORAN
503. PENGELOLA PROGRAM DUNIA USAHA
504. PENGELOLA PROGRAM GIZI
505. PENGELOLA PROGRAM IMUNISASI
506. PENGELOLA PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN
507. PENGELOLA PROGRAM KESEHATAN KELUARGA
508. PENGELOLA PROGRAM MINAT, BAKAT, DAN PENALARAN MAHASISWA
509. PENGELOLA PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK
510. PENGELOLA PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI SDM KEBUDAYAAN
511. PENGELOLA PROGRAM PENYULUHAN
512. PENGELOLA PROGRAM SERTIFIKASI PENDIDIK
513. PENGELOLA PROGRAM STUDI
514. PENGELOLA PROMOSI DAN INFORMASI WISATA
515. PENGELOLA PROSES PENYENSORAN
516. PENGELOLA PTAPD DAN RT/RW SERTA PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA
517. PENGELOLA PUSTAKA ELEKTRONIK
518. PENGELOLA RAB PEMELIHARAAN SARANA PENGAIRAN
519. PENGELOLA REALISASI LAPORAN PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH
520. PENGELOLA REHABILITASI DAN PELAYANAN SOSIAL
521. PENGELOLA REHABILITASI SOSIAL
522. PENGELOLA REKAYASA LALU LINTAS
523. PENGELOLA RENCANA ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DAN LINGKUNGAN HIDUP
524. PENGELOLA RENCANA KEPEGAWAIAN KEUANGAN DAN POLDAGRI
525. PENGELOLA RENCANA PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
526. PENGELOLA RENCANA PEMERINTAHAN UMUM
527. PENGELOLA RENCANA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
528. PENGELOLA RENCANA PENELITIAN PENGEMBANGAN
529. PENGELOLA RENCANA PENGENDALIAN
530. PENGELOLA RENCANA SOSIAL DAN KESEHATAN
531. PENGELOLA RENCANA TATA RUANG DAN PERHUBUNGAN
532. PENGELOLA RETRIBUSI TERMINAL
533. PENGELOLA RUJUKAN KESEHATAN
534. PENGELOLA RUMAH POTONG HEWAN
535. PENGELOLA SAMPAH
536. PENGELOLA SAMPEL PENGUJIAN
537. PENGELOLA SARANA ANGKUTAN
538. PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA KANTOR
539. PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA PAUD
540. PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA PEMAKAMAN UMUM
541. PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
542. PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DASAR
543. PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN MENENGAH
544. PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA PNFI
545. PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA SDA
546. PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA TAMAN
547. PENGELOLA SARANA IPTEK
548. PENGELOLA SARANA KESEHATAN LINGKUNGAN
549. PENGELOLA SARANA KURSUS DAN PELATIHAN
550. PENGELOLA SARANA OLAHRAGA

- 551. PENGELOLA SARANA OPERASI
- 552. PENGELOLA SARANA PEMBIBITAN DAN PENGHIJAUAN
- 553. PENGELOLA SARANA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ESDM
- 554. PENGELOLA SARANA PENYELIDIKAN GEOLOGI
- 555. PENGELOLA SARANA PERINDUSTRIAN
- 556. PENGELOLA SARANA PRASARANA RUMAH TANGGA DINAS
- 557. PENGELOLA SARANA WISATA
- 558. PENGELOLA SENGKETA KONFLIK PERTANAHAN
- 559. PENGELOLA SERAH SIMPAN KCKR
- 560. PENGELOLA SERTIFIKASI
- 561. PENGELOLA SERTIFIKASI DESAIN TEKNIS PERLENGKAPAN JALAN
- 562. PENGELOLA SERTIFIKASI KOMPETENSI PENILAI ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
- 563. PENGELOLA SETELMEN INVESTASI
- 564. PENGELOLA SIAK
- 565. PENGELOLA SIM PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
- 566. PENGELOLA SIMPEG
- 567. PENGELOLA SISTEM DAN JARINGAN
- 568. PENGELOLA SISTEM INFORMASI KEPENDUDUKAN
- 569. PENGELOLA SISTEM INFORMASI SARANA DAN PRASARANA JALAN
- 570. PENGELOLA SISTEM MANAJEMEN JALAN
- 571. PENGELOLA SISTEM PELAYANAN ANGKUTAN
- 572. PENGELOLA SISTEM PEMBELAJARAN
- 573. PENGELOLA SITUS/WEB
- 574. PENGELOLA SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB
- 575. PENGELOLA STATISTIK PERIKANAN
- 576. PENGELOLA SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH
- 577. PENGELOLA SUPERVISI DAN FASILITASI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
- 578. PENGELOLA SURAT
- 579. PENGELOLA SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN
- 580. PENGELOLA SURVEYOR BERLISENSI
- 581. PENGELOLA TAKAH
- 582. PENGELOLA TANAH NEGARA, TANAH TERLANTAR DAN TANAH KRITIS
- 583. PENGELOLA TANAH NON PERTANIAN
- 584. PENGELOLA TANAH PERTANIAN
- 585. PENGELOLA TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
- 586. PENGELOLA TATA BANGUNAN PEMERINTAH
- 587. PENGELOLA TATA BANGUNAN UMUM
- 588. PENGELOLA TATA GUNA LAHAN, AIR, SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN
- 589. PENGELOLA TATA RUANG
- 590. PENGELOLA TATA RUANG DAN KONSERVASI KAWASAN
- 591. PENGELOLA TATA RUANG DAN TATA GUNA BANGUNAN
- 592. PENGELOLA TEACHING FACTORY
- 593. PENGELOLA TEKNIK KONSTRUKSI BERKELANJUTAN
- 594. PENGELOLA TEKNIS BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ASDP
- 595. PENGELOLA TEKNIS SURVEY JARINGAN PRASARANA DAN PELAYANAN
- 596. PENGELOLA TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN
- 597. PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
- 598. PENGELOLA TEKNOLOGI PASCAPANEN
- 599. PENGELOLA TEKNOLOGI PENGENDALIAN OPT
- 600. PENGELOLA TEKNOLOGI PERBENIHAN
- 601. PENGELOLA TEKSTUAL DAN SPASIAL
- 602. PENGELOLA TEMPAT TAHANAN
- 603. PENGELOLA TEMPAT UJI KOMPETENSI
- 604. PENGELOLA TENAGA KEPENDIDIKAN
- 605. PENGELOLA TENAGA TEKNIS SLTP
- 606. PENGELOLA TENAGA TEKNIS TK/SD
- 607. PENGELOLA TERJEMAHAN DAN KERJASAMA
- 608. PENGELOLA TERMINAL
- 609. PENGELOLA TERMINAL AGRIBISNIS DAN PENDATAAN DISTRIBUSI KOMODITI PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

- 610. PENGELOLA TERNAK UNGGAS
- 611. PENGELOLA TIBUMTRANMAS
- 612. PENGELOLA TOPONIMI
- 613. PENGELOLA TRANSFER
- 614. PENGELOLA TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TGR
- 615. PENGELOLA TV DAN RADIO
- 616. PENGELOLA UNIT LAYANAN PENGADAAN
- 617. PENGELOLA UNIT PRODUKSI
- 618. PENGELOLA UPTD PASAR HEWAN DAN RPH
- 619. PENGELOLA URUSAN AGAMA
- 620. PENGELOLA URUSAN KESEHATAN MASYARAKAT
- 621. PENGELOLA USAHA ANGKUTAN
- 622. PENGELOLA USAHA KEPARIWISATAAN
- 623. PENGELOLA USAHA PEMASARAN DAN PROMOSI WISATA
- 624. PENGELOLA USAHA PEMOTONGAN TERNAK/UNGGAS DAN LALU LINTAS DAGING
- 625. PENGELOLA USAHA TANI PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
- 626. PENGELOLA USAHA TANI PETERNAKAN DAN KEHEWANAN
- 627. PENGELOLA WAJIB PAJAK/RETRIBUSI DAERAH
- 628. PENGELOLA WISMA
- 629. PENGELOLA/KOORDINATOR LABOBORATORIUM

16. PENGEMBANG (22)

IKHTISAR JABATAN:

Menerima, memeriksa, mengumpulkan bahan dan data **objek kerja** sertamengkaji dan mengembangkan **objek kerja** sesuai prosedur dan ketentuan yangberlaku untuk tercapainya sasaran sesuai yang diharapkan.

URAIAN TUGAS:

- a. Menerima serta memeriksa bahan dan data **obyek kerja** sesuai denganprosedur sebagai bahan kajian dalam rangka mengembangkan **obyek kerja**;
- b. Mengumpulkan dan mengklasifikasikan bahan dan data **obyek kerja** sesuaipesifikasi dan prosedur untuk memudahkan apabila diperlukan;
- c. Mempelajari dan mengkaji karakteristik, spesifikasi dan hal-hal yang terkaitdengan **obyek kerja** sesuai prosedur dalam rangka mengembangkan **obyekkerja**;
- d. Menyusun konsep pengembangan **obyek kerja** sesuai dengan hasil kajian danprosedur untuk tercapainya sasaran yang diharapkan;
- e. Mendiskusikan konsep pengembangan **obyek kerja** dengan pejabat yangberwenang dan yang terkait sesuai prosedur untuk kesempurnaanpengembangan **obyek kerja**;
- f. Menyusun kembali pengembangan **obyek kerja** berdasarkan hasil diskusisesuai prosedur untuk kelancaran dan optimalisasi pengembangan **obyek kerja**;
- g. Mengembangkan **obyek kerja** sesuai rencana dan prosedur untuk optimalisasihasil sesuai yang diharapkan;
- h. Mengevaluasi pengembangan **obyek kerja** sesuai prosedur sebagai bahanperbaikan dan kesempurnaan tercapainya sasaran;
- i. Melaporkan pengembangan **obyek kerja** sesuai prosedur sebagai bahanevaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secaratertulis maupun lisan.

Yang Termasuk Dalam Jabatan PENGEMBANG:

1. PENGEMBANG DIALOG DAN WAWASAN MULTIKULTURAL
2. PENGEMBANG FUNGSI DAN PERAN BAHASA
3. PENGEMBANG KOLEKSI MUSEUM
4. PENGEMBANG KURIKULUM
5. PENGEMBANG KURIKULUM DAN PERBUKUAN PENDIDIKAN MENENGAH
6. PENGEMBANG METODE PENYULUHAN
7. PENGEMBANG MODEL PENILAIAN PENDIDIKAN
8. PENGEMBANG MUTU AKADEMIK
9. PENGEMBANG PERBUKUAN

10. PENGEMBANG POTENSI SISWA/SANTRI/MAHASISWA
11. PENGEMBANG PROFESI DOSEN
12. PENGEMBANG PROGRAM PENYULUHAN
13. PENGEMBANG PROGRAM STUDI
14. PENGEMBANG SARANA DAN PRASARANA
15. PENGEMBANG SISTEM AKREDITASI DAN SERTIFIKASI LINGKUNGAN
16. PENGEMBANG SISTEM AKREDITASI DAN SERTIFIKASI PRODUK, PELATIHAN DAN PERSONIL
17. PENGEMBANG SISTEM AKREDITASI DAN SERTIFIKASI PROLASTO
18. PENGEMBANG SISTEM AKREDITASI LAB KALIBRASI
19. PENGEMBANG SISTEM AKREDITASI LABORATORIUM KALIBRASI
20. PENGEMBANG SISTEM AKREDITASI LABORATORIUM PENGUJI
21. PENGEMBANG SISTEM UJIAN, TES, DAN PENGUKURAN
22. PENGEMBANG TENAGA KEPENDIDIKAN

17. PENGENDALI (2)

IKHTISAR JABATAN:

Menghimpun dan mengendalikan data serta informasi mengenai kualitas dan kuantitas **obyek kerja** sesuai prosedur untuk menJrusun konsep rencana kegiatan selanjutnya.

URAIAN TUGAS:

- a. Menghimpun data informasi sesuai dengan permasalahannya;
- b. Menginventarisasi dan mengendalikan data serta informasi yang telah dibuat sesuai dengan jenis masalah;
- c. Memeriksa data untuk mengetahui kelengkapan, kekurangan sebagai bahan proses pengendalian selanjutnya;
- d. Mengevaluasi data pengendalian untuk bisa disajikan yang dilengkapi saran dan bahan;
- e. Melaporkan hasil pengendalian dan pencatatan data kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
- f. Melaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik tertulis maupun lisan.

Yang Termasuk Dalam Jabatan PENGENDALI:

1. PENGENDALI JARINGAN KOMUNIKASI
2. PENGENDALI TEKNOLOGI INFORMASI

18. PENGEVALUASI (19)

IKHTISAR JABATAN:

Mengevaluasi hasil laporan sesuai dengan **obyek kerja** yang diberikan dari pejabat yang berwenang dengan prosedur yang berlaku agar dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan.

URAIAN JABATAN:

- a. Menerima dan mencatat **obyek kerja** yang diberikan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk memudahkan pengendalian;
- b. Mengelompokkan **obyek kerja** sesuai dengan permasalahannya untuk memudahkan pemeriksaan;
- c. Mempelajari/memeriksa **obyek kerja** sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar data diketemukan permasalahannya;
- d. Membuat laporan hasil temuan kepada pimpinan untuk dipakai sebagai bahan pengambilan keputusan;
- e. Menyimpan hasil evaluasi sesuai dengan prosedur yang berlaku agar mudah ditemukan kembali bila diperlukan;
- f. Melaporkan pelaksanaan tugas dan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan
- g. Melaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik tertulis maupun lisan.

Yang Termasuk Dalam Jabatan PENGEVALUASI:

1. PENGEVALUASI AKADEMIK
2. PENGEVALUASI HASIL KEGIATAN BANTUAN SOSIAL MASYARAKAT
3. PENGEVALUASI KEBIJAKAN PENELITIAN
4. PENGEVALUASI KEBIJAKAN PENGABDIAN MASYARAKAT
5. PENGEVALUASI KEBIJAKAN PUBLIKASI ILMIAH
6. PENGEVALUASI KETERTELUSURAN STANDAR FISIK
7. PENGEVALUASI PENDAPATAN DAN BELANJA
8. PENGEVALUASI PERKEMBANGAN BUMD
9. PENGEVALUASI PROGRAM DAN KINERJA
10. PENGEVALUASI PROSES BIDANG LINGKUNGAN
11. PENGEVALUASI PROSES BIDANG PRODUK DAN PERSONEL
12. PENGEVALUASI RENCANA
13. PENGEVALUASI SISTEM AKREDITASI LAB PENGUJI
14. PENGEVALUASI SISTEM AKREDITASI LABORATORIUM KALIBRASI
15. PENGEVALUASI SISTEM AKREDITASI LEMBAGA INSPEKSI DAN LAB MEDIK
16. PENGEVALUASI SISTEM AKREDITASI LEMBAGA INSPEKSI DAN LABORATORIUM MEDIK
17. PENGEVALUASI STANDARD PELAYANAN MINIMUM ANGKUTAN
18. PENGEVALUASI TENAGA KEPENDIDIKAN
19. PENGEVALUASI UJI BANDING

19. PENGKAJI (5)**IKHTISAR JABATAN:**

Mengevaluasi hasil laporan sesuai dengan **obyek kerja** yang diberikan dari pejabat yang berwenang dengan prosedur yang berlaku agar dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan.

URIAN JABATAN:

- a. Mempelajari pedoman dan petunjuk kajian data dan informasi untuk mengetahui metode dan teknik pengkajian yang tepat;
- b. Menghimpun data dan informasi berdasarkan laporan yang masuk;
- c. Meninjau ke lokasi/lapangan guna mendapatkan informasi yang lebih akurat;
- d. Melakukan pengkajian data dan informasi semua penyelenggaraan kegiatan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- e. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait yang menangani permasalahan yang sama guna menunjang pelaksanaan tugas;
- f. Membuat rekomendasi naskah hasil pengujian sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk disampaikan kepada pimpinan unit terkait sebagai bahan pembuatan kebijakan;
- g. Melaporkan pelaksanaan tugas dan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

Yang Termasuk Dalam Jabatan PENGKAJI:

1. PENGKAJI BAHASA DAN SASTRA
2. PENGKAJI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
3. PENGKAJI PELINDUNGAN SITUS MANUSIA PURBA
4. PENGKAJI PENGEMBANGAN SITUS MANUSIA PURBA
5. FILOLOG

20. PENGOLAH (160)**IKHTISAR JABATAN:**

Menerima dan mengolah **obyek kerja** yang dilengkapi hasil laporan responden sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya.

URAIAN TUGAS:

- a. Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui macam, metode dan teknik dalam mengolah **obyek kerja**;
- b. Mengumpulkan dan memeriksa data sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan kegiatan berdasarkan jenis dan **obyek kerja**;
- c. Menganalisa **obyek kerja** sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan kebenaran informasi dan volume kegiatan berdasarkan laporan yang masuk;
- d. Menyusun rekapitulasi kegiatan berdasarkan jenis **obyek kerja** yang masuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui volume dan jenis **obyek kerja** yang akan diolah;
- e. Mencatat perkembangan dan permasalahan **obyek kerja** secara periodik sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui langkah pemecahannya;
- f. Mengolah dan menyajikan **obyek kerja** dalam bentuk yang telah ditetapkan sebagai bahan proses lebih lanjut;
- g. Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan

Yang Termasuk Dalam Jabatan PENGOLAH:

1. PENGOLAH BAHAN KOLEKSI DAN MUSEUM
2. PENGOLAH BAHAN LAPORAN HASIL AUDIT
3. PENGOLAH BAHAN PERENCANAAN
4. PENGOLAH BAHAN PERENCANAAN KETENAGAAN
5. PENGOLAH BAHAN REGISTRASI DAN SERTIFIKASI
6. PENGOLAH BAHAN UNTUK RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA
7. PENGOLAH BAKUAN KOMPETENSI
8. PENGOLAH BIAYA SENSOR
9. PENGOLAH DAFTAR GAJI
10. PENGOLAH DAMPAK PENOMENA ALAM (KEKERINGAN & KEBANJIRAN) REKOMONDASI DAN PEREDARAN PESTISIDA
11. PENGOLAH DATA
12. PENGOLAH DATA ADMINISTRASI PEMERIKSAAN
13. PENGOLAH DATA ANGGARAN BELANJA NEGARA
14. PENGOLAH DATA ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN
15. PENGOLAH DATA APLIKASI DAN PENGELOLAAN DATA SISTEM KEUANGAN
16. PENGOLAH DATA BAGAN AKUN STANDAR
17. PENGOLAH DATA BARANG HASIL PENINDAKAN
18. PENGOLAH DATA BEASISWA DAN BANTUAN
19. PENGOLAH DATA BERKAS SENGKETA
20. PENGOLAH DATA BIMBINGAN AKUNTANSI
21. PENGOLAH DATA BIMBINGAN PELAKSANAAN ANGGARAN
22. PENGOLAH DATA BIMBINGAN PENDATAAN, PENILAIAN, DAN PENGENAAN
23. PENGOLAH DATA BIMBINGAN PENGAWASAN
24. PENGOLAH DATA BIMBINGAN PENILAIAN
25. PENGOLAH DATA BIMBINGAN TEKNIS ANGGARAN
26. PENGOLAH DATA DAN INFORMASI INKUBATOR BISNIS
27. PENGOLAH DATA DAN INFORMASI NILAI TANAH
28. PENGOLAH DATA DAN INFORMASI PENILAIAN
29. PENGOLAH DATA DAN INFORMASI TEACHING FACTORY
30. PENGOLAH DATA DANA REHABILITASI FASILITAS PENDIDIKAN
31. PENGOLAH DATA DISTRIBUSI PITA CUKAI
32. PENGOLAH DATA DUKUNGAN OPERASI NARKOTIKA
33. PENGOLAH DATA DUKUNGAN PENGAWASAN
34. PENGOLAH DATA DUKUNGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
35. PENGOLAH DATA EKONOMI MAKRO
36. PENGOLAH DATA EKSTENSIFIKASI
37. PENGOLAH DATA FASILITAS DUKUNGAN PEMERINTAH
38. PENGOLAH DATA FASILITASI KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

39. PENGOLAH DATA HASIL PENYENSORAN
40. PENGOLAH DATA HUBUNGAN PERWAKILAN LUAR NEGERI
41. PENGOLAH DATA INFORMASI BLU
42. PENGOLAH DATA INFORMASI DAN HUKUM
43. PENGOLAH DATA INTELIJEN
44. PENGOLAH DATA INVESTASI PEMERINTAH
45. PENGOLAH DATA INVESTIGASI INTERNAL
46. PENGOLAH DATA KEBERATAN DAN BANDING
47. PENGOLAH DATA KEBIJAKAN APBN
48. PENGOLAH DATA KEBIJAKAN AUDIT
49. PENGOLAH DATA KEBIJAKAN BMN
50. PENGOLAH DATA KEBIJAKAN CUKAI
51. PENGOLAH DATA KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBIAYAAN
52. PENGOLAH DATA KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS
53. PENGOLAH DATA KEBIJAKAN DANA ALOKASI UMUM
54. PENGOLAH DATA KEBIJAKAN DANA BAGI HASIL
55. PENGOLAH DATA KEBIJAKAN DANA PENDIDIKAN
56. PENGOLAH DATA KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO
57. PENGOLAH DATA KEBIJAKAN HIBAH DAERAH
58. PENGOLAH DATA KEBIJAKAN INTELIJEN
59. PENGOLAH DATA KEBIJAKAN INVESTASI
60. PENGOLAH DATA KEBIJAKAN KEUANGAN INKLUSIF
61. PENGOLAH DATA KEBIJAKAN KEWAJIBAN KONTINJENSI
62. PENGOLAH DATA KEBIJAKAN KLASIFIKASI BARANG
63. PENGOLAH DATA KEBIJAKAN KND
64. PENGOLAH DATA KEBIJAKAN KREDIT PROGRAM DAN INVESTASI LAINNYA
65. PENGOLAH DATA KEBIJAKAN LELANG
66. PENGOLAH DATA KEBIJAKAN PAJAK
67. PENGOLAH DATA KEBIJAKAN PDRD
68. PENGOLAH DATA KEBIJAKAN PELAKSANAAN ANGGARAN
69. PENGOLAH DATA KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH
70. PENGOLAH DATA KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PERUBAHAN IKLIM
71. PENGOLAH DATA KEBIJAKAN PENERIMAAN
72. PENGOLAH DATA KEBIJAKAN PENERUSAN PINJAMAN
73. PENGOLAH DATA KEBIJAKAN PENGANGGARAN
74. PENGOLAH DATA KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLU
75. PENGOLAH DATA KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN
76. PENGOLAH DATA KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PASAR SBSN
77. PENGOLAH DATA KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PASAR SUN
78. PENGOLAH DATA KEBIJAKAN PENILAIAN
79. PENGOLAH DATA KEBIJAKAN PENINDAKAN
80. PENGOLAH DATA KEBIJAKAN PINJAMAN DAN HIBAH
81. PENGOLAH DATA KEBIJAKAN PIUTANG NEGARA
82. PENGOLAH DATA KEBIJAKAN PNBP
83. PENGOLAH DATA KEBIJAKAN PNBP LABA BUMN
84. PENGOLAH DATA KEBIJAKAN PNBP MINYAK DAN GAS BUMI
85. PENGOLAH DATA KEBIJAKAN PORTOFOLIO DAN RISIKO LIKUIDITAS
86. PENGOLAH DATA KEBIJAKAN PORTOFOLIO DAN RISIKO PEMBIAYAAN
87. PENGOLAH DATA KEBIJAKAN PROFESI LELANG
88. PENGOLAH DATA KEBIJAKAN REMUNERASI
89. PENGOLAH DATA KELEMBAGAAN
90. PENGOLAH DATA KEUANGAN DAN PASAR SUN
91. PENGOLAH DATA KINERJA INVESTASI, PENERUSAN PINJAMAN DAN KREDIT PROGRAM
92. PENGOLAH DATA KINERJA PENGANGGARAN
93. PENGOLAH DATA KOMPETENSI TENAGA PENGAJAR
94. PENGOLAH DATA KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN REKENING PEMERINTAH
95. PENGOLAH DATA KONSOLIDASI REKENING PEMERINTAH
96. PENGOLAH DATA LAPORAN INVESTASI, PENERUSAN PINJAMAN DAN KREDIT PROGRAM
97. PENGOLAH DATA LAPORAN KAS

98. PENGOLAH DATA LAPORAN KEUANGAN
99. PENGOLAH DATA LAPORAN KEUANGAN REKENING PEMERINTAH
100. PENGOLAH DATA LAPORAN KEUANGAN TRANSFER DAERAH
101. PENGOLAH DATA LAPORAN NERACA
102. PENGOLAH DATA LAPORAN NILAIAN
103. PENGOLAH DATA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
104. PENGOLAH DATA LAPORAN REALISASI ANGGARAN
105. PENGOLAH DATA MANAJEMEN BEASISWA
106. PENGOLAH DATA MANAJEMEN DANA RISET
107. PENGOLAH DATA MONEV DANA REHABILITASI FASILITAS PENDIDIKAN
108. PENGOLAH DATA MONEV HASIL TES
109. PENGOLAH DATA MONEV KEBIJAKAN PDRD
110. PENGOLAH DATA MONEV PELAKSANAAN ANGGARAN
111. PENGOLAH DATA MONEV PENDANAAN DAERAH
112. PENGOLAH DATA MONEV PENYALURAN BEASISWA
113. PENGOLAH DATA OPTIMALISASI KAS BLU
114. PENGOLAH DATA PELAYANAN
115. PENGOLAH DATA PEMANTAUAN SISTEM KEUANGAN
116. PENGOLAH DATA PEMBAYARAN PERHITUNGAN FIHAK KETIGA DAN PENYELESAIAN TGR
117. PENGOLAH DATA PEMBINAAN BLU
118. PENGOLAH DATA PEMBINAAN KELEMBAGAAN INVESTASI
119. PENGOLAH DATA PEMBINAAN PELAKSANAAN ANGGARAN
120. PENGOLAH DATA PEMBINAAN NILAI
121. PENGOLAH DATA PENDAPATAN DAN EKONOMI MAKRO
122. PENGOLAH DATA PENDATAAN, PEMETAAN, DAN PENILAIAN
123. PENGOLAH DATA PENELITIAN BIDANG IPSK
124. PENGOLAH DATA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BLU
125. PENGOLAH DATA PENGANGGARAN
126. PENGOLAH DATA PENGELOLAAN KEUANGAN
127. PENGOLAH DATA PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
128. PENGOLAH DATA PENGELOLAAN PORTOFOLIO SUN
129. PENGOLAH DATA PENGEMBANGAN KAPASITAS KEUANGAN DAERAH
130. PENGOLAH DATA PENGEMBANGAN KAPASITAS PERBENDAHARAAN
131. PENGOLAH DATA PENGEMBANGAN MODEL EKONOMI MAKRO
132. PENGOLAH DATA PENGEMBANGAN PROGRAM AKADEMIS
133. PENGOLAH DATA PENGEMBANGAN SISTEM PERBENDAHARAAN
134. PENGOLAH DATA PENGUKURAN DAN PEMETAAN
135. PENGOLAH DATA PENINDAKAN DAN SARANA OPERASI
136. PENGOLAH DATA PENYULUHAN DAN LAYANAN INFORMASI
137. PENGOLAH DATA PERATURAN BLU
138. PENGOLAH DATA PERATURAN INVESTASI
139. PENGOLAH DATA PERBENDAHARAAN
140. PENGOLAH DATA PERENCANAAN ANGGARAN
141. PENGOLAH DATA PERENCANAAN BISNIS
142. PENGOLAH DATA PERENCANAAN DUKUNGAN PEMERINTAH
143. PENGOLAH DATA PERENCANAAN PENGANGGARAN
144. PENGOLAH DATA PERJANJIAN PENERUSAN PINJAMAN
145. PENGOLAH DATA PERKARA DAN PUTUSAN
146. PENGOLAH DATA PROGRAM BEASISWA
147. PENGOLAH DATA RANCANGAN NASKAH SOAL
148. PENGOLAH DATA RISIKO INVESTASI, PENERUSAN PINJAMAN DAN KREDIT PROGRAM
149. PENGOLAH DATA RISIKO KEUANGAN NEGARA
150. PENGOLAH DATA SATUAN PENGAWAS INTERNAL
151. PENGOLAH DATA SELEKSI DAN PENEMPATAN BEASISWA
152. PENGOLAH DATA SETELMEN TRANSAKSI
153. PENGOLAH DATA SISTEM AKUNTANSI BENDAHARA UMUM NEGARA DAN UNIT KHUSUS
154. PENGOLAH DATA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
155. PENGOLAH DATA SISTEM INFORMASI PELAKSANAAN ANGGARAN

156. PENGOLAH DATA SISTEM INFORMASI PERBENDAHARAAN
157. PENGOLAH DATA STANDAR BIAYA
158. PENGOLAH DATA TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN
159. PENGOLAH LAPORAN DAN BAHAN PEMBINAAN PPAT
160. PENGOLAH SARANA DAN PRASARANA PENGAIRAN

21. PENGUJI (5)

IKHTISAR JABATAN:

Mengumpulkan bahan mengompilasi data, mengumpulkan peraturan, melakukan pengujian, memelihara data hasil pengujian, melayani pengguna dan membuat laporan hasil **objek kerja** sesuai ketentuan yang berlaku.

URAIAN TUGAS:

- a. Mengumpulkan bahan-bahan yang akan diuji sesuai permintaan dengan berpedoman pada prosedur yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- b. Mengkompilasi/menyortir data sesuai dengan kebutuhan agar memudahkan dalam penggunaannya;
- c. Mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengolahan untuk digunakan sebagai standar **objek kerja**;
- d. Melakukan **objek kerja** berdasarkan standar prosedur yang berlaku untuk mengetahui mutu yang diuji;
- e. Memproses data hasil **objek kerja** untuk disampaikan kepada yang berkepentingan sesuai permintaan agar memperoleh data yang akurat;
- f. Melayani pengguna hasil **objek kerja** sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. Melaporkan hasil pengujian sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik secara tulis maupun lisan.

Yang Termasuk Dalam Jabatan PENGUJI:

1. PENGUJI BAHAN DAN BANGUNAN
2. PENGUJI COBA PERBIBITAN DAN PERBENIHAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3. PENGUJI HIPERKES
4. PENGUJI LABORATORIUM TANAH, ASPAL DAN BETON
5. PENGUJI NAUTIKA

22. PENILAI (5)

IKHTISAR JABATAN:

Mengumpulkan bahan, mengonsep data, mengumpulkan peraturan, melakukan **objek kerja**, memelihara hasil **objek kerja**, melayani pengguna dan membuat laporan hasil **objek kerja** dalam rangka pelayanan penyajian.

URAIAN TUGAS:

- a. Mengumpulkan bahan yang akan **objek kerja** sesuai dengan prosedur yang berlaku guna untuk ditindak lanjuti;
- b. Mengompilasi/menyortir data sesuai dengan kebutuhan agar sewaktu dibutuhkan mudah untuk mencarinya;
- c. Mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bahan yang akan **objek kerja** untuk digunakan sebagai standar **objek kerja**;
- d. Melakukan **objek kerja** berdasarkan prosedur yang berlaku untuk mengetahui mutu yang dinilai;
- e. Memelihara data hasil **objek kerja** untuk disimpan ke dalam file agar memudahkan apabila ada permintaan;
- f. Melayani pengguna hasil **objek kerja** sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. Melaporkan hasil penilaian sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik tertulis maupun lisan.

Yang Termasuk Dalam Jabatan PENILAI:

1. PENILAI MUTU PRODUK
2. PENILAI PELAYANAN KEMETROLOGIAN
3. PENILAI PERBEKALAN
4. PENILAI PROPERTI
5. PENILAI TEKNIKA

23. PENYIDIK (1)**IKHTISAR JABATAN:**

Menerima laporan atau pengaduan, melakukan penangkapan dan penahanan, serta penggeledahan dan penyitaan yang terkait dengan **obyek kerja** sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka penegakan hukum.

URAIAN TUGAS:

- a. Menerima laporan atau pengaduan yang terkait dengan **obyek kerja** dari pelapor sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut;
- b. Mengumpulkan bukti yang terkait dengan laporan atau pengaduan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut;
- c. Memeriksa tersangka sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan barang bukti sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret orang yang terkait dengan proses penyidikan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut;
- g. Memanggil orang yang terkait dengan penyidikan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran diproses penyidikan;
- i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran proses penyidikan;
- j. Melaporkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- k. Melaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan.

Yang Termasuk Dalam Jabatan PENYIDIK:

1. PENYIDIK PIDANA UMUM

24. PENYULUH (37)**IKHTISAR JABATAN:**

Melakukan kegiatan penyuluhan dan pembinaan kepada **obyek kerja** sesuai dengan materi yang disampaikan agar perilaku **obyek kerja** berubah menjadi lebih baik.

URAIAN TUGAS:

- a. Mengumpulkan bahan **obyek kerja**;
- b. Mengolah bahan **obyek kerja** menjadi materi;
- c. Melaksanakan penyampaian materi;
- d. Mengevaluasi hasil **obyek kerja**; dan
- e. Melaporkan pelaksanaan penyuluhan; dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik tertulis maupun lisan.

Yang Termasuk Dalam Jabatan PENYULUH:

1. PENYULUH BAHASA
2. PENYULUH BENCANA

3. PENYULUH BIMBINGAN/KONSELING BAGI EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL
4. PENYULUH HAM
5. PENYULUH INFORMATIKA
6. PENYULUH K3
7. PENYULUH KAWASAN TRANSMIGRASI
8. PENYULUH KEAMANAN LAUT
9. PENYULUH KEAMANAN MASYARAKATAN
10. PENYULUH KEARSIPAN
11. PENYULUH KELUARGA PRA SEJAHTERA DAN KELUARGA SEJAHTERA
12. PENYULUH KEMASYARAKATAN
13. PENYULUH KEPEMUDAAN
14. PENYULUH KESEHATAN DAN PENCEGAHAN HIV/AIDS, IMS DAN BAHAYA NAFZA
15. PENYULUH KOPERASI
16. PENYULUH LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
17. PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP
18. PENYULUH OBAT DAN MAKANAN
19. PENYULUH OLAH RAGA
20. PENYULUH PANGAN
21. PENYULUH PELESTARIAN NILAI BUDAYA DAN TRADISI
22. PENYULUH PEMBANGUNAN DAERAH TERPENCIL
23. PENYULUH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN
24. PENYULUH PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
25. PENYULUH PEMILIHAN UMUM
26. PENYULUH PENANGANAN MASALAH SOSIAL
27. PENYULUH PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN ANAK
28. PENYULUH PEREKONOMIAN
29. PENYULUH PERKEBUNAN
30. PENYULUH PERPUSTAKAAN
31. PENYULUH PKK
32. PENYULUH SAR
33. PENYULUH STATISTIK
34. PENYULUH TENAGA KERJA
35. PENYULUH TRANSMIGRASI
36. PENYULUH USAHA MANDIRI DAN TTG / TPK
37. PENYULUH WISATA

25. PENYUNTING (2)

IKHTISAR JABATAN:

Mengumpulkan, memeriksa, mengkaji, dan mengonsep hasil kerja penyuntingan dan menghimpun, mengelompokan serta mencatat **obyek kerja** sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut.

URAIAN TUGAS:

- a. Mengumpulkan **obyek kerja** sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyuntingan;
- b. Memeriksa **obyek kerja** sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyuntingan;
- c. Mengkaji **obyek kerja** sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui dan memahami isi dan materi dalam rangka penyuntingan;
- d. Membuat pointer draf naskah **objek kerja** sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mempermudah penyuntingan;
- e. Membuat konsep **objek kerja** berdasarkan pointer dan referensi yang diperlukan untuk kesempurnaan konsep penyuntingan;
- f. Mendiskusikan materi **objek kerja** dengan pejabat yang berwenang dan terkait untuk kesempurnaan hasil **objek kerja**;
- g. Menyusun hasil **objek kerja** sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut;
- h. Memeriksa naskah hasil **objek kerja** dengan mengecek kembali naskah untuk menghindari kesalahan;

- i. Menyampaikan hasil naskah **objek kerja** kepada pejabat yang berwenang sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut;
- j. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan.

Yang Termasuk Dalam Jabatan PENYUNTING:

- 1. PENYUNTING NASKAH PENERBITAN BUKU
- 2. PENGALIH MEDIA

26. PERANCANG (7)

IKHTISAR JABATAN:

Menerima, memeriksa dan mengumpulkan bahan dan data **obyek kerja** serta mengajidian merancang **obyek kerja** sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuktercapainya sasaran sesuai yang diharapkan.

URAIAN TUGAS:

- a. Menerima dan memeriksa bahan dan data **obyek kerja** sesuai prosedur sebagai bahan kajian dalam rangka perancangan **obyek kerja**;
- b. Mengumpulkan dan mengklasifikasikan bahan dan data **obyek kerja** sesuai spesifikasi dan prosedur untuk memudahkan apabila diperlukan;
- c. Mempelajari dan mengkaji karakteristik, spesifikasi dan hal-hal yang terkait dengan **obyek kerja** sesuai prosedur dalam rangka perancangan **obyek kerja**;
- d. Menyusun konsep rancangan **obyek kerja** sesuai dengan hasil kajian dan prosedur untuk tercapainya sasaran yang diharapkan;
- e. Mendiskusikan konsep rancangan **obyek kerja** dengan pejabat yang berwenang dan terkait sesuai prosedur untuk kesempurnaan rancangan **obyek kerja**;
- f. Menyusun kembali rancangan **obyek kerja** berdasarkan hasil diskusi sesuai prosedur untuk kelancaran dan optimalisasi pengembangan **obyek kerja**;
- g. Membuat rancangan **obyek kerja** sesuai rencana dan prosedur untuk optimalisasi hasil sesuai yang diharapkan;
- h. Mengevaluasi proses perancangan **obyek kerja** sesuai prosedur sebagai bahan perbaikan dan kesempurnaan tercapainya sasaran;
- i. Membuat laporan perancangan **obyek kerja** sesuai prosedur sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tulisan.

Yang Termasuk Dalam Jabatan PERANCANG:

- 1. PERANCANG GRAFIS
- 2. PERANCANG SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN
- 3. PERANCANG SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN
- 4. PERANCANG SISTEM INFORMASI PENILAIAN PENDIDIKAN
- 5. DESAINER INTERIOR
- 6. KARTOGRAFER
- 7. LEGISLASI

27. PRANATA (26)

IKHTISAR JABATAN:

Merancang dan melakukan pelayanan terhadap **obyek kerja** sesuai dengan materiyang akan disampaikan dalam rangka memberikan fasilitas kepada **obyek kerja**.

URAIAN TUGAS:

- a. Mengumpulkan bahan **obyek kerja**;
- b. Mengolah bahan **obyek kerja** menjadi materi;
- c. Melaksanakan pelayanan kepada **obyek kerja**;
- d. Mengevaluasi hasil **obyek kerja**;
- e. Melaporkan pelaksanaan tugas; dan

- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik tertulis maupun lisan.

Yang Termasuk Dalam Jabatan PRANATA:

1. PRANATA ACARA
2. PRANATA ALAT PERSANDIAN
3. PRANATA BARANG DAN JASA
4. PRANATA BENCANA
5. PRANATA BINA PROFESI
6. PRANATA DAS
7. PRANATA DIKLAT
8. PRANATA FOTOGRAFI
9. PRANATA KAWASAN KONSERVASI
10. PRANATA KEARSIPAN
11. PRANATA KETRANSMIGRASIAN
12. PRANATA KOPERASI
13. PRANATA LABORATORIUM KEARSIPAN
14. PRANATA LABORATORIUM PEREKAYASAAN
15. PRANATA LABORATORIUM SUMBER ENERGI
16. PRANATA LAPORAN KEUANGAN (PETUGAS SAI)
17. PRANATA LAPORAN KEUANGAN/PETUGAS SAI
18. PRANATA PENGELOLAAN LEGER JALAN
19. PRANATA PENGEMBANGAN BIBIT TANAMAN HUTAN/ PERKEBUNAN
20. PRANATA PROMOSI
21. PRANATA REPRODUKSI ARSIP
22. PRANATA RESTORASI ARSIP
23. PRANATA SARANA DAN PRASARANA DIKLAT
24. PRANATA SISTEM INFORMASI DIKLAT APARATUR (SIDA)
25. PRANATA STANDAR KESELAMATAN
26. PRANATA TAMAN MAKAM PAHLAWAN (TMP)

28. TEKNISI (46)

IKHTISAR JABATAN:

Menerima, menginventarisasi laporan kerusakan serta memelihara mesin danatau sistem jaringan dengan cara memperbaiki atau mengganti suku cadang yangrusak agar sistem dapat berjalan lancar.

URAIAN TUGAS:

- a. Menerima dan menginventarisasi laporan kerusakan **objek kerja** berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk diadakan pemeriksaan;
- b. Memeriksa kerusakan **objek kerja** berdasarkan laporanuntuk perbaikan;
- c. Memperbaiki **objek kerja** yang rusak atau usang berdasarkan hasil pemeriksaan untuk diadakan penggantian suku cadangatau perbaikan;
- d. Merawat secara khusus suatu **objek kerja** yang masapenggunaannya telah melampaui batas waktu tertentu agar tidak cepat rusak;
- e. Melaporkan kegiatan perbaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik secaratertulis maupun lisan.

Yang Termasuk Dalam Jabatan TEKNISI:

1. TEKNISI AIR
2. TEKNISI ALAT ELEKTRO DAN ALAT KOMUNIKASI
3. TEKNISI GEDUNG/BANGUNAN
4. TEKNISI INSTALASI BUDIDAYA
5. TEKNISI INSTRUMEN
6. TEKNISI JARINGAN INSTALASI
7. TEKNISI JARINGAN TIK PENDIDIKAN
8. TEKNISI KAPAL

9. TEKNISI KONSERVASI
10. TEKNISI LABORATORIUM
11. TEKNISI LABORATORIUM DAN BENGKEL
12. TEKNISI LISTRIK DAN JARINGAN
13. TEKNISI LISTRIK, TELEPON, AC, DAN LIFT
14. TEKNISI MESIN
15. TEKNISI NAUTIKA
16. TEKNISI PANGGUNG
17. TEKNISI PELESTARI CAGAR BUDAYA
18. TEKNISI PEMBORAN
19. TEKNISI PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA
20. TEKNISI PEMERIKSAAN DAN PERAWATAN BANGUNAN DAN JALUR KERETA API
21. TEKNISI PEMERIKSAAN DAN PERAWATAN SARANA PERKERETAAPIAN
22. TEKNISI PEMETAAN DAN PENGGAMBARAN
23. TEKNISI PENGECORAN LOGAM
24. TEKNISI PERALATAN DAN MESIN
25. TEKNISI PERALATAN KANTOR
26. TEKNISI PERALATAN LABORATORIUM RISET KEMASAN
27. TEKNISI PERALATAN LABORATORIUM RISET KIMIA
28. TEKNISI PERALATAN, LISTRIK DAN ELEKTRONIKA
29. TEKNISI PESAWAT
30. TEKNISI PRODUKSI
31. TEKNISI PRODUKSI MULTIMEDIA DAN WEB
32. TEKNISI RANCANG BAGUN
33. TEKNISI SANDI BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
34. TEKNISI SARANA DAN PRASARANA
35. TEKNISI SARANA DAN PRASARANA PELABUHAN
36. TEKNISI SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN
37. TEKNISI SIPIL
38. TEKNISI SURVEY ALUR DAN PERAMBUAN SDP
39. TEKNISI SURVEY ANGKUTAN JALAN
40. TEKNISI SURVEY ANGKUTAN SDP
41. TEKNISI SURVEY JARINGAN PRASARANA DAN PELAYANAN TRANSPORTASI JALAN
42. TEKNISI SURVEY JARINGAN TRANSPORTASI
43. TEKNISI SURVEY LALU LINTAS JALAN
44. TEKNISI TEKNIKA
45. TEKNISI UJI KOMPETENSI
46. MONTIR TEKNIKA

29. VERIFIKATOR (8)

IKHTISAR JABATAN:

Menerima dan menyortir serta meneliti dan mencocokkan bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan sesuai dengan mata anggaran untuk diperiksa/diteliti apakah telah sesuai dengan peruntukannya.

URAIAN TUGAS:

- a. Menerima dan menyortir bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan serta Buku Kas untuk disusun sesuai dengan mata anggaran agar mempermudah dalam pemeriksaan/ penelitian;
- b. Meneliti dan mencocokkan bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan dengan laporan realisasi keuangan dan Buku Kas agar diketahui apakah telah sesuai dengan peruntukannya;
- c. Melakukan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- d. Melaporkan hasil temuan pemeriksaan kepada atasan untuk memperoleh tindak lanjut sebagai bahan laporan pimpinan; dan
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik tertulis maupun lisan.

Yang Termasuk Dalam Jabatan VERIFIKATOR:

- 1. VERIFIKATOR ANGGARAN
- 2. VERIFIKATOR BERKAS PERMOHONAN HAK
- 3. VERIFIKATOR DATA LAPORAN KEUANGAN
- 4. VERIFIKATOR KEUANGAN
- 5. VERIFIKATOR PAJAK
- 6. VERIFIKATOR TEKNIS PENDAFTARAN PVT SDG

